

Dasar Dasar Pendidikan

Drs. ICHSAN,M.Pd



DASAR-DASAR PENDIDIKAN

Drs. ICHSAN, M.Pd



DASAR – DASAR PENDIDIKAN

-Yogyakarta: Cetakan Pertama, Oktober 2012

195 hal.; 14,8 x 21 cm

Penulis	: Drs.ICHSAN, M.Pd
Tim Kreatif	: Hanief Azzaisy
	Wachid NR
	Gugun
Design & layout	: Grass Media Production



Kantor Utama

Jl. Gabus I No. 18 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta

Telpon : 0274 – 7834853

Kantor Layanan & Pemasaran

Jl. Ngorojo 5C Gowok Yogyakarta

Telpon : 0274 – 6551930/081903719527

grass_mediaproduction@yahoo.com

ISBN : 978-602-17039-1-5

- Hak cipta Dilindung Oleh Undang- Undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
- Materi dan isi buku diluar tanggung jawab Penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan Dasar-Dasar Pendidikan ialah uraian ringkas asas-asas atau Pengantar Pendidikan. Dasar-Dasar Kependidikan sama artinya dengan Dasar-dasar Pendidikan. Karena itu dapat pula diartikan sebagai Pengantar Pendidikan atau Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Uraian-uraian didasarkan lebih mendasar dan praktis. Disamping itu juga menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan masyarakat dan negara. Disamping itu juga uraian tentang berbagai isu pendidikan kita sehingga secara fungsional diharapkan dapat membantu pengembangan pendidikan kita.

Kami menyadari bahwa tulisan ini perlu disempurnakan. Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari para pembaca.

Yogyakarta, Oktober 2012

Ichsan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Hubungan Masyarakat dengan Pendidikan.....	50
Gambar 2	: Relevansi Pendidikan.....	221

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Skema Empat tahap Perkembangan.....	119
Tabel 2 : Jenjang Siswa-siswi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.....	216
Tabel 3 : Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2011-Maret 2012.....	217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR PENULIS.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : WAWASAN TENTANG MANUSIA DAN PENDIDIKAN.....	1
BAB II : KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN DIMENSI KEPRIBADIAN MANUSIA	8
BAB III : DASAR FILOSOFIS PENDIDIKAN	16
BAB IV : DASAR SOSIOLOGIS PENDIDIKAN	30
BAB V : DASAR PSIKOLOGIS PENDIDIKAN	44
BAB VI : DASAR YURIDIS PENDIDIKAN	87
BAB VII : DASAR RELIGIUS PENDIDIKAN	134
BAB VIII : WAWASAN BELAJAR TIADA AKHIR	138
BAB IX : PERMASALAHAN PENDIDIKAN	142
BAB X : PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH	149
BAB XI : PENDIDIKAN ISLAM PROFETIK	165
DAFTAR PUSTAKA.....	182

WAWASAN TENTANG MANUSIA DAN PENDIDIKAN

Pada bab ini akan dibahas tentang berbagai wawasan tentang manusia dan pendidikan. Pembahasan tentang pendidikan tidak lepas dari manusia, karena inti dari pendidikan itu adalah manusia. Oleh karena itu berbagai wawasan tentang manusia akan menentukan corak pendidikan yang akan diselenggarakan.

A. Wawasan Tentang Manusia

Berbicara pendidikan tidak lepas manusia itu sendiri. Pembicaraan tentang manusia sangatlah menarik dan tidak ada habis-habisnya. Manusia adalah makhluk unik, mempunyai pribadi, bertanggung jawab terhadap perkembangan pribadinya dan masyarakat di mana dia berada, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bertanggung Jawab terhadap Tuhan-Nya. Pandangan tentang manusia dapat dilihat dari berbagai sudut misalnya dari teologi, filsafat, psikologi maupun agama (Islam). Berikut beberapa wawasan tentang manusia:

1. Dari segi teologi, Mukti Ali menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpengharapan.¹ di sini manusia bukan sekedar makhluk yang berfikir dan kreatif, tetapi berpengharapan tentang hidupnya di masa depan. kehidupan tidak sekedar sekarang tetapi berkesinambungan, sekarang dan yang akan datang. Jadi manusia berfikir dan berperilaku untuk kehidupan di sini, sekarang dan untuk masa yang akan datang.

¹ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2012, hal. 179.

2. Kaum realisme, bahwa manusia makhluk rasional yang aktif dan kreatif, yang terus menerus mencari kebenaran, mencari sesuatu yang baru.²
3. Psiko analisis menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri *Id* (dorongan biologis), *Ego* (dorongan psikologis), dan *Superego* (dorongan sosial). Sehingga perilaku manusia merupakan interaksi antara komponen biologis (*Id*), komponen psikologis (*Ego*), dan komponen Sosial (*superego*); atau unsur animal, rasional, dan moral (hewani, akali, dan nilai);³ atau manusia berkeinginan (*Homo Volens*).
4. Behaviorisme memandang bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang digerakkan semata-mata oleh lingkungan (*Homo Mechanicus*). Di sini manusia seperti robot yang perilakunya ditentukan oleh lingkungan. Manusia dapat dimanipulasi sesuai dengan kehendak lingkungan. Dalam hal ini J.B. Watson pernah bersesumbar:
 "Berikan padaku selusin anak-anak sehat, tegap, dan berikan dunia yang aku atur sendiri untuk memelihara mereka. Aku jamin, aku sanggup mengambil seorang anak sembarangan saja, dan mendidiknya menjadi tipe spesialis yang aku pilih - dokter, pengacara, seniman, saudagar, dan bahkan penemis dan pencuri, tanpa memperhatikan bakat, kecenderungan, tendensi, kemampuan, pekerjaan, dan ras orang tuanya"⁴
5. Psikologi Kognitif memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya (*Homo Sapiens*).⁵ Dengan kata lain manusia sebagai makhluk yang berfikir.
6. Psikologi humanistik memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi

² *Ibid*, hal.183.

³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya), 2007), hal. 18.

⁴ *Ibid*, hal. 22.

⁵ *Ibid*, hal. 18.

transaksional dengan lingkungannya (*Homo Ludens*).⁶ atau manusia sebagai makhluk bermain.

7. Manusia dalam al-Qur'an

Menurut M. Quraish Shihab, terdapat tiga kata yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan kepada manusia, yaitu;

- 1) menggunakan kata yang terdiri dari huruf *alif, nuun, dan sin* semacam *insan, ins, nas, atau unas*.
- 2) menggunakan kata *basyar*.
- 3) menggunakan kata bani *Adam*, dan *zuriyat Adam*.⁷

Jadi, manusia digolongkan ke dalam tiga term, yaitu *insan* (dengan segala derivasinya), *basyar*, dan *bani Adam*. Uraian ini hanya membahas kata *insan* dan *basyar*.

Insan. Kata *insan* berasal dari *uns* yang berarti jimak, harmonis dan tumpah. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata *nasiya* (lupa) atau *nasa-yanusu* (guncang).⁸

Kata ini dengan segala derivasinya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 65 kali, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *pertama* kata *insan* dihubungkan dengan kata *Khalifah*. Dalam hal ini manusia memiliki keistimewaan memikul amanah, maka kata *insan* diarahkan pada sikap bertanggung jawab, dan berbuat baik. Karena perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. *Kedua* kata *insan* dihubungkan dengan predisposisi negatif. Dalam hal ini manusia menurut Al-Qur'an cenderung lalim, kufur, tergesa-gesa, bakhil, bodoh, banyak membantah, resah, gelisah dan enggan menolong, tidak berterima kasih, berbuat dosa, dan meragukan hari akhir. *Ketiga* kata *insan* dihubungkan

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 278.

⁸ H.M. Suyadi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Mikraj, 2005, hal. 32.

dengan proses penciptaannya, dimana manusia diciptakan dari tanah liat, saripati tanah dan tanah.⁹

Basyar. Kata *basyar* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 27 kali yang menunjuk pada identitas biologis. Disamping itu kata tersebut juga dikontekskan dengan makan, minum, seks, berjalan di pasar dan lainnya. Kata tersebut juga dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia, yang menjadikan mampu memikul tanggung jawab. oleh karenanya itu pulalah, tugas kekhalifahan dibebankan kepada *basyar*.¹⁰

Dari karakteristik kata tersebut, Al-Qur'an memandang bahwa manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial.

B. Wawasan Tentang Pendidikan

1. Pendidikan sebagai proses Pembebasan.

Berbagai kritik dialamatkan pada pendidikan kita, bahwa pendidikan kita masih terkesan sebagai pendidikan yang membelenggu.¹¹ Hal ini terlihat dari ketidak jelasan visi, misi, juga adanya praktik pendidikan yang sentralistik dan seragam. Praktik pendidikan cenderung kurang memperhatikan hak-hak anak secara demokratis dan kreatif, serta kurang memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kegiatan pendidikan secara kreatif dan mandiri.

Praktik pendidikan yang demikian ini hanya akan melahirkan manusia yang penurut, tidak kreatif, dan memiliki ketenggantungan yang tinggi. dalam keadaan tertentu akan menjadi beban sosial, tidak mandiri, bahkan tidak memiliki jati diri. Praktik pendidikan yang demikian kurang memberikan kebebasan dan pengalaman kepada anak untuk berkreasi. itulah sebabnya Paulo Freire menawarkan Pedagogik Kritis, yang dalam praktik pendidikan memiliki prinsip; (1) dialog, (2)

⁹ *Ibid*, Hal. 32.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *wawasan...*, Hal. 279.

¹¹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 9.

ilmu =konstruksi sosial, (3) memperhatikan kelas sosial, tidak lepas dari ideologi dan Hegemoni, diskursus (keadilan dan kemerdekaan), kurikulum tersembunyi, reproduksi sosial dan kapital budaya atau modal budaya.¹²

Pendidikan sebagai proses pembebasan tidak lain adalah merupakan proses pembedayaan. Dalam proses pembedayaan ini kemandirian merupakan hal yang penting. Ki Hadjar Dewantoro, dalam proses pendidikan itu harus didasarkan pada tiga azas; yaitu (1) kemandirian manusia, (2) sistem among, dan (3) asas keudayaan sendiri.¹³

Kemandirian. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bebas memberdayakan dirinya tanpa merampas hak orang lain. Implikasinya adalah manusia bebas mewujudkan identitasnya sendiri tetapi tidak lepas dari adanya relasi sesamanya.

Sistem Among. Prinsip kemandirian dalam pendidikan dikembangkan dalam sistem Among (ngemong: Jawa) yang memiliki makna bahwa anak ketika lahir dalam keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini merupakan proses menuju kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem among, hubungan antara peserta didik-pendidik merupakan relasi yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berdiri sendiri.

Prinsip kemandirin dan sistem among dalam proses pendidikan, menunjukkan bahwa manusia memiliki aspek personal sekaligus sosial. Hubungan aspek tersebut merupakan hubungan etis. Manusia tidak dapat mewujudkan kemanusiannya tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain, tetapi sekaligus mengakui adanya kemandirian masing-masing.

¹² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 226.

¹³ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hal. 49.

Prinsip Kebudayaan. Proses pendidikan terjadi dalam *habitus* kebudayaan Indonesia. Ki Hadjar Dewantoro menyatakan, proses pendidikan terjadi di dalam *habitus* yang sentripetal yang berpusat dari budaya lokal dan berangsur-angsur meningkat ke kepada lingkungan semakin luas kepada budaya Nasional bahkan budaya Global.

Dari hal tersebut dapat kita pahami, pendidikan sebagai proses menuju kepada kemandirian seseorang pribadi berarti merupakan proses pembebasan dari ketidak-berdayaan manusia yang memerlukan dialog dan hubungan interpersonal yang didasarkan pada keputusan-keputusan etis di dalam *habitus* lokal menuju kepada *habitus* nasional dan global.

2. Pendidikan sebagai Proses Pengembangan Pribadi Paripurna

Pada dasarnya pendidikan adalah permasalahan kemanusiaan, maka sebagai sasaran bidik yang pertama adalah manusia.

Pengembangan kepribadian manusia seutuhnya atau manusia paripurna merupakan pengembangan pribadi sebagaimana adanya. Karena keberadaan manusia adalah keberadaan dalam keberagaman maka pengembangan kepribadian manusia dalam keragaman berarti menitik-beratkan kreativitas manusia dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pendidikan manusia seutuhnya atau pendidikan kepribadian paripurna mengasumsikan keseragaman manusia yang bertentangan dengan keragaman manusia. Oleh sebab itu proses pendidikan yang menyamaratakan manusia adalah bertentangan dengan pengembangan kepribadian manusia paripurna.

Penghormatan kepada keberagaman manusia dengan adanya pengakuan adanya potensi-potensi yang berbeda di antara manusia berarti penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu pendidikan harus memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan pribadinya sesuai dengan potensinya.

Jadi, pendidikan sebagai proses pengembangan kepribadian sempurna adalah pendidikan sebagai proses humanisasi.

KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN DIMENSI KEPRIBADIAN MANUSIA

A. Kebutuhan-Kebutuhan Manusia

Maslow menyatakan, bahwa tingkah laku manusia dapat ditelaah melalui kecenderungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bermakna dan terpuaskan.¹⁴ Di sinilah Maslow menempatkan motivasi dasar manusia sebagai sentral teorinya.

Manusia memiliki sifat dasar tidak pernah puas sepenuhnya, karena kepuasan bagi manusia hanya bersifat sementara. Apabila kebutuhan tertentu terpuaskan, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi nilainya, yang menuntut untuk dipuaskan. Oleh karena itulah menurut Maslow, bahwa manusia dimotivasi oleh berbagai kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk semua orang, dan bersifat naluriah. kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tersusun secara hirarkhis dalam lima tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologi.
2. kebutuhan akan keamanan.
3. kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki.
4. kebutuhan akan penghargaan.
5. kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kebutuhan-kebutuhan ini senantiasa muncul, meskipun tidak secara berurutan atau hirarkhis. Artinya, kebutuhan yang paling dasar akan muncul lebih dahulu dan mendesak untuk dipenuhi, dan jika kebutuhan ini sudah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan berikutnya yang juga menuntut untuk dipenuhi. Sangat dimungkinkan, seseorang kebutuhan dasarnya berbeda struktur hirarkhinya dengan

¹⁴ Hasyim Muhammad, *Dialog antara Tasawuf dan Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 70.

orang lain. Misalnya seseorang yang “rekreasi” meskipun kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi.

Dengan melihat pemenuhan kebutuhan dasar seseorang, dapat disimpulkan sejauh mana kepribadian seseorang berkembang. Semakin tinggi hirarkhi kebutuhan seseorang terpuaskan, maka akan mencapai aktualisasi diri.¹⁵ Untuk mencapai aktualisasi diri, seseorang harus memuaskan kebutuhan yang lebih rendah yang terdapat pada berbagai tingkatan. Perlu dijelaskan di sini, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak hanya bersifat materi, tetapi lebih bersifat spiritual.¹⁶

1. Kebutuhan fisiologi

Kebutuhan fisiologi, adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, sehingga pemenuhannya tidak dapat ditunda. Kebutuhan-kebutuhan dasar biologis ini antara lain; kebutuhan makan, minum, oksigen, pengaturan suhu tubuh, pengeluaran kotoran, istirahat, aktivitas, dan seks. Kebutuhan-kebutuhan ini mendesak untuk didahulukan pemenuhannya dibanding kebutuhan-kebutuhan lainnya.

2. Kebutuhan akan keamanan

Perlindungan dari benda atau situasi yang membahayakan, seperti cuaca, penyakit. Ancaman bagi keadaan fisik dan psikologis (seperti takut hal yang tidak dikenal). Pentingnya hal-hal yang rutin dan dikenal.

3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki menerima dan memberi cinta, kasih sayang, rasa percaya, dan penerimaan. Berhubungan dengan orang lain, menjadi bagian dari kelompok (keluarga, teman, kerja)

¹⁵ Nigel C. Benson & Simon Grove, *Psikologi for Beginners*, terj. Bandung: Mizan, 2000, hal. 109.

¹⁶ Hasyim Muhammad, *Dialog...*, hal. 71.

4. Kebutuhan akan penghargaan. Penghargaan dan penghormatan dari orang lain dan dari diri sendiri. Perasaan memiliki pengetahuan.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Menunjukkan semua potensi diri, “menjadi seseorang dengan kualitas maksimal yang dapat diraih.

B. Pengembangan Kepribadian Manusia

Kepribadian, yang dalam bahasa Inggris *personality* dari bahasa Yunani Kuno *prosopon* atau *persona*, yang artinya “topeng” yang biasa dipakai artis dalam teater. Para artis berperilaku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, seolah-olah topeng itu mewakili kepribadian tertentu. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep awal dari *personality* adalah tingkah laku yang ditampilkan ke lingkungan sosial, kesan diri yang diinginkan agar ditangkap oleh lingkungan sosial. Ada beberapa kata yang oleh masyarakat dipakai sebagai padanan dari kata *personality*, antara lain¹⁷:

1. *Personality* (kepribadian); penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai.
2. *Charakter*; penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai (benar/salah, baik-buruk) baik secara eksplisit maupun implisit.
3. *Disposition* (watak); karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah.
4. *Temperament*; kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik, disposisi hereditas.
5. *Trait* (sifat); respon yang sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam waktu yang relatif cukup lama.
6. *Type-attribute* (ciri); mirip dengan sifat, tetapi dalam kelompok stimulus yang terbatas.
7. *Habit* (kebiasaan); respon yang sama

¹⁷ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2007, Hal.

cenderung berulang untuk stimuli yang sama pula.

Sampai sekarang, para ahli kepribadian belum sepakat tentang batasan Personality. Variasi definisi kepribadian terjadi karena tingkat pengetahuan, pengalaman para ahli yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh definisi kepribadian itu:

1. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikopisiologik seseorang yang menentukan model penyesuaianya yang unik dengan lingkungannya).¹⁸
2. Menurut Stern, Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman.¹⁹
3. Menurut Pervin, Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau bersifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi.²⁰
4. Menurut Phares, Kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi.²¹
5. Abin Syamsuddin Makmun, mengartikan kepribadian sebagai " kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik".²²

Dari beberapa definisi kepribadian tersebut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepribadian itu organisasi dinamis, maksudnya bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah

¹⁸ *Ibid*, Hal. 261.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 9.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, Hal.127.

walaupun ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian.

2. Kepribadian itu bersifat umum.
3. Kepribadian itu bersifat khas.
4. Kepribadian itu berjangka lama.
5. Kepribadian itu bersifat kesatuan.
6. Kepribadian itu berfungsi baik atau berfungsi buruk.

C. Perkembangan dan Karakteristik Kepribadian

1. Karakteristik Kepribadian

Salah satu kata kunci dari definisi kepribadian adalah penyesuaian. Penyesuaian merupakan respon individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan tuntutan (norma) lingkungan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya atau menghadapi persoalan, ternyata tidak semua individu dapat menghadapi secara wajar, normal atau sehat (*well adjustment*); di antara mereka juga banyak yang tidak sehat (*maladjustment*). E.B. Hurloch (1986) sebagaimana dikemukakan kembali Syamsu Yusuf menyatakan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat (*healthy personality*) ditandai dengan karakteristik berikut:²³

- a. Mampu menilai diri sendiri secara realistis.
- b. Mampu menilai situasi secara realistis.
- c. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis.
- d. Menerima tanggung jawab.
- e. Kemandirian (outonomi).
- f. Dapat mengontrol emosi.
- g. Berorientasi tujuan.
- h. Berorientasi keluar.
- i. Penerimaan sosial.
- j. Memiliki filsafat hidup.
- k. Berbahagian.

²³ *Ibid*, Hal. 130-131.

Menurut Maslow, orang yang sehat secara psikologis menunjukkan ciri-ciri antara, lain: (1) memiliki pandangan yang objektif tentang kenyataan yang ada, (2) menerima keadaan dirinya, (3) memiliki tanggung jawab dan pengabdian kepada sesuatu pekerjaan, (4) memiliki sifat yang wajar, tingkah laku sederhana dan spontan, (5) Mandiri: kebutuhan untuk berdiri sendiri dan memiliki kebebasan pribadi, (6) mengalami pengalaman puncak/spiritual yang hebat, (7) memiliki empati dan kasih sayang untuk umat manusia, termasuk minat terhadap lingkungan sosial yang besar, (8) mampu menolak mengikuti kebiasaan umum, (9) demokratis, dan (10) tekun dalam berkreasi.²⁴

Sedangkan kepribadian yang tidak sehat itu ditandai dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. Mudah marah-marah.
- b. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan.
- c. Sering merasa tertekan (stress dan depresi)
- d. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang atau hewan.
- e. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum.
- f. Mempunyai kebiasaan berbohong.
- g. Hiperaktif.
- h. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas.
- i. Senang mengkritik/ mencemooh orang lain.
- j. Sulit tidur.
- k. Kurang memiliki rasa tanggung jawab.
- l. Sering mengalami pusing kepala (meskipun penyebabnya bukan bersifat organik).
- m. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama.
- n. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan.

²⁴ Nigel C. Benson & Simon Grove, *Psikologi...*, hal. 111.

- o. Kurang bergairah dalam menghadapi kehidupan.

Kelainan tingkah laku di atas berkembang, apabila individu hidup dalam lingkungan yang kurang kondusif dalam perkembangannya. Misalnya lingkungan keluarga yang tidak berfungsi, seperti: hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, *broken home*, kurang memperhatikan nilai-nilai agama, sikap orang tua yang keras atau kurang memberi curahan kasih sayang pada anak.

Oleh karena kelainan kepribadian itu berkembang pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang baik, maka upaya pencegahan dapat dilakukan antara orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah bekerjasama untuk menciptakan iklim lingkungan yang memberi kemudahan kepada anak untuk mengembangkan potensi atau tugas-tugas perkembangan secara wajar atau optimal.

Pendidikan seharusnya membentuk kepribadian yang sehat bagi para peserta didiknya, sehingga mampu menghadapi perkembangan secara wajar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan kepribadian

Secara faktual, perkembangan dimulai sejak masa konsepsi, yaitu saat terjadinya masa pembuahan atau perkawinan (bertemunya sperma dengan sel telur) yang menghasilkan *zygote* yang kemudian berkembang menjadi *embryo* sebagai calon *prototype* manusia yang dikenal dengan *fetus* (bayi dalam kandungan). Pada umumnya *fetus* memerlukan waktu sekitar 9 bulan 10 hari.

Variasi individual memang dapat terjadi, ada yang lebih awal (*premature*) dari waktu tersebut, dan ada pula yang lambat (*late matur*), bergantung pada kondisinya. Mulai sejak lahir bayi berkembang menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa sampai masa tuanya yang memerlukan rentang kehidupan (*life Span*) sekitar 60-70 tahun, bergantung pada kondisi yang memungkinkannya.

Setidaknya terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan individu, ialah; **faktor pembawaan** (heredity) yang bersifat alamiah (*nature*), **faktor lingkungan** atau **environment** (seperti fisik, sosial, kebudayaan, spiritual) yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya perkembangan (*nurture*) dan **faktor waktu (time)** yaitu saat tibanya masa peka atau kematangan (*maturation*).

DASAR FILOSOFIS PENDIDIKAN

Filsafat telah ada sejak manusia itu ada. Filsafat dari kosa kata Yunani *Philos* (cinta) dan *sophia* (kebenaran), yang berarti "cinta akan kebenaran".²⁵ Sedang menurut istilah banyak makna tentang filsafat itu sesuai dengan sudut pandang mereka menafsirkannya. Harold Titus misalnya memberi definisi filsafat sebagai berikut:

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis.
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi.
3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan.
4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep.
5. Filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung mendapatkan perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat.²⁶

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat telah memiliki gambaran dan cita-cita, baik secara individu maupun masyarakat untuk mengejar dan mewujudkan cita-cita tersebut. Gambaran dan cita-cita masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Gambaran dan cita-cita itu yang melandasi tradisi, norma dan hukum dalam masyarakat. Demikian pula pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bangsa merupakan gambaran dan cita-cita dari suatu masyarakat dan bangsa yang bersangkutan. Hal inilah yang mendorong

²⁵ Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994, Hal. 7.

²⁶ *Ibid*, Hal. 9.

masyarakat untuk melaksanakan pendidikan tertentu untuk mewujudkan gambaran dan cita-cita masyarakat.

Filsafat pendidikan menurut Imam Barnadib sebagaimana diungkapkan kembali oleh Jalaluddin dan Usman Said adalah ilmu yang pada hakekatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan dan merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan-lapangan pendidikan.²⁷ Filsafat pendidikan itu sebagai dasar pendidikan akan menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni:

- Apakah pendidikan itu?
- Apa yang hendak dicapai oleh pendidikan?
- Bagaimana cara terbaik merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan itu?

Jawaban dari pertanyaan tersebut berbeda-beda tergantung aliran filsafat pendidikan yang dianut. Terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan yang dianut di dunia. Dalam pembahasan ini akan dibahas dasar filsafat pendidikan idealisme, realisme, pragmatisme, dan dasar filsafat pendidikan Pancasila.

A. Dasar Filosofis Pendidikan Idealisme

Hakekat Manusia, Pengetahuan dan Nilai Hakekat Manusia. Menurut para filsuf Idealisme bahwa **manusia hakikatnya** bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya (seperti: kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dsb). Manusia hidup dalam dunia dengan suatu aturan moral yang jelas, yang diturunkan dari Yang Absolut. Karena manusia merupakan bagian dari alam semesta yang bertujuan, maka manusia pun merupakan makhluk yang cerdas dan bertujuan. Selain itu, karena "pikiran manusia diberkahi kemampuan rasional,

²⁷ *Ibid*, Hal. 11.

maka ia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan, ia adalah makhluk yang bebas".²⁸

Berkenaan dengan ini setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat/Negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa/spiritnya, manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih/bebas, hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilaidan norma moral yang diturunkan oleh Tuhan, Tuhan adalah Spirit Yang Tidak Terbatas/Yang Absolut.

Pengetahuan. Proses mengetahui itu berada dalam pikiran. Para filsuf idealisme menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui proses berfikir. Dapat melalui intuisi, bahkan dapat melalui cara mengingat kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebenaran atau pengetahuan yang benar hanya mungkin didapat oleh orang-orang tertentu yang memiliki pikiran yang baik saja. sedang kebanyakan orang hanya sampai pada pendapat. Adapun uji kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji konsistensi atau koherensi dari ide-idennya.²⁹ Sesuatu yang koheren dengan sesuatu yang lain berarti ada kesesuaian (konsistensi) atau keharmonisan dengan suatu yang memiliki hirarkhi lebih tinggi. Contoh: Semua makhluk bersifat fana. Ajeng adalah makhluk, sebab itu Ajeng akan mati". Pengetahuan ini adalah benar, sebab ide-idennya koheren atau konsistensi. Noeng Muhadjir menyatakan bahwa koherensi itu ada pada dataran

²⁸ Tatang Syarifudin, *Landasan Pendidikan*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2012, hal. 68.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, Hal. 14.

sensual rasional, mungkin juga menjangkau dataran transendental.³⁰

Nilai. Para filsuf Idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. *Idealisme Theistik* nilai-nilai abadiberada pada Tuhan. *Idealisme Pantheistik* mengidentikkan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah (abadi), sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam. Sebab itu dapat Anda simpulkan bahwa manusia diperintah oleh nilai-nilaimoral imperatif dan abadi yang bersumber dari Realitas Yang Absolut.³¹

Implikasi terhadap Pendidikan

Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi (*self*) siswa.³² Oleh sebab itu, sekolah harus mengembangkan berbagai aktifitas untuk mengembangkan intelektual dan diri pribadi siswa, sehingga menjadi pribadi yang sempurna.

Kurikulum. Kurikulum pendidikan idealisme diorganisir menurut mata pelajaran dan berpusat pada mata pelajaran (subject matter). Karena bagi idealisme, kebenaran adalah ide-gagasan, maka kurikulum harus disusun di seputar materi-materi kajian yang mengantarkan siswa bergelut langsung dengan ide gagasan. Karena itu, kurikulum pendidikan idealisme menekankan kajian *humanities*.³³ Bagi banyak penganut idealisme, kajian tepat tentang 'kemanusiaan' adalah manusia.

Metode Pendidikan. Kata-kata, baik tertulis maupun yang terucap, merupakan metode pendidikan idealisme karena melalui kata-katalah ide-gagasan beralih dari saru akal pikiran menuju akar pikiran lainnya. Tujuan metode ini dapat

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tatang Saripudin, *Landasan...*, hal. 70.

³² *Ibid.*

³³ George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, terj. Mahmud Arif, Yogyakarta: Gama Media, 2007, Hal. 78.

dirumuskan sebagai penyerapan ide-gagasan. Oleh karena itu, perpustakaan menjadi pusat aktifitas pendidikan idealisme. Di perpustakaanlah para siswa bergumul dengan berbagai ide-gagasan umat manusia yang signifikan. Bahkan kelas, sebagai perpanjangan dan perluasan dari perpustakaan. Aktifitas guru di dalam kelas lebih pada *lecturing* (penyampaian materi) dalam konteks di mana pengetahuan ditransfer dari guru ke siswa.

Peran Guru. Dalam pendidikan idealisme, guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab guru-lah yang menjadi panutan bagi siswa untuk diikuti, baik dalam kehidupan intelektual maupun sosial. Di sini, peran guru adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjadi contoh keluhuran etis.

B. Dasar Filosofis Pendidikan Realisme

Hakekat Manusia, Pengetahuan, dan Nilai

Hakekat Manusia. Manusia adalah bagian dari alam, keberadaannya di alam merupakan puncak dari evolusi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Pikiran (jiwa) adalah suatu organisme yang sangat rumit yang mampu berpikir. Namun, sekalipun manusia mampu berpikir ia bisa bebas atau tidak bebas.³⁴ Manusia dan masyarakat bagian dari alam. Karena alam semesta memiliki hukum-hukum yang mengaturnya, maka agar manusia dan masyarakat dapat hidup survive, maka manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam, kemasyarakatan, dan kebudayaannya.

Hakekat Pengetahuan. Ketika lahir, jiwa atau fikiran manusia dalam keadaan kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan. Manusia memperoleh pengetahuan dari idera pengalaman. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berfikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang

³⁴ *Ibid.* Ha. 72.

tidak dipersepsi. Di sini pengetahuan bersifat obyektif atau faktual. Oleh karena itu kebenaran dapat uji melalui uji korespondensi.³⁵ Berfikir korespondensi adalah berfikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Korespondensi relevan dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan (positivisme).

Hakekat Nilai. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam, demikian pula masyarakat. Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya. Pendapat umum masyarakat merefleksikan status quo realitas masyarakat; dan karena realitas masyarakat merepresentasikan kebenaran yang adalah ke luar darimereka sendiri, serta melebihi pikiran, maka hal itu berguna sebagai suatu standar untuk menguji validitas nilai-nilai individual.³⁶

Implikasi terhadap Pendidikan

Tujuan pendidikan. Pendidikan Realisme adalah bertujuan agar siswa dapat "penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial".³⁷

Kurikulum. Kurikulum sebaiknya meliputi: (1) sains/IPA dan matematika, (2) Ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, serta (3) nilai-nilai.

Sains-sains (kealaman) dan matematika sangat dipentingkan. Sains dan matematika menjadi perhatian penting dalam belajar. Sebab, pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya.

Metode Pendidikan. Yang namanya belajar adalah pengalaman-pengalaman, baik pengalaman langsung maupun

³⁵ Noeng Muhadjir, *Filsafat...*, hal. 14.

³⁶ Tatang Syaripudin, *Landasan...*, Hal. 73.

³⁷ *Ibid*, hal. 73.

tidak langsung. Di sini, Pembiasaan menjadi metode utama, disamping pengkondisian dan latihan-latihan.

Peran Guru. Dalam Pendidikan realisme, guru berwenang membentuk prestasi siswa. Guru berperan dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, menentukan materi, menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan materi pelajaran, dan membuat materi pelajaran menjadi konkret sehingga mudah dialami siswa. Di sini, guru harus mengetahui banyak pengetahuan, menguasai berbagai ketrampilan teknik-teknik pembelajaran, dan berwenang membuat prestasi siswa. Berkaitan dengan kedisiplinan maka peran hadiah dan hukuman menjadi penting dalam pendidikan realisme.

C. Dasar Filosofis Pendidikan Pragmatisme

Hakekat Manusia, Pengetahuan, dan Nilai

Hakekat Manusia. Kepribadian/manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian dari padanya dan terus menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut.

Sejalan dengan perubahan yang terus menerus terjadi tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadidan masyarakatnya. Sebab itu, manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya.

Hakekat Pengetahuan. Filsuf Pragmatisme menolak dualisme antara subjek (manusia) yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan daridunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman, adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagaimana disarankan oleh John Dewey.

Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena mengalami perubahan, maka tentunya pengetahuan dan kebenaran tentu juga mengalami perubahan.

Pengetahuan mungkin hari ini dapat saja benar, tetapi mungkin saja saatnya nanti tidak benar.

Menurut filsuf pragmatisme, pengetahuan itu hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Pengetahuan dikatakan benar apabila dapat dipraktekan, dan memberikan hasil, dan memuaskan. Disini, pada akhirnya dapat dipahami bahwa pengetahuan itu bersifat relatif, dan pengetahuan itu bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu pragmatisme dikenal dengan pula sebagai instrumentalisme.

Hakekat Nilai. Nilai-nilai itu dilahirkan dari kondisi manusia, nilai tidaklah berdiri sendiri, tidaklah eksklusif, melainkan berada dalam proses atau tindakan manusia itu sendiri. Karena individu itu merupakan bagian dari masyarakat, maka baik atau tidaknya tindakanya dinilai berdasarkan tindakannya di dalam masyarakat. Jika perilakunya berakibat baik atau berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakannya tersebut adalah baik. Tetapi sebaliknya bila tindakannya merugikan atau tidak berguna bagi diri dan masyarakatnya maka tindakannya tersebut tidak baik. Di sini akhirnya dapat dipahami bahwa nilai itu bersifat relatif, benar itu relatif dan tergantung pada kondisi yang ada. Pertimbangan nilai adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan.

Implikasi terhadap Pendidikan

Tujuan Pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik.³⁸

Kurikulum. Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum tidak boleh dibagi ke dalam bidang materi pelajaran yang membatasi dan tidak alamiah. Kurikulum harus dibangun atas dasar unit-unit yang alamiah (wajar) yang tidak menimbulkan persoalan

³⁸ *Ibid*, Hal. 83.

dan pengalaman yang menekankan para siswa. Ini artinya, bahwa kurikulum sekolah tidak boleh terlepas dengan keadaan-keadaan masyarakat. Di sini dapat dikemukakan bahwa kurikulum sekolah kalangan pragmatis lebih memperhatikan proses daripada muatan materi.

Metode Pendidikan. Knight menyatakan bahwa metode pendidikan pragmatisme berorientasi pada pemberian kebebasan kepada siswa dalam mencari situasi-situasi pengalaman belajar yang akan menjadi hal yang paling berguna bagi mereka.³⁹ Di sini metode proyek atau problem solving menjadi unggulan dalam pendidikan pragmatisme.

Peran Guru. Dalam pandangan pragmatis, "tak seorang pun 'mengetahui' apa yang akan dibutuhkan para subjek didik karena kita hidup dalam sebuah dunia yang senantiasa berubah".⁴⁰ Oleh karena itu peran guru dalam aliran pragmatis adalah sebagai pendamping subyek didik dalam pengalaman pendidikan karena seluruh aktifitas kelas setiap harinya menghadapi dunia yang berubah. Namun, guru adalah pendamping yang lebih berpengalaman dan karenanya dipandang sebagai pemandu atau pengarah. Ia adalah orang yang menasehati dan memandu aktifitas-aktifitas peserta didiknya yang muncul di luar apa yang dibutuhkan oleh subjek didik, dan ia melaksanakan peran ini dalam konteks pertimbangan pengalamannya yang lebih luas.

D. Dasar filsafat Pendidikan Pancasila

Tidak dapat disangkal peranan Pancasila sebagai *Guiding principles* dalam proses pendidikan.⁴¹ Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusnya termaktub dalam "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa,

³⁹ George R. Knight, *Filsafat...*, Hal. 121.

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 120.

⁴¹ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesiatara, 2003, Hal. 120.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, maka implikasinya Pancasila juga menjadi dasar pendidikan nasional. Pancasila berisi gagasan-gagasan bernegara atau falsafah kenegaraan, karena itu Pancasila merupakan falsafah pendidikan nasional atau landasan idiil pendidikan nasional.

Sehubungan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki dasar filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila.

Hakekat Manusia, pengetahuan, dan Nilai

Hakekat Manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani-rokhani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali nafsu, akal dan hati nurani, serta memiliki tujuan hidup.

Paulus Wahana⁴² menggambarkan manusia Pancasila sebagai Berikut:

1. Manusia adalah makhluk monopluralis yang memungkinkan manusia itu dapat melaksanakan sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila.
2. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi yang dikaruniakan memiliki kesadaran dan kebebasan dalam menentukan pilihannya.
3. Dengan kebebasan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat menentukan sikapnya dalam hubungannya dengan Penciptanya.
4. Sila pertama menunjukkan bahwa manusia perlu menyadari akan kedudukannya sebagai ciptaan *Illahi* dan oleh sebab itu harus mampu menentukan sikapnya terhadap hubungannya dengan Penciptanya.

⁴² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, Hal. 192-193.

5. Manusia adalah otonom dan memiliki harkat dan martabat yang luhur.
6. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut akan kesadaran keluhuran harkat dan martabatnya yaitu dengan menghargai akan martabat sesama manusia.
7. Sila persatuan Indonesia berarti manusia Indonesia adalah makhluk sosial yang berada di dunia Indonesia bersama-sama dengan manusia Indonesia lainnya.
8. Selanjutnya manusia Indonesia haruslah dapat hidup bersama, menghargai satu dengan yang lain dan tetap membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.
9. Manusia adalah makhluk yang dinamis yang melakukan kegiatannya bersama-sama dengan manusia Indonesia yang lain.
10. Sila keempat atau sila demokrasi dituntut manusia Indonesia yang saling menghargai, memiliki kebutuhan bersama di dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupannya.
11. Dalam sila kelima, manusia Indonesia dituntut saling memiliki kewajiban menghargai orang lain dalam memanfaatkan sarana yang diperlukan bagi peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik.

Dari gambaran tersebut, jelas bahwa gambaran manusia Pancasila yaitu manusia yang bebas dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dirinya dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Tilaar⁴³ memberikan gambaran tentang manusia Pancasila sebagai berikut:

1. Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sumber etika dan moral. Manusia Indonesia yang bermoral adalah

⁴³ *Ibid*, Hal. 199-201.

manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya.

2. Di dalam sila Perikemanusiaan mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Seorang manusia Indonesia hanyalah mempunyai arti di dalam kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan.
3. Dalam sila Keadilan Sosial, yang penting di sini ialah penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan sosial.
4. Dalam sila Kerakyatan mengandung nilai-nilai demokrasi dan pandangan populis. Kehidupan bersama masyarakat Indonesia berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepada kepentingan penguasa atau kepada golongan masyarakat yang *better off*.
5. Dalam sila Persatuan Indonesia, merupakan alat bukan tujuan di dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang memaksa menghilangkan kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan sila persatuan Indonesia.

Itulah profil manusia Indonesia yaitu manusia Pancasila yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai proses humanisasi manusia Indonesia.

Hakekat pengetahuan. Segala pengetahuan pada hakekatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menyampaikan pengetahuan melalui utusan-Nya maupun melalui berbagai hal yang di gelar di alam serta hukum-hukumnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan itu bisa melalui pemikiran, pengalaman empirik, intuisi, maupun keyakinan.

Kebenaran pengetahuan itu ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif. Pengetahuan yang bersifat mutlak (ajaran agama/wahyu Tuhan) diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang bersifat relatif diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idennya, kesesuaiannya dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaannya bagi kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai yang bersifat mutlak.

Hakekat Nilai. Nilai pada hakekatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, maka hakekatnya nilai diturunkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai individu dan masyarakat.

Implikasi terhadap Pendidikan

Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan tersebut harus kita sadari bahwa pendidikan itu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mampu menghadapi berbagai perkembangan zaman.

Kurikulum Pendidikan. Kurikulum pendidikan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a). peningkatan

iman dan takwa; (b.) peningkatan akhlak mulia; (c). peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d). keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e). tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f). tuntutan dunia kerja; (g). perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h). agama; (i). dinamika perkembangan global; dan (j). persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2003).

Metode Pendidikan. Metode pendidikan yang diterapkan dalam pembelajaran memungkinkan anak peserta didik berkembang ke arah kemandirian atau proses humanisasi manusia Indonesia. Oleh karena itu berbagai metode yang mendorong peserta didik aktif sangat diperlukan. Meskipun demikian dalam penerapan metode harus memperhatikan berbagai hal, terutama kondisi peserta didik. Karena terdapat asumsi bahwa tidak ada satu metode yang cocok untuk semua peserta didik.

Peran Pendidik. Peran pendidik sesungguhnya tersirat dalam prinsip kepemimpinan, yaitu "ing ngarso asung tulodho". Artinya pendidik harus dapat memberi contoh teladan bagi peserta didiknya, "ing madyo mbangun karso" Artinya pendidik harus mampu memberi karsa kepada peserta didik, dan "tut wuri handayani" . Artinya sepanjang tidak membahayakan pendidik harus memberi kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri ke arah kemandirian.

DASAR SOSIOLOGIS PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Dasar-dasar sosiologis sebagai masalah pendidikan merupakan bidang studi sosiologi pendidikan.⁴⁴ Nama lain untuk cabang pengetahuan ini adalah hubungan sekolah dan masyarakat,⁴⁵ yang melandaskan diri pada asumsi pemikiran bahwa peranan sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang cepat berubah, begitu sebaliknya. Dasar pemikiran ini akan dilihat tentang hubungan pendidikan dengan masyarakat, dan sumber-sumber sosial dari problem pendidikan saat ini.

B. Hubungan Pendidikan dan Masyarakat

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan perkembangan masyarakat. Teori-teori itu antara lain teori modernisasi, sumber daya manusia, dan struktural fungsionalisme.

Teori modernisasi menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat itu berkembang dari tradisional menjadi modern.⁴⁶ Oleh karena itu tiap-tiap anggota warga masyarakat diharapkan memahami dan bertindak laku dengan budaya modern. Alex Inkeles dan David H. Smith menyatakan bahwa suatu masyarakat menjadi modern bila warga-warganya telah

⁴⁴ Tim Dosen FIP- IKIK Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988, hal. 70.

⁴⁵ Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 73.

⁴⁶ Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku Dua Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta; Andi Offset, 1987, hal. 32.

menerima sikap, nilai dan kepercayaan yang digolongkan modern. sejumlah sifat yang diperlukan menurut kedua tokoh tersebut antara lain:⁴⁷

1. sikap terbuka terhadap pengalaman baru.
2. kesiapan terhadap adanya perubahan sosial.
3. kesadaran akan adanya keaneka-ragaman sikap dan tingkah laku serta pendapat-pendapat orang disekelilingnya, dan suatu peraturan untuk membentuk atau berpegangan pada pandangan sendiri.,
4. sikap yang bergerak mencari fakta dan informasi untuk dijadikan dasar pandangan sendiri.
5. berorientasi pada masa yang akan datang daripada masa lalu.

Oleh Karena itu sekolah sebagai lembaga sosial, sudah barang tentu banyak harapan ditumpukan kepadanya untuk menanamkan sifat-sifat tersebut. Untuk itu Lerner menyarankan adanya empati psikologik.⁴⁸ Yaitu suatu kemampuan seseorang dapat menyesuaikan secara efektif terhadap lingkungan yang selalu berubah. Meskipun demikian, sekolah bukan merupakan satu-satunya institusi yang berperan terhadap sikap dan perilaku modern bagi individu mempunyai subjek didik. Media massa dan keluarga juga berperan pula. Ini maknanya bahwa masalah modernisasi adalah suatu hal yang kompleks.

Berkaitan apa yang disebut tradisional dan apa yang disebut modern, Yoseph R. Gusfield menyarankan agar tidak dikembangkan pola pikir dikotomis antara apa yang disebut tradisional dengan apa yang disebut modern. Sebab unsur-unsur tradisional itu sebagian dapat membantu perkembangan modernisasi.⁴⁹

Sebagai contoh adalah Jepang. Imam Barnadib menggambarkan sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*, hal. 49.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 51.

*"Kehidupan keluarga di negeri ini umumnya masih tradisional, misalnya dalam tatacara anggota keluarga dalam saling menghormati dan menghargai satu sama lain. secara tidak langsung kesemuanya ini diterapkan dalam lingkungan kerja dan dunia usaha. Dalam lingkungan kerja orang lebih tua dihargai sedemikian kalau perlu yang muda-muda bersedia menerima gaji lebih sedikit. Ternyata negara Jepang kini menjadi salah satu negara termodern dan maju."*⁵⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik dari contoh tersebut, ialah suatu masyarakat dapat menerima sejumlah norma dan nilai modern, namun masih pula mempertahankan sejumlah nilai tradisional. Masyarakat tersebut tetap dapat bergerak untuk menjadi maju.

Teori Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa masyarakat akan berkembang maju bila warga masyarakatnya dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya.⁵¹ Tarap pengembangannya, yang dilakukan lewat pendidikan ini, diharapkan dapat mencapai taraf yang setinggi-tingginya. Teori ini juga sering disebut teori invesatasi manusiawi. Secara ekonomi, teori ini menjelaskan bahwa antara pendidikan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi sangat erat. Ravik Karsidi menjelaskan dengan mengutip pendapat Clark (1994), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat penghasilannya, demikian sebaliknya. Lebih lanjut beberapa hal yang ia jelaskan;

- Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula penghasilannya (tamatan sekolah dasar maksimal antara empat dan lima ribu dolar setahun; tingkat sekolah menengah atas maksimal antara lima dan enam ribu dolar setahun; dan tingkat perguruan tinggi maksimal antara delapan dan sembilan ribu dolar setahun).

⁵⁰ *Ibid*, hal. 51-52.

⁵¹ *Ibid*, hal. 33.

- Tamatan sekolah dasar (atau sekolah menengah pertama) akan mendapat penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun; tamatan sekolah menengah atas akan mendapat penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun; dan tamatan perguruan tinggi akan mendapat hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun.
- Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada usia tua mendapat hasil yang seimbang dengan hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan perguruan tinggi pada usia tua mendapat hasil yang lebih besar ketika mulai bekerja.⁵²

Memang dalam kenyataannya, tidaklah selalu demikian karena tidak sedikit yang telah mengenyam pendidikan tinggi taraf kehidupan ekonominya tidak seperti yang digambarkan di atas.

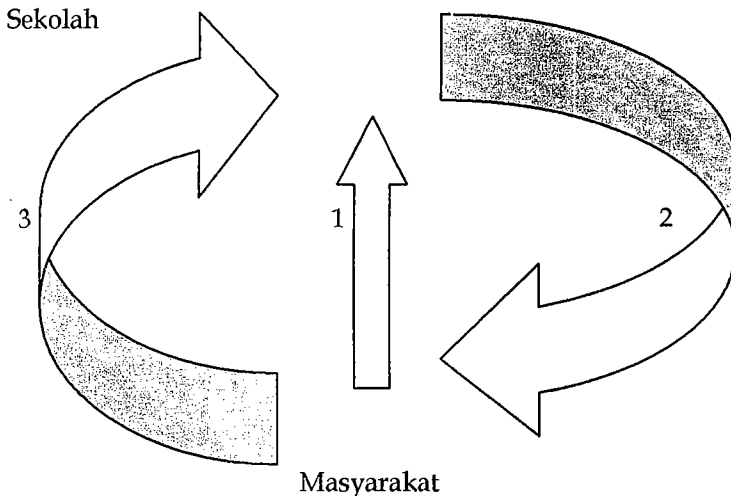
Teori Struktural Fungsionalisme menyatakan bahwa masyarakat itu dipandang sebagai sistem yang bagian-bagiannya saling mempunyai ketergantungan dan keseimbangan.

Refleksi teori ini terhadap pendidikan adalah isyarat bahwa diperlukan fondamen yang dapat membawa masyarakat secara keseluruhan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu sejak lama telah dipandang tepat dengan wahana wajib belajar. Tingkat wajib belajar diharapkan menggambarkan akses yang luas dalam masyarakat. Dari sisi intelektual, memang rang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi tingkat penguasaan ilmunya sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat.⁵³

Secara sederhana hubungan antara pendidikan dan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵² Muhammad Rifa'i, *Sosiologi...*, hal. 175-176.

⁵³ Muhammad Rifa'i, *Sosiologi...*, hal. 179.



Gambar. 1. Hubungan Masyarakat dengan Pendidikan.

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan itu berasal dari masyarakat.
2. Bahwa pendidikan itu mempengaruhi masyarakat.
3. Bahwa masyarakat mempengaruhi pendidikan.

Jadi, pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan masyarakat.

C. Sumber-sumber sosial dari problem Pendidikan saat ini

1. Kekerasan

Berbagai kekerasan dalam terjadi dalam masyarakat dapat kita saksikan dalam pemberitaan berbagai media. Kekerasan juga dilakukan oleh pelajar dan bahkan mahasiswa. Kekerasan pelajar dan mahasiswa telah memakan korban jiwa.

Seperti diberitakan oleh harian Tribun Yogyakarta tanggal 23 September 2012, telah terjadi perkelaian pelajar di SMPN 2 Rembang, Purbalingga. Di mana Muhammad Andrian,

siswa kelas 8 C tewas ditangan temannya berinisial N temannya sendiri, ketika berkelahi di sekolah sebelum bel masuk pada hari Sabtu, 22 September 2012. Perkelahian terjadi karna hanya saling mengejek pada hari sebelumnya.

Perkelahian pelajar juga terjadi lagi pada hari Senin tanggal 24 September yang melibatkan antara pelajar SMA 70 dan SMA 6 Jakarta yang mengakibatkan salah seorang siswa SMA 6 bernama Alawy meninggal dunia setelah terkena sabitan clurit. (Tribun, 25 September 2012, hal. 1).

Hal tersebut menjadi keprihatinan kita bersama. Memang sebabnya sangat kompleks, namun demikian hal tersebut telah mencoreng wajah pendidikan kita. Tentu solusi terbaik perlu dilakukan dan secara berkesinambungan.

2. Putus Sekolah

Masalah putus sekolah atau yang sering juga disebut *Drop Out* (DO), khususnya pada jenang pendidikan dasar, kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat merupakan beban masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu masyarakat. Oleh karena itu penanganannya menjadi tugas kita semua. Untuk dapat membantu penanganan masalah putus sekolah, sudah barang tentu perlu memahami berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Berbagai faktor yang diduga menyebabkan terjadinya putus sekolah, menurut Muhamma Rifa'i, antara lain; (1) persoalan ekonomi, (2) anak memiliki persoalan di sekolah, memiliki musuh, berbuat melanggar moral, (3) anak melakukan tindakan kriminal, (4) Jarak sekolah yang jauh, (5) karena bencana alam, (6) karena terjadi KDRT.⁵⁴

Jadi, masalah pengangguran adalah sangat komplek, yang terjadi karena berbagai faktor, dari masalah kepribadian anak itu sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun persoalan akses pendidikan karena jauh jaraknya. Oleh karena itu, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai unsur sehingga tercipta suasana

⁵⁴ Muhammad Rifa'i, Sosiologi..., hal. 204-208.

suasana bagi anak tidak memiliki keputusan untuk putus sekolah.

3. Pengangguran

Data berdasarkan Kemerakertrans RI, pengangguran di Indonesia masih tinggi. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 170,65 juta jiwa hingga 2011, angka kerjanya mencapai 119,4 juta jiwa. Yang sudah bekerja terhitung 111,3 juta jiwa, sedangkan pengangguran mencapai 8,12 juta jiwa. (Tribun Yogya, 21/9/2012, hal.2).

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengangguran masyarakat kita masih tinggi, dan perlu diwaspadai adanya pengangguran kalangan terdidik atau pengangguran intelektual. Oleh karena itu, hendaknya pendidikan dalam hal ini sekolah berperan melahirkan tuntutan kerja produktif.

4. Kenakalan Remaja

Masalah kenakalan anak sering menimbulkan kecemasan sosial karena eksesnya dapat menimbulkan kemungkinan *gap generation* sebab anak-anak yang diharapkan sebagai kader penerus serta calon-calon pemimpin bangsa banyak tergelincir dalam lumpur kehinaan, seperti kuncup bunga yang berguguran sebelum mekar menyebarkan wangi.⁵⁵

Berbagai kejadian tawuran antar pelajar telah menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Banyaknya korban akibat tawuran tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan remaja belum memiliki format yang maksimal.

Menurut Jamaluddin Ancok, bahwa perilaku remaja bersifat patalogis akibat dari; (1) keterasingan (alienasi) dari kehidupan yang wajar, (2) keterasingan akibat dari menetasnya budaya petunjuk, pengarahan, dan restu yang terjadi dalam kehidupan birokrasi ke dalam kehidupan rumah tangga, dan (3) situasi lain yang membuat frustrasi, seperti susahny mencari sekolah, mencari kerja, dan kejengkelan melihat

⁵⁵ Muhammad Rifa'i, *Sosiologi....*, hal. 216.

ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan generasi yang lebih tua.⁵⁶

5. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari kata Latin *C orruptus* yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur.⁵⁷ Dalam bahasa Inggris, kata “korupsi” dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti prasa *a corrup manuscript* (naskah yang rusak karena kurang teliti dalam menyalin)⁵⁸ dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkah laku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu “korupsi” berarti tidak bersih (*impure*) seperti frasa *corrup air* yang berarti *impure air* (udara tidak bersih).⁵⁹ Dalam bahasa Belanda kata “korupsi” berasal dari kata *korruptie* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan (*risywah*, bahasa Arab), penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan dari kesucian.⁶⁰

Dalam kajian-kajian tentang korupsi ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai terminologi korupsi. Menurut Transfaransi International sebagaimana dikutip Mohammad Amin Rais, korupsi adalah “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan

⁵⁶Jamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, hal. 45-46.

⁵⁷Syamsul Anwar. “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Hadits” dalam *Jurnal Hermania*. Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2005, hal. 107.

⁵⁸John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992. Hal. 149.

⁵⁹Syamsul Anwar. *Sejarah...*, Hal. 108.

⁶⁰Pramoni U. Tanthowi, dkk, (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005. Hal. 229.

kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka”⁶¹ Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”.⁶² Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang dimaksud dengan korupsi ialah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.⁶³ Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama, mendefinisikan korupsi adalah sebuah bentuk *tasharruf* yang merupakan pengkhianatan atas amanah yang diamanahkan dan dapat merugikan publik secara finansial, moral maupun sosial.⁶⁴ Dari berbagai definisi tersebut, maka unsur pokok korupsi adalah (1) perbuatan menyimpang dari norma, baik agama, masyarakat, hukum, (2) perbuatan itu menimbulkan kerugian negara atau masyarakat, (3) adanya penyalahgunaan wewenang.

Korupsi menurut Alatas sebagaimana diungkapkan kembali oleh Syamsul Anwar ditandai dengan ciri-ciri berupa (1) adanya pengkhianatan kepercayaan, (2) keserbarahasiaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi dengan bentuk-

⁶¹ Mohammad Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK, 2008. hal. 177

⁶² Syamsul Anwar, *Sejarah...* Hal. 108.

⁶³ Syamsul Anwar, dkk, *Fiqh Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban) kerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PPNU, kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, 2006), hal. 55.

⁶⁴ Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *Nu Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim NPK, PBNU, 2006), hal. 107.

bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi pada mereka yang dapat mempengaruhinya.⁶⁵

Berdasarkan Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.⁶⁶ Dari sekian banyaknya korupsi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian,⁶⁷ antara lain:

1. Kerugian keuangan negara

Perbuatan yang merugikan keuangan negara, dijelaskan pada pasal 2 sebagaimana yang diuraikan di atas. Makna yang terkandung dalam istilah “kerugian negara” ialah segala sesuatu yang merugikan kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara.⁶⁸ Mengenai pelaku, dijelaskan bahwa koruptor bukan hanya berbentuk sekelompok orang, tetapi dapat berlaku bagi anggota keluarga, rekan-rekan atau kerabat lainnya yang terlibat dalam korupsi.⁶⁹

2. Suap menyuap

Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya pegawai mereka dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Bentuk korupsi ini disebabkan adanya unsur memberi dan menerima dari berbagai pegawai negeri karena

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Sejarah...*, hal. 109.

⁶⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Memahami, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 20

⁶⁷ *Ibid*, hal. 21.

⁶⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 72.

⁶⁹ Jeremy pope, *Strategi Memberantas korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia kerja sama dengan Transparency International Indonesia, 2003, hal. 3.

jawabannya yang bertentangan dengan tugasnya, seperti memberi hadiah, menyuap hakim, menyuap advokat, dan sebagainya.⁷⁰

3. Penggelapan dalam jabatan

Contoh dari bentuk korupsi ini antara lain: pegawai negeri atau lainnya yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, membantu dan merusakkan bukti.⁷¹

4. Pemerasan

Pemerasan yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.⁷² Contoh dari tindakan pemerasan ini ialah membuat kesamaran atau melakukan pemaksaan seolah-olah orang lain berhutang kepadanya, tetapi sebenarnya hal tersebut bukan merupakan hutang.⁷³

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang adalah perbuatan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pelaku dalam hal ini adalah pemborong, penjual barang bangunan, pengawas proyek maupun rekanan TNI/POLRI yang membiarkan perbuatan curang serta pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.⁷⁴ Kontek pengertian tersebut, bukan kondisi perang saja, tetapi berlaku pada setiap saat.

6. Benturan pengadaan dalam kepentingan

Yang termasuk korupsi dalam katagore ini ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Tindak korupsi ini

⁷⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami...*, hal. 30 -55.

⁷¹ *Ibid*, hal. 56-65.

⁷² *Ibid*, 68-73.

⁷³ *Ibid*, hal, 73.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 76-83.

berlangsung pada saat seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.⁷⁵

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam (tindak pidana) suap,⁷⁶ dan berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁷⁷

Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. (Kompas. Com). Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).

Dalam bidang pendidikan, aktivis ICW, Febri Hendri melaporkan bahwa selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp. 243,3 miliar. Kebocoran dana yang paling besar terjadi dalam pengadaan gedung dan sarana prasarana sekolah.⁷⁸

Hal tersebut tentu menjadi keprihatinan bersama, Ini jelas telah mencoreng wajah pendidikan nasional kita, kepercayaan terhadap pemimpin nasional kita menjadi berkurang dari segi moralnya. Penuntasan kasus-kasus korupsi, terutama dalam bidang pendidikan tentu diharapkan serius dalam penanganannya.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 91.

⁷⁶ Arya Maheka, *Menggali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, Kemitran Partnership dan Delind, hal. 21.

⁷⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami..*, hal. 95.

⁷⁸ Mohammad Rifa'i, *Sosilogi....*, Hal. 226.

6. Kemiskinan.

Dari sumber BPS, disebutkan bahwa pengertian kemiskinan yang dipakai oleh pemerintah adalah sebagai berikut: pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GMNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan, GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.⁷⁹

Menurut data BPS tahun 2012, disebutkan jumlah penduduk miskin sebanyak 29, 13 Juta atau 11,96 %. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk kita hidup dalam kemiskinan, oleh karenanya, pendidikan diharapkan ikut berperan serta memecahkan masalah tersebut.

7. Persoalan Keluarga/Disorganisasi Keluarga.

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Ada beberapa bentuk disorganisasi keluarga, yaitu ; unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan, disorganisasi karena putusnya perkawinan,

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 233.

adanya kekurangan dalam keluarga tersebut (misalnya komunikasi), dan krisis keluarga.

Disorganisasi keluarga bisa terjadi pada masyarakat miskin, dan bisa saja terjadi pada masyarakat modern. Pada masyarakat miskin, disorganisasi keluarga terjadi karena adanya kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Sedang pada masyarakat modern disorganisasi dapat saja terjadi karena konflik peran sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial-ekonomi, dan lainnya.

Adanya banyak permasalahan keluarga yang saat ini menunjukkan bagaimana lemahnya ikatan batin maupun sosial dalam keluarga yang dahulu sangat diagung-agungkan. Oleh karena itu, upaya menciptakan "ketahanan keluarga" sangat diperlukan, pendidikan dapat ikut ambil peran dalam hal tersebut.

DASAR PSIKOLOGIS PENDIDIKAN

Keberhasilan guru dalam pembelajaran, salah satunya adalah kemampuan guru dalam memahami perkembangan peserta didiknya. Oleh karena itu pembahasan berikut ini akan difokuskan tentang konsep dasar perkembangan anak, perkembangan penting masa anak usia sekolah dasar, dan teori-teori belajar serta isu-isu terkini tentang anak.

A. Konsep Dasar Perkembangan Anak

1. Hakikat Perkembangan

Dalam memahami konsep perkembangan, terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya, diantaranya; pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan perubahan.

Pertumbuhan (growth)

Pertumbuhan merupakan istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni.⁸⁰ Di sini jelas bahwa pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis yang merupakan hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat, dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk yang dapat diukur dengan alat tera yang nyata. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, misalnya

⁸⁰Siti Rahayu Haditono, . Psikologi Perkembangan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hal.2

berat, panjang dan kekuatannya, serta menyangkut dalam berbagai organ tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, antara lain:⁸¹

Pertama, faktor yang terjadi sewaktu anak masih dalam kandungan. Faktor ini misalnya: kondisi fisik ibu, makanan ibu, obat-obatan, dan lainnya.

Kedua, faktor ketika proses kelahiran bayi. Faktor ini misalnya pendarahan pada kepala bayi (intracranial haemorage) yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia lahir, karena proses kelahiran bayi yang dilakukan dengan bantuan tang (tangverlassing).

Ketiga, Faktor yang dialami bayi setelah lahir antara lain: pengalaman selama proses pertumbuhan atau pengaruh lingkungan (pendidikan orang tua, pergaulan, makanan, obat-obatan, kesehatan dan lain-lainnya)

Keempat, Faktor psikologis antara lain oleh karena bayi ditinggalkan ibu, ayah atau kedua orang tuanya, pemenuhan kebutuhan rasa kasih sayang dan lain sebagainya.

Perkembangan (development)

Perkembangan menurut Syamsu Yusuf diartikan sebagai "Perubahan yang progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati".⁸² Sedangkan menurut Muhibbin Syah, perkembangan (development) adalah suatu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmaniah, hubungan organ-organ jasmaniah itu sendiri.⁸³ Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkembangan itu merupakan perubahan struktur ke arah kemajuan dengan melalui proses kematangan. Sehingga di sini

⁸¹Saring Marsudi dkk., Layanan bimbingan Konseling di Sekolah, Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah, 2005, hal. 2

⁸² Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. hal 15.

⁸³ Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 42

perkembangan lebih mengarah pada perkembangan psikologis, yang oleh Mönk dinyatakan bahwa perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis.⁸⁴ Yang secara umum perkembangan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁵

Pertama, terjadinya perubahan dalam psikis yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berfikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya.

Kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek psikis yaitu perubahan imajinasi dari yang fantasi ke yang realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri secara perlahan-lahan beralih kepada orang lain atau kelompok teman sebaya.

Ketiga, lenyapnya tanda-tanda psikis yang lama, yaitu lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku implusif.

Keempat, diperolehnya tanda-tanda psikis baru, seperti berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama.

Kematangan (maturation)

J.P. Chaplin mengartikan kematangan (maturation) sebagai; 1. perkembangan; proses mencapai kemasakan/usia masak, 2. Proses perkembangan, yang dianggap berasal dari keturunan, atau merupakan tingkah laku khusus spesies (jenis, rumpun).⁸⁶

Sedangkan menurut Davidoff, menggunakan istilah kematangan untuk menunjukkan pada munculnya pola

⁸⁴ Siti Rahayu Haditono, Psikologi ..., hal. 2

⁸⁵ Syamsu Yusuf, Psikologi .., hal. 16

⁸⁶ J.P. Chaplin. Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali, 2009, hal. 291.

perilaku tertentu yang tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan saraf.⁸⁷

Jadi, kematangan merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk dan masa tertentu. Sifat ini bukan merupakan faktor keturunan atau bawaan, akan tetapi merupakan suatu potensi yang dibawa sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaanya serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu.

Perubahan (change)

Perkembangan mengandung perubahan, akan tetapi tidak berarti setiap perubahan bermakna perkembangan. Perubahan itu tidaklah sama waktunya bagi setiap individu. Perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan adalah untuk penyesuaian diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Realisasi penyesuaian diri bertujuan untuk aktualisasi diri, yang merupakan motivasi memenuhi kebutuhan manusia yang tertinggi.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan dapat berupa perubahan dalam ukuran besarnya, dalam proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru.⁸⁸

A. Periodisasi Perkembangan

Periodisasi perkembangan dapat digolongkan menjadi tiga (3) macam, yakni; berdasarkan biologis, didaktis, dan psikologis.

Periodisasi berdasarkan biologis

Periodisasi berdasarkan biologis adalah periodisasi yang pembahasannya berdasarkan pada kondisi atau proses

⁸⁷ Desmita, Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2008, hal. 7.

⁸⁸ Ibid. hal. 8-9.

pertumbuhan biologis anak, karena pertumbuhan biologis ikut berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan seorang anak.

Beberapa ahli yang termasuk dalam kelompok ini:

1. Aristoteles, membagi perkembangan individu, sejak lahir sampai dewasa itu ke dalam tiga tahapan. Setiap tahapan lamanya tujuh (7) tahun, yaitu:

Periode	Perkiraan Usia
Anak kecil (Kleteur)	Usia 0,0 sampai 7 tahun.
Anak sekolah	Usia 7 sampai 14 tahun
Pubertas	Usia 14 sampai 21 tahun

Peralihan tahap I dengan tahap II ditandai dengan pergantian gigi.

Peralihan Tahap II kedua dengan tahap III ditandai dengan berfungsinya organ seksual.

2. Hurlock mengemukakan pentahapan perkembangan individu, yakni sebagai berikut:

Periode	Perkiraan Usia
Periode Pranatal	konsepsi sampai lahir (280 hari)
Periode Infancy (orok)	Lahir sampai 10 atau 14 hari
Periode Babyhood (bayi)	Mulai dari 2 minggu sampai 2 tahun
Periode Childhood (kanak-kanak)	Mulai 2 tahun sampai remaja/puber
Adolesence/puberty	Mulai dari 11 atau 13 sampai 21

tahun.

Pre adolescence (11/13 tahun).

Early adolescence (16/17 tahun).

Late adolescence, masa perkembangan yang terakhir sampai masa kuliah di Perguruan Tinggi

3. Sigmund Freud mengemukakan sejak lahir sampai remaja individu melewati lima tahapan, yaitu:

Tahap	Perkiraan Usia
Tahap Oral	Lahir sampai 1 tahun
Tahap Anal	1 sampai 3 tahun
Tahap Phalik	3 sampai 5 tahun
Tahap Laten	5 sampai awal pubertas
Tahap Genital	Masa remaja

4. Kretscmer mengemukakan bahwa dari lahir sampai dewasa individu melewati empat tahapan, yakni:

Tahap	Perkiraan Usia	Gambaran
Periode 1 (fullungs/ pengisian),	usia 0,0 sampai 3 tahun	anak kelihatan pendek gemuk.
Periode 2 (Streckungs/ rentangan),	usia 3 sampai 7 tahun	anak kelihatan Langsing.
Periode 3 (fullungs 2),	usia 7 sampai 13 tahun,	anak kelihatan pendek gemuk

Peiode 4
(Streckungs 2)

usia 13 sampai
20 tahun

kembali.
anak kelihatan
langsing kembali

Periodesasi berdasarkan Didaktis

Pembagian berdasarkan didaktis digunakan sebagai: 1) apa yang tepat untuk diberikan pada anak, 2) bagaimana cara untuk menyediakan pengalaman belajar bagi anak.

Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain:

1. Johan Amos Comenius (1592-1671) sejak lahir sampai sekolah tinggi individu melawati empat tahapan, yaitu:

Tahap	Perkiraan Usia
Masa Sekolah Ibu	Sampai usia 6 tahun
Masa sekolah bahasa ibu	6 Sampai 12 tahun
Masa sekolah bahasa latin	12 sampai 18 tahun
Masa sekolah tinggi	18 sampai 24 tahun

2. J.J. Rosseau mengemukakan tahapan pendidikan yang dilalui oleh individu sebagai berikut:

Tahap	Perkiraan Usia
Masa asuhan	Lahir sampai 2 tahun
Masa pendidikan jasmani dan latihan panca indra	2 sampai 12 tahun
Pendidikan akal	12 sampai 15 tahun

Pendidikan watak
dan pendidikan
agama

15 sampai 20 tahun

3. Kohnstamm mengemukakan sejak lahir sampai dewasa individu melawati lima (5) tahapan, yakni:

Tahap	Perkiraan Usia
Masa vital (penyusu)	Lahir sampai 1,5 tahun
Masa anak kecil (estetis)	1,5 sampai 7 tahun
Masa anak sekolah (intelektual)	7 sampai 14 tahun
Masa remaja	14 sampai 21 tahun
Masa dewasa	21 tahun ke atas

4. Langeveld mengemukakan sejak lahir sampai dewasa individu mengalami lima tahapan sebagai berikut:

Tahap	Perkiraan Usia
Masa bayi	Lahir sampai 2 tahun
Masa kanak-kanak	2 sampai 6 tahun
Masa anak sekolah	6 sampai 12 tahun
Masa remaja	12 sampai 19/21 tahun
Masa dewasa	21 tahun ke atas

5. Jean Piaget mengemukakan sejak lahir sampai remaja individu mengalami empat tahap perkembangan sebagai berikut:

Tahap	Rentang Usia	Ciri-ciri
Sensorimotor	Lahir sampai 2 tahun	Aktivitas kognitif anak didasarkan pada pengalaman langsung panca indera. Aktivitas bahasa menggunakan bahasa. Pemahaman intelektual muncul pada akhir masa.
Praoperasional	2 sampai 7 tahun	Tidak terlibat sensori. Kemampuan menyimpulkan tanggapan bertambah. Anak mampu meniru orang lain. Mampu menerima khayalan dan suka cerita hal-hal yang fantastis.
Operasional konkret	7 sampai 11 tahun	Anak mulai berfikir logis. Bentuk aktivitas dapat ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Anak masih berfikir harus sesuai dengan tugas yang diberikan.
Operasional formal	11 tahun ke atas	Mampu mengembangkan pola-pola berfikir formal. Mampu berfikir logis, rasional, dan abstrak. Memahami simbol, kiasa, dsb.

Periodisasi berdasarkan Psikologis

Pada pembagian ini para ahli membahas gejala perkembangan jiwa anak, berorientasi dari sudut pandang psikologis, mereka tidak lagi mendasarkan pada sudut pandang biologis ataupun didaktis. Sehingga para ahli mengembalikan masalah kejiwaan dalam kedudukan yang murni.

Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain:

1. Oswald Kroh mengemukakan sejak anak usia tiga tahun sampai akhir masa remaja individu mengalami tiga tahapan, yakni:

Tahapan masa	Perkiraan Usia
Trotz Periode Pertama (masa menentang)	3 sampai 5 tahun
Trotz Periode Kedua (masa keserasian)	12 sampai 14 tahun
Trotz Periode Ketiga (masa kematangan)	Akhir masa remaja

Gambaran masa Krisis I atau Trotz Pertama, raja kecil, egosentrisme. Perubahan perilaku: 1) dulu penurut, sekarang tidak, 2) sukar makan, 3) tidak mau tidur, 4) tidak mau mandi seperti biasanya. Tujuan perubahan ini adalah keinginan memperoleh kebebasan.

2. Ch. Buhler mengemukakan sejak lahir sampai masa remaja individu melewati lima tahap perkembangan sebagai berikut:

Tahap	Perkiraan Usia	Gambaran
Masa pertama	Usia sampai 1 tahun	Anak mengenal dunia luar melalui gerakannya Belajar berjalan dan berbicara
Masa kedua	2 sampai 4 tahun	Dunia luar makin dikuasai lewat bermain Kemajuan bahasa, pertumbuhan kemandirian Dunia luar dinilai menurut sifat dan batinnya Semua binatang dan benda mati disamakan dengan dirinya Usia 3 th mengalami krisis 1
Masa ketiga	5 sampai 8 tahun	Kegiatan bermain berubah menjadi semangat bekerja Rasa tanggung jawab tinggi Rasa sosialnya tinggi Memandang sekeliling dengan objektif
Masa keempat	9 sampai 13 tahun	Keinginan maju sangat besar Pertumbuhan fisik pesat (10-12 th) Jiwanya tenang Mengalami masa krisis 2 (12-13 th dan 13-14 th) Mulai kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemandirian, penuh pertimbangan, mengutamakan tenaga sendiri, Diwarnai pertentangan dengan lingkungan

Masa kelima 14 sampai 19
 tahun

Pada awal pubertas lebih bersifat subjektif, selalu gelisah, sturm und drang .

Kesadaran diri meningkat
Pada akhir pubertas (17 th) terjadi keserasian antara diri dan lingkungan, membentuk pribadi, menerima norma budaya dan kehidupan (Kohnstamm: remaja mulai matang)

B. Perspektif Psikologi Islami tentang Periode sasi Perkembangan manusia.

Fuad Nashori dalam bukunya Potensi-Potensi Manusia, dalam perspektif psikologi Islami menjelaskan bahwa kehidupan manusia secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kehidupan pra kelahiran, kehidupan di bumi, dan kehidupan pasca kematian.⁸⁹

Kehidupan pralahir dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: penciptaan ruh, penciptaan jasad, pertemuan ruh dan jasad, serta usia empat bulan dalam kandungan hingga kelahiran.

Kehidupan di dunia dalam perspektif Psikologi Islami ditandai dengan berbagai fase kehidupan. Fase bayi (0-2 tahun), fase kanak-kanak (2-7 tahun/eksplorasi sejati), fase tamyiz (7-10 tahun/melakukan peran sebagai abdillah), fase amrad (10-15 tahun/melakukan peran sebagai khalifah fil ard), fase taklif (15-40 tahun/ manusia dewasa, memerankan sebagai abdillah dan khalifah fil ard) , fase futuh (terbukanya realitas yang bersifat spiritual/ mengalami pencerahan batin sehingga memperoleh futuh).

⁸⁹ Fuad Nashori, 2005. Potensi-Potensi Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 129.

Kehidupan manusia setelah kematian, sebagaimana awal penciptaannya, manusia hidup dengan ruh-Nya saja. Mereka tinggal dalam genggamannya Allah SWT untuk menunggu hari pembalasan di akhirat. Di akhirat, manusia dapat memperoleh balasan baik dari Allah, tetapi juga dapat menerima hukuman atas pilihan-pilihan perbuatannya selama hidup di dunia, khususnya pada saat usia atau setelah taklinya.

Dengan menyadari sepenuhnya adanya kehidupan setelah kematian, seseorang dapat berbuat baik. Apa yang dilakukan seseorang di dalam kehidupan di dunia akan memiliki konsekuensi jangka panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Kesadaran hari akhir ini banyak mempengaruhi perilaku manusia.

C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan

Setiap manusia dilahirkan ke dunia membawa hereditas tertentu. Ini berarti karakteristik manusia diperoleh dari pewarisan dari orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik (seperti postur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut) dan psikis atau mental (seperti emosi, kecerdasan, bakat, dan dorongan).

Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting disamping hereditas yang menentukan perkembangan individu. Faktor lingkungan menurut Syamsu Yusuf meliputi fisik, psikis, sosial, dan religius.⁹⁰ Faktor luar ini sesungguhnya merupakan individu untuk memperoleh pengalaman atau belajar. Dorothy Law

⁹⁰ Syamsu Yusuf, *Psikologi...*, hal. 31.

Nolte menyatakan bahwa anak-anak itu belajar dari lingkungannya. Berikut ini adalah ungkapannya ;⁹¹

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki.

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi.

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri.

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri.

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri.

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri.

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai.

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan.

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan.

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan dirinya.

Jika anak dibesarkan dengan kasih-sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.

Lalu bagaimana hubungannya antara bawaan dan lingkungan atau pengalaman, pada awalnya individu dalam perkembangannya didominasi oleh potensi bawaannya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya pengalaman itu yang mendominasi perkembangan individu.

D. Aspek-Aspek dan Potensi-Potensi Perkembangan

Aspek-aspek perkembangan ini meliputi: fisik, kognisi (kecerdasan), emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran agama.

Dalam khazanah Islam dikenal adanya berbagai istilah untuk menggambarkan kemampuan lebih manusia, yaitu Mu'jizat, Karamat, dan Ma'unat, serta Irhasy. Mu'jizat adalah kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Karamat adalah kemampuan istimewa yang dimiliki oleh 'alim

⁹¹ Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 102.

atau wali (orang-orang yang dicintai Allah). Maunat adalah kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia biasa, bukan Nabi/Rasul atau wali. Irhasy adalah kemampuan lebih yang dimiliki oleh manusia untuk dimiliki oleh calon Nabi. Kemampuan istimewa terdiri atas pengetahuan istimewa dan kekuatan istimewa.

Menurut Fuad Nashori, dalam perspektif Psikologi Islami, manusia memiliki kemampuan-kemampuan istimewa, antara lain: kemampuan mengetahui masa depan (prekognisi), memahami pikiran dan perasaan orang lain (empathy), membaca peristiwa masa lalu (retrokognisi), mengetahui di tempat yang tidak terjangkau indra (clairvoyance), berbicara dengan makhluk lain, mempengaruhi benda dan peristiwa (psikokinesis), menyembuhkan penyakit, memasuki dunia ghaib, dan berada di luar lokasi (bilokasi).⁹² Kemampuan mengetahui masa depan, memahami pikiran dan perasaan orang lain, membaca peristiwa masa lalu, mengetahui di tempat yang tidak terjangkau indra, adalah termasuk kemampuan dalam hal pengetahuan. Sedangkan berbicara dengan makhluk lain, mempengaruhi benda dan peristiwa, menyembuhkan penyakit, memasuki dunia ghaib, dan berada di luar lokasi adalah termasuk kemampuan kekuatan.

E. Manusia sebagai Khalifah.

Manusia disamping sebagai abdillah, juga mempunyai tugas sebagai khalifah (wakil Tuhan) di bumi yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia (Q.S. AlBaqarah [2]: 30):

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

⁹² Fuad Nashori. Potensi... hal. 168.

Sebagai khalifah-Nya manusia diberi tanggungjawab untuk memakmurkan kehidupan di bumi (Q.S. Hud[11]: 61):

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya⁷²⁶, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Tugas sebagai khalifah di bumi harus dilaksanakan oleh manusia dengan moralitas yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan senantiasa mendekatkan diri. Ini artinya, sebagai khalifah Tuhan di muka bumi manusia juga sekaligus memposisikan diri sebagai *abdillah* yang bersedia menerima dan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya (kebebasan dan kemandirian dalam keterikatan).

Manusia sebagai khalifah di muka bumi (Khalifah fiil ard) merupakan dekrit abadi yang memberi wewenang dan kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan, karena Tuhan memberi potensi/kemampuan berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan. Misalnya Tuhan Maha Pencipta, maka manusia juga memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Tuhan tersebut, manusia mampu menciptakan Tuhan seperti yang terangkum dalam asmaul husna tidak mungkin terjangkau secara purna oleh manusia. Kemampuan manusia hanya sejauh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah*. Dalam rangka mencari simbol identitas moral yang mutlak sempurna (Tuhan) manusia dapat mengambil potret utuh *insan kamil*, yang terjelma pada pribadi Nabi Muhammad s.a.w (Q.S.Al-Ahzab [33]: 21).

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Potret insan kamil adalah gambaran kepribadian yang memadukan potensi fikir dan dzikir. Menurut Iqbal, bahwa tujuan seluruh kehidupan adalah membentuk insan kamil atau manusia paripurna, dan setiap pribadi hendaklah berusaha untuk mencapainya.⁹³ Cita-cita membentuk manusia utama ini, memberikan kepada kita ukuran “baik” dan “buruk”. Apa yang dapat memperkuat pribadi baik sifatnya dan yang dapat melemahkan pribadi buruk sifatnya.

F. Perbedaan Individual dalam Perkembangan

Perbedaan individual menunjukkan banyaknya variasi dan variabilitas. Ada baiknya kiranya perbedaan-perbedaan itu ditinjau lebih jauh dan lebih khusus, terutama pada beberapa jenis aspek perbedaan serta ciri-cirinya.

a. Kecakapan

Individu memiliki kecakapan tertentu bukan karena warisan dari keturunan semata-mata, melainkan juga karena perkembangan dan pengalamannya. Dengan demikian kecakapan individu dapat berupa kecakapan dasar (potensi ability) maupun kecakapan nyata (actual ability). Kecakapan potensial, menunjukkan kepada aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri yang bersangkutan yang diperolehnya secara hereditas, yang mungkin dapat berupa abilitas dasar umum (general intelligence) maupun abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu (bakat, aptitudes). Sedangkan kecakapan nyata, menunjukkan kepada aspek yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang juga karena hasil usaha atau belajar yang bersangkutan dengan cara, bahkan dalam hal-hal tertentu yang telah dijalaninya (achievement, prestasi).

⁹³ Hasyimsyam Nasution. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hal. 201.

Inteligensi dan bakat (kecakapan potensial) itu hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikatornya yang dimanifestasikan dalam kualifikasi perilaku. Witherington menunjukkan lebih rinci manifestasi dari indikator-indikator perilaku inteligen itu antara lain:

- 1) kemudahan dalam menggunakan bilangan (facility in the use of the numbers);
- 2) efisiensi dalam berbahasa (language efficiency);
- 3) kecepatan dalam pengamatan (speed of perception);
- 4) kemudahan dalam mengingat (facility in memorizing);
- 5) kemudahan dalam memahami hubungan (facility in comprehending relationships);
- 6) imajinasi (imagination)⁹⁴

Selanjutnya kecakapan versi Gardner dikenal dengan kecakapan majemuk (multiple intelligences). Delapan kecakapan yang tercakup dalam kecakapan majemuk adalah⁹⁵ :

- 1) linguistic Intellegences (Word smart).
- 2) logical-mathmatical intelligence (number/reasoning Smart).
- 3) Visual-Spatial Intellegence (picture Smart).
- 4) Bodily-Kinesthetic Intellegence (body Smart).
- 5) Musical Intellegence (Music Smart).
- 6) Interpersonal intelligence (People Smart).
- 7) Intrapersonal Intellegence (Self Smart).
- 8) Naturalist Intellegence (Nature Smart).

Dari delapan macam kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner tersebut, Goleman memberi penekanan pada dimensi kecerdasan antar pribadi atau interpersonal. Intisari

⁹⁴ Abin Syamsuddin Maknun, 1999. Psikologi kependidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 39.

⁹⁵ <http://littledarbi.blogspot.com/2006/09/memupuk-leadership-sejak-balita>, hal. 6-8. downlod, 12/12/2007.

dari kecerdasan ini menurut Goleman adalah mencakup kemampuan untuk mengetahui dan menangani perasaan diri, mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif, memiliki keuntungan dalam setiap bidang kehidupan.

Menurut Goleman, faktor emosi ini sangat penting dan banyak memberikan warna yang kaya dalam kecerdasan antarpribadi. Ada lima wilayah kecerdasan pribadi yang membentuk kecerdasan emosional. Lima wilayah tersebut meliputi kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan. Secara rinci lima wilayah kecerdasan dijelaskan sebagai berikut⁹⁶:

- 1) meliputi kemampuan mengenali emosi diri.
- 2) kemampuan mengelola emosi.
- 3) kemampuan memotivasi diri sendiri.
- 4) kemampuan mengenali emosi orang lain.
- 5) kemampuan membina hubungan.

Senada dengan teori di atas, teori lain menjelaskan bahwa komponen kecerdasan emosi (emotional intelligence) digambarkan sebagai berikut:

I then listed these specifict "component" of EI, which I adaptes from Salovey & Mayers Work : (1) self-awareness. Being aware of your own emotion as they are occurring; (2) Being emotionally literate. Being able to identity and label specific feelings in yourself and others; being able to discuss emotios and communicate clearly and directly; (3) The ability to emphathize with, fell compatiacion for, validate, motivate, inspire, ecourage and soothe others; (4) The ability to make intelligent decicions using a healthy balance of emotion and reason. Being nether too emotional nor too rational; and (5) The ability to

⁹⁶ Hamzah B. Uno, Orientasi baru dalam psikologi pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, . hal. 74-75.

*manage and take responsibility for one's own emotions, especially the responsibility for self-motivation and personal happiness*⁹⁷.

Kecakapan emosi yang sering mengantarkan sukses pada seseorang antara lain: inisiatif, semangat juang, dan kemampuan menyesuaikan diri – pengaruh, kemampuan memimpin tim, dan kesadaran politis-empati, percaya diri, dan kemampuan mengembangkan orang lain. Sebaliknya terdapat dua pembawaan yang sering dijumpai bagi mereka yang gagal, yaitu ; bersikap kaku dan hubungan yang buruk.

Lawrence E. Shapiro menyatakan bahwa kecakapan emosional dan ketrampilan social yang membentuk karakter lebih penting bagi keberhasilan anak atau seseorang dibandingkan kecakapan kognisi yang diukur melalui IQ⁹⁸. Kecakapan emosional sebenarnya merupakan cara baru untuk membesarkan anak. Mempelajari perkembangan kepribadian anak, IQ merupakan salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengetahuinya. Namun demikian, sekarang muncul alat yang lain yang dikenal dengan EQ (Emotional Quotions) yang dianggap baik untuk mengukur kecakapan emosional anak. Lawrence, menyatakan bahwa kecakapan emosional anak dapat dilihat pada (a) keuletan, (b) optimisme, (c) motivasi diri, dan (d) antusiasme⁹⁹. Kecakapan emosional seseorang merupakan karakteristik pribadi atau “karakter” orang yang bersangkutan. Oleh karena itu kecakapan emosional atau kecerdasan emosional (EQ) pengukurannya tidak didasarkan pada kepintaran (IQ) seseorang anak, tetapi melalui apa yang disebut karakteristik pribadi atau “karakter”.

Kecakapan emosional (EQ) bukanlah lawan dari kecakapan IQ atau kecakapan kognisi, namun keduanya saling berinteraksi secara dinamis, baik dalam tataran konseptual maupun di dalam dunia nyata. Ideal memang bila seseorang dapat menguasai ketrampilan kognisi (IQ) sekaligus kecakapan emosional dan social.

⁹⁷ Ibid, hal. 75

⁹⁸ Ibid, hal. 101

⁹⁹ Ibid.

b. Perbedaan Kepribadian

Dalam konsepsi Psikologi, belum ada kesepakatan tentang arti dan definisi “kepribadian”, sehingga banyaknya definisi kepribadian sebanyak ahli yang mencoba merumuskannya. “Kepribadian” menurut Allport adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Sedangkan menurut Pervin dan John kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku yang konsisten.¹⁰⁰ Sedangkan Menurut Adler adalah gaya hidup individu atau cara yang khas dari individu tersebut dalam memberikan respons terhadap masalah-masalah hidup.¹⁰¹ Sedangkan menurut Chaplin Kepribadian adalah integrasi dari dan sifat-sifat tertentu yang dapat diselidiki dan dijabarkan untuk menyatakan kualitas yang unik dari individu.¹⁰²

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa kepribadian itu merupakan karakteristik atau keunikan individu yang meliputi pola-pola pikiran, perasaan, perilaku dan cara merespon sesuatu masalah yang dihadapi.

Tiap-tiap anak memiliki kepribadian unik. Anak memiliki sifat-sifat khas yang dimiliki dirinya sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain (aku bukan dia, aku adalah aku). Keunikan yang demikian ini sudah barang tentu harus diperhatikan oleh guru, sehingga pembelajaran dapat efektif dan efisien.

¹⁰⁰<http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/kepribadian.html>, download, 13-8-2008.

¹⁰¹<http://dhimaskasep.files.wordpress.com/2008/03/03-kepribadian.pdf>, download 5 Agustus 2008.

¹⁰² Ibid.

Kepribadian manusia menurut Renee Baron dan Elizabeth Wagele terbagi menjadi 9 tipe.¹⁰³ *Pertama*, perfeksionis. Orang dengan tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri dan orang lain dan menghindari marah, *Kedua*, penolong. Tipe kedua dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, dan menghindari kesan membutuhkan. *Ketiga*, pengejar prestasi. Para pengejar prestasi termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan, dan terhindar dari kegagalan, *Keempat*, romantis. Orang tipe romantis termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri serta dipahami orang lain, menemukan makna hidup, dan menghindari citra diri yang biasa-biasa saja, *Kelima*, pengamat. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu dan alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri dan menjaga jarak, serta menghindari kesan bodoh atau tidak memiliki jawaban, *Keenam*, pencemas. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan, dan terhindar dari kesan pemberontak, *Ketujuh*, petualang. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan, memberi sumbangsih pada dunia, dan terhindar dari derita dan dukacita, *Kedelapan*, pejuang. Tipe pejuang termotivasi oleh kebutuhan untuk dapat mengandalkan diri sendiri, kuat, memberi pengaruh pada dunia, dan terhindar dari kesan lemah, dan *Kesembilan*, pendamai. Para pendamai dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain dan menghindari konflik.

¹⁰³ <http://popsy.wordpress.com/2007/06/16/mengenal-9-tipe-kepribadian-manusia-dengan-lebih-asyik/download> 27/10/2008

Sedangkan menurut Hippocrates, kepribadian manusia terbagi menjadi 4 tipe¹⁰⁴, yaitu : *Pertama*, choleris. Sifat khas kepribadian ini; hidup, besar semangat, keras, daya juang besar, hatinya mudah terbakar, dan optimis. *Kedua*, Melankolis. Sifat khas tipe ini adalah; mudah kecewa, daya juang kecil, muram, dan pesimistis. *Ketiga*, phlegmatic. Sifat-sifat khasnya antara lain; tak suka berburu-buru (calm, tenang), tak mudah dipengaruhi, setia. *Keempat*, Sanuinis. Sifat-sifat khas yang muncul pada tipe kepribadian ini yaitu; hidup, mudah berganti haluan, ramah, lekas bertindak tapi juga lekas berhenti.

Dengan memahami kepribadian masing-masing peserta didik akan dapat diketahui "seperti apa sesungguhnya diri masing-masing peserta didik

Perkembangan kepribadian anak atau peserta didik ditentukan oleh keturunan/heredity, lingkungan/environment, dan diri/self). Faktor bawaan, menurut Mendel bahwa, sifat-sifat induk diwariskan kepada anaknya. Ini artinya anak memperoleh warisan sifat-sifat pembawaan dari keduanya yang merupakan potensi-potensi tertentu yang bersifat fixet. Faktor lingkungan, dapat berupa lingkungan fisik; cuaca, suhu, geografis, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan sosial dan budaya dapat berupa sikap, perilaku orang di sekitar anak, kebiasaan makan, berjalan, berpakaian, dan lain-lain. Sedangkan faktor diri yaitu tentang kehidupan kejiwaan seseorang yang meliputi; perasaan, usaha, fikiran, pandangan, penilaian, keyakinan, sikap dan anggapan yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

¹⁰⁴ Sumadi Suryabrata., Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 80.

c. Perbedaan Gaya Belajar

Setiap anak memiliki cara belajar sendiri-sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar (*learning style*) diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut.¹⁰⁵

Gaya belajar dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, Gaya belajar visual; yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang dilihatnya, suka membaca, teliti dan menyukai metode demonstrasi serta kurang menyukai metode ceramah. *Kedua*, Gaya belajar auditorial; yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang didengarnya, sulit menulis tetapi mudah bercerita, senang bersuara keras ketika sedang membaca, lebih menyukai gurauan daripada membaca buku, dan menyukai metode ceramah. *Ketiga*, gaya belajar kinestetik; yaitu gaya belajar yang lebih menekankan gerak atau praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik ialah suka mengerjakan sendiri atau praktik langsung, banyak bergerak, ketika membaca suka menggunakan jari sebagai penunjuk, menyukai permainan yang menyibukkan, dan ingin selalu melakukan sesuatu.

Dengan adanya tiga gaya belajar tersebut, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didiknya,

¹⁰⁵ Berwawiy Munthe, dkk, Sukses di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, hal.28.

sehingga dapat memberikan layanan kepada peserta didiknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dengan demikian masing-masing peserta didik dapat belajar secara optimal.

B. Perkembangan Penting Masa Anak Usia Sekolah Dasar

Pengertian Anak Sekolah Dasar

Secara usia kronologis, yang dimaksud anak sekolah dasar adalah anak sekolah yang usianya antara 6 sampai 12 tahun.¹⁰⁶ Pada usia ini anak mengalami perkembangan jasmani yang pesat. Anak ini mempunyai kecekatan gerak dan hal ini merupakan kepuasan bagi dirinya. Kecekatan yang demikian ini penting untuk dikembangkan sebagai bekal kelak. Disamping mengalami perkembangan jasmani yang pesat pada usia ini perkembangan rokhannya juga pesat.¹⁰⁷ Anak keluar dari lingkungan keluarga dan memasuki lingkungan sekolah, yaitu lingkungan yang lebih luas, yang besar pengaruhnya bagi perkembangan jasmani dan rokhani. Anak-anak mengenal lebih banyak teman dalam lingkungan siswal yang luas, sehingga peranan sosialnya semakin berkembang. Ia ingin mengetahui segala sesuatu yang ada disekitarnya sehingga bertambah pengalamannya. Semua pengalaman baru itu akan membantu dan mempengaruhi proses perkembangan berfikirnya.

Tugas Perkembangan Masa Anak Sekolah Dasar

Menurut Havighurst, setiap tahap perkembangan memiliki tugas perkembangannya Sendiri (Khairuddin Bashori,

¹⁰⁶ Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, Yogyakarta: Andi Offset, tth, hal. 85.

¹⁰⁷ Zulkipli L, Psikologi Perkembangan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 52.

: 19).¹⁰⁸ Apabila tugas ini dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menyelesaikan tugas berikutnya; tetapi bila gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau ketrampilan-ketrampilan. Havighurst menyusun daftar beberapa tugas perkembangan yang harus diselesaikan anak usia SD.

Tugas Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Menurut Havighurst

1. Mempelajari ketrampilan-ketrampilan fisik yg diperlukan untuk permainan.
2. Membangun sikap yg sehat mengenai dirinya sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh.
3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya.
4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya.
5. Belajar ketrampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
6. Belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari;
7. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata nilai;
8. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial, dan lembaga-lembaga.
9. Mencapai kebebasan pribadi.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Khoiruddin Bashori. *Problem Psikologis Kaum Santri*. Yogyakarta: FKBA., 2004, hal. 19.

¹⁰⁹ Ibid. Hal. 20-21.

Perkembangan Kognisi

Istilah “Cognitive” berasal dari kata *cognition* yang padanannya *knowing*, yang berarti mengetahui.¹¹⁰ Dalam arti yang lebih luas, *cognition* (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.¹¹¹ Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognisi merupakan salah satu domain atau ranah psikologis manusia yang berhubungan dengan setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan ranah kejawaan yang lain, yaitu ranah afeksi (perasaan) yang berhubungan dengan perasaan dan ranah konasi (kehendak).

Perkembangan kognisi pada anak usia sekolah dasar, menurut Piaget berada pada fase Operasi Konkret (*concrete operations*),¹¹² berakhirnya berfikir khayal dan mulai berfikir konkret (berkaitan dengan dunia nyata).

Pada periode ini ditandai dengan kemampuan atau kecakapan baru, yaitu; *pertama*, mengklasifikasikan (mengelompokkan), *kedua*, mengasosiasikan (menghubungkan dan menghitung) angka-angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan dengan perhitungan (angka), seperti menambah, membagi, mengurangi dan mengalikan. *Ketiga*, pada akhir masa ini anak sudah mempunyai kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang sederhana.¹¹³ Sedangkan menurut Paul Suparno,¹¹⁴ pada periode ini anak sudah dapat berfikir lebih menyeluruh dengan melihat banyak unsur dalam waktu yang sama (*decentering*). Pemikiran anak dalam banyak hal sudah teratur dan terarah karena sudah

¹¹⁰ Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan..., hal. 66.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Paul Suparno. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, Yogyakarta, Kanisius, 2001, hal. 25.

¹¹³ Syamsu Yusuf, Psikologi., hal. 178.

¹¹⁴ Paul Suparno, Teori .. hal. 86-87.

dapat berfikir seiasi (mengatur unsur-unsur menurut semakin besar atau kecilnya unsur-unsur tersebut), klasifikasi dengan lebih baik, bahkan dapat mengambil kesimpulan secara probabilitas. Konsep bilangan, waktu dan ruang sudah semakin lengkap terbentuk. Ini semua membuat anak tidak lagi egosentris dalam pemikirannya.

Meskipun demikian, pemikiran yang logis dengan segala unsumnya di atas masih terbatas diterapkan pada benda-benda yang konkret, belum dapat diterapkan pada kalimat verbal, hipotesis, dan abstrak. Pada usia ini, anak belum dapat menyelesaikan persoalan yang memiliki unsur atau variabel yang banyak. Disamping itu anak masih kesulitan menyelesaikan persoalan yang abstrak.

Perkembangan Emosi

Berbagai pengertian tentang emosi, antara lain bahwa emosi adalah sebagai "setiap kegiatan atau pergolakan fikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap."¹¹⁵ Sedangkan menurut Saring Marsudi, emosi didefinisikan sebagai bentuk pernyataan perasaan yang tidak terkendali.¹¹⁶ Emosi lebih luas dari perasaan, bahkan perasaan merupakan bagian dari emosi. Emosi dapat dikelompokkan menjadi emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, misalnya: rasa dingin, rasa saakit, manis, lelah, kenyang dan lapar. Sedang emosi psikis (kejiwaan), yaitu emosi yang mempunyai alasan kejiwaan, yang termasuk emosi ini antara lain: perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan dan perasaan ketuhanan.¹¹⁷

Anak-anak memiliki emosi yang berlainan dengan orang dewasa. Emosi anak berlangsung singkat dan berakhir tiba-

¹¹⁵ Daniel Goleman. *Emotional Intelligence* (trj), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 41.

¹¹⁶ Saring Marsudi, dkk., *Layanan ...* hal. 6.

¹¹⁷ Syamu Yusuf, *Psilogi...*, hal. 117.

tiba, terlihat lebih hebat, bersifat sementara atau dangkal, lebih sering terjadi dan dapat diketahui lebih jelas dari tingkah lakunya. Sedangkan emosi orang dewasa berlangsung lama dan berakhir lambat, tidak terlihat hebat, lebih mendalam dan lama, dan jarang terjadi serta sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikan.

Pengaruh emosi pada anak-anak lebih rendah bila dibandingkan dengan pengaruh emosi anak kecil. Anak-anak sekolah lekas merasa puas, mereka tampak selalu gembira, jarang menyesali perbuatannya dan merekapun belum dapat merasakan kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Emosi-emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah ini adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu dan kegembiraan (rasa senang, nikmat dan bahagia).¹¹⁸

Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Apakah anak akan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan menjadi pribadi yang dapat bermasyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu : *pertama*, kesempatan yang penuh untuk sosialisasi adalah penting karena anak-anak tidak dapat belajar hidup bermasyarakat dengan orang lain jika sebagian besar waktu mereka dipergunakan seorang diri. *kedua*, dalam keadaan bersama-sama anak-anak tidak hanya harus mampu berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain, tetapi juga harus mampu berbicara tentang topik yang dapat difahami dan menarik orang lain, *ketiga*, anak akan belajar sosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk melakukannya, dan *keempat* adalah metode belajar yang efektif dengan bimbingan adalah penting.

¹¹⁸ Ibid, hal. 181.

Pada semua tingkatan umur, orang dipengaruhi oleh kelompok sosial di mana mereka mempunyai hubungan tetap dan merupakan identifikasi diri.

Selama masa prasekolah, keluarga merupakan agen sosialisasi yang sangat penting. Ketika anak memasuki usia sekolah tekanan kelompok menjadi lebih kuat dibanding dibanding masa sebelumnya.

Pada bidang pengaruh, ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi mereka, namun pengaruh teman sebaya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru atau orang tua. Besarnya pengaruh teman sebaya ini sebagian berasal dari keinginan anak untuk dapat diterima oleh kelompok dan sebagian lagi dari kenyataan bahwa anak-anak menggunakan waktu lebih banyak dengan teman sebaya.

Menurut Albert Bandura dan R.H. Walter bahwa perkembangan sosial anak usia sekolah dasar dan menengah terkait dengan perkembangan moralitas mereka.¹¹⁹ Artinya, setiap perkembangan sosial anak selalu dihubungkan dengan perkembangan perilaku moral, yakni perilaku baik atau buruk menurut norma-norma yang berlaku yang berlaku dalam masyarakat.

Perkembangan bahasa

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Disamping itu juga berfungsi sebagai ungkapan buah pikiran (menyampaikan gagasan atau pendapat), dan ungkapan perasaan (isi hati), memahami ketrampilan mengolah informasi dan berfungsi mengembangkan kepribadian, seperti menyatakan sikap dan keinginan. Perkembangan bahasa pada masa anak merupakan kesinambungan perkembangan bahasa pada masa sebelumnya.

¹¹⁹ Muhibbin Syah, Psikologi ..., hal. 76.

Pada masa ini perkembangan bahasa lebih baik dari masa sebelumnya, karena pada masa ini perkembangan fikiran anak juga sudah berkembang dengan baik.

Pada masa ini, tata bahasa anak sudah mulai berbicara dengan tata bahasa yang lengkap.¹²⁰ Anak berkembang secara pesat dalam kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata (vocabulary), pada masa awal ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada akhir masa ini (11-12 tahun) telah dapat menguasai 50.000 kata.¹²¹ Sejalan dengan perkembangan fikiran anak yang sudah berfikir kritis, maka anak sudah gemar membaca dan mendengarkan cerita yang bersifat kritis, anak sudah menanyakan soal waktu dan sebab akibat. Dalam bertanya anak tidak hanya bertanya tentang "apa", tetapi sudah diikuti pertanyaan: "dimana", "kapan", "mengapa" dan "Bagaimana".

Perkembangan Moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti adat kebiasaan.¹²² Menurut Magnis Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.¹²³ Sedang menurut Amin Abdullah, moral adalah aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu.¹²⁴

Dari pemikiran di atas dapat difahami bahwa moral merupakan aturan sosial yang mengatur dan membatasi

¹²⁰ Saring Marsudi, *Layanan ...*, hal. 8.

¹²¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi ...*, hal. 179.

¹²² Hamzah Yakub. *Etika Islam. Bandung: Diponegoro, 1985, hal.*

14.

¹²³ Magnis Suseno. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hal. 14.*

¹²⁴ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 147.*

tinjauan manusia tentang yang benar dan yang salah, yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar (7- 10 tahun) menurut Piaget berada pada tahap masa transisi (konkret-operasional), yaitu perubahan secara bertahap dari tahap realisme moral (artinya anak-anak menganggap moral sebagai suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan sosial) ke tahap perkembangan formal-operasional (yaitu bahwa moral sebagai sebuah perpaduan yang terdiri dari otonomi moral, realisme moral dan resiprositas moral.¹²⁵ Sedangkan menurut Kohlberg, perkembangan moral pada usia anak sekolah dasar berada pada tahap Individual Instrumental Purpose and Exchange.¹²⁶ Pada tahap ini apa yang dianggap benar adalah melayani kebutuhan diri sendiri dan orang lain serta berlaku adil dalam melakukan pertukaran-pertukaran konkret. Alasan melakukan yang benar adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri di suatu dunia di mana seseorang perlu mengakui bahwa orang lain juga memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Tahap ini mengambil perspektif individualistik konkret. Seseorang yang berada pada tahap ini memisahkan kepentingan dan pandangan dirinya dengan pandangan dan kepentingan orang lain.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkembangan moral anak usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir masa ini anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari peraturan. Disamping itu anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-salah atau baik-buruk.

¹²⁵ Muhibbin Syah, Psikologi ..., hal. 79.

¹²⁶ Barry Chazan, (tth), Contemporary Approach to Moral Education, Teachers Collage Press.

Perkembangan Kesadaran Beragama

Periode Sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya.

Perkembangan agama pada anak usia Sekolah dasar menurut Ernest Harms sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin berada pada tahap *The Realistic Stage* (tingkat kenyataan).¹²⁷ Pada masa ini ide-ide ke-Tuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kenyataan (*realis*). Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini ide-ide keagamaan pada anak didasarkan atas dorongan emosional, hingga mereka melahirkan konsep Tuhan yang *formasil*. Sehingga pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dan dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk amal (kegiatan) keagamaan mereka ikuti dan mempelajarinya penuh minat.

Sifat-sifat penghayatan keagamaan yang muncul pada usia ini antara lain; *pertama*, sikap keagamaan bersifat reseptif disertai dengan pengertian, *kedua*, pandangan dan faham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungan-Nya, dan *ketiga*, penghayatan secara rokhaniah semakin mendalam, pelaksanaan ritual diterimanya sebagai keharusan moral.¹²⁸

C. Teori-Teori Belajar

Dewasa ini, berbagai tulisan yang membahas perkembangan teori belajar, secara umum teori belajar

¹²⁷ Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hal. 67.

¹²⁸ Syamsu Yusuf, Psikologi ..., hal. 182.

dikelompokkan dalam empat kelompok atau aliran meliputi (a) teori belajar behavioristik, (b) teori belajar kognitif, (c) teori belajar humanistik, dan (d) teori belajar sibernetik.¹²⁹ Masing-masing aliran ini memiliki karakteristik yang berbeda, aliran behavioristik menekankan pada hasil daripada proses belajar. Aliran kognitif menekankan pada proses belajar. Aliran humanistik menekankan pada isi atau apa yang dipelajari. Aliran sibernetik menekankan pada sistem informasi yang dipelajari.

Aliran Behavioristik. Menurut aliran ini, bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang realtif menetap akibat adanya pengalaman.¹³⁰ Pengalaman itu diperoleh melalui interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons.¹³¹ Tokoh-tokoh pada aliran ini antara lain, Thorndike; Watson; Hull; Edwin Gutrie; dan Skinner.

Aliran Kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut teori ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berfikir yang sangat komplek. Teori belajar ini sangat erat dengan teori belajar sibernetik. Diantara tokoh-tokoh pada aliran ini antara lain; Piaget (tahap-tahap perkembangan); Asubel (belajar bermakna); dan Jerome Bruner (belajar penemuan bebas/free discovery learning).

Piaget. Menurut Piaget, bahwa proses belajar itu terdiri dari tiga tahapan, yaitu (1) asimilasi, (2) akomodasi, dan (3) equilibrasi (penyeimbangan).¹³² Asimilasi adalah proses pengitegrasian pengalaman baru atau informasi baru ke dalam

¹²⁹ Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 6.

¹³⁰ Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Psikologi...*, hal. 60.

¹³¹ Hamzah B. Uno, *Orientasi....*hal. 7.

¹³² Ibid, hal. 10.

struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedang equilibrium adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimiliasi dan akomodasi.¹³³

Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognisi siswa, dalam hal ini Piaget membaginya menjadi empat tahapan sebagai berikut:¹³⁴

Tabel 1.
Skema Empat Tahap Perkembangan Kognitif

Tahap	Umur	Ciri Pokok Perkembangan
Sensorimotor	0-2 tahun	- Berdasarkan tindakan - Langkah demi langkah
Praoperasi	2-7 tahun	- Penggunaan simbl/bahasa tanda - Konsep intuitif
Operasi Konkret	7-11 tahun	- Pakai aturan jelas/logis - Reversibel dan kekekalan
Operasi formal	11 tahun ke atas	- Hipotesis - Abstrak - Deduktif dan induktif - Logis dan probabilitas

Dari hal tersebut, proses belajar yang dialami oleh anak pada tahap sensorimotor tentu berbeda dengan yang dialami oleh anak yang sudah mencapai pada tahap praoperasional, dan lain lagi yang dialami oleh siswa yang telah sampai pada tahap yang lebih tinggi (operasi konkret dan operasi formal). Secara singkat, kognisi anak berkembang dari konkret menuju abstrak, semakin tinggi kognisi seseorang semakin teratur cara berfikirnya. Dalam kaitan ini guru hendaknya memperhatikan tahap-tahap perkembangan anak didiknya.

¹³³ Paul Suparno, Teori..., hal. 22-23.

¹³⁴ Ibid, Hal. 25.

Implikasi teori belajar Piaget, antara lain bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh murid dalam berhadapan dengan lingkungannya (tekanan pada murid); lebih menekankan pada keaktifan murid (metode belajar), karena belajar lebih menekankan pada keaktifan murid, maka guru lebih berperan sebagai mentor atau fasilitator (peran guru). Oleh karena itu guru dituntut memiliki pengetahuan lebih banyak.

Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut “pengatur kemajuan (belajar)” (*Advance Organizers*) didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa”.¹³⁵ Pengatur kemajuan belajar adalah informasi umum yang mencakup semua isi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa.

Pengaruh kemajuan belajar, menurut Ausubel bermanfaat; (1) dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa, (2) sebagai penghubung antara apa yang sedang dipelajari siswa dengan apa yang akan dipelajari siswa, (3) mampu memudahkan siswa untuk memahami bahan belajar.¹³⁶

Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman guru tentang isi materi pelajaran harus baik. Disamping itu, logika guru juga harus baik. Sebab tanpa logika yang baik, guru akan kesulitan memilih dan memilih materi pelajaran, merumuskan dalam rumusan yang pada, serta mengurutkan materi ke dalam struktur yang logis dan mudah dipahami.

Bruner. Mengusulkan teorinya yang disebut *free discovery Learning*. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila siswa diberi kesempatan untuk menemukan sesuatu aturan (teori, konsep, definisi, dan lainnya) melalui contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya.¹³⁷ Dengan kata lain, siswa dibimbing berfikir secara

¹³⁵ Hamzah B. Uno, *Orientasi...*, hal. 12.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

induktif untuk memahami kebenaran secara umum. Untuk memahami tentang konsep kebersihan, misalnya, siswa pertama-tama tidak dijelaskan tentang definisi kebersihan, tetapi siswa diminta mempelajari contoh-contoh tentang kebersihan. Kemudian, dari contoh-contoh itu siswa dibimbing mendefinisikan tentang "kebersihan". Pendekatan ini merupakan lawan dari pendekatan "belajar ekspositori". Dimana siswa diberi informasi umum kemudian disuruh menjelaskan dengan contoh-contoh.

Aliran Teori Humanistik. Menurut teori ini, bahwa proses belajar harus menekankan pada manusia itu sendiri. Dalam praktiknya, teori ini terwujud dalam pendekatan "belajar bermakna" atau Meaningful Learning yang diusulkan oleh Ausubel, Terwujud dalam teori Bloom (taksonomi Bloom) dan Krathwolh (penjenangan).¹³⁸ Disamping itu juga terdapat tokoh lain, seperti Kolb, Honey dan Mumford, dan Habermas. Kolb, membagi tahapan belajar ada empat; yaitu (1) pengalaman konkret, (2) pengalaman aktif dan reflektif; (3) konseptualisasi, dan (4) eksperimentasi aktif. Belajar *tahap pertama*, siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami kejadian. *Tahap kedua*, siswa mampu mengadakan pengamatan aktif dan berusaha memikirkan dan memahaminya. *Tahap ketiga*, siswa sudah dapat membuat abstraksi atau teori. *Tahap keempat*, siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi baru. Siklus belajar ini menurut Kolb, berlangsung secara berkesinambungan.

Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan empat tipe siswa, yaitu (1) aktivis (suka melibatkan diri dalam pengalaman baru), (2) reflektor (cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan), (3) teoritis (sangat kritis, senang menganalisis, dll), (4) pragmatis (lebih menaruh pada hal yang bersifat praktis dari segala hal).¹³⁹

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid, hal. 16.

Habermas. Habermas berpandangan bahwa belajar itu dipengaruhi oleh adanya interaksi, baik sesama manusia maupun lingkungan. Berdasarkan interaksi ini, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi tiga bagian, yaitu (1) belajar teknis (berusaha menguasai dan mengelola lingkungan dengan cara mempelajari ketrampilan tertentu dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu, (2) belajar praktis (lebih menekankan intreraksi diri dengan orang lain), (3) belajar emansipatoris (siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan).

Aliran Sibernetik. Teori ini merupakan teori yang paling baru, karena teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini memang agak mirip dengan teori belajar kognitif yang mementikan proses. Dalam Teori sibernetik, proses memang penting, tetapi yang lebih penting adalah sisem informasi yang diproses. sebab informasi itulah yang akan menentukan proses. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi, yang cocok untuk semua siswa. Oleh karena itu sangat mungkin sebuah informasi sama akan dipelajari siswa dengan proses belajar yang berbeda-beda. Dalam praksisnya, teori ini dikembangkan oleh Landa (dalam pendekatan yang disebut algoritmik dan heuristik), Pask dan Scott (dengan pembagian siswa tipe menyeluruh atau wholish dan tipe serial atau serialist).¹⁴⁰

D. Isu-Isu Terkini Tentang Anak Stess dan Depresi pada Anak

Lusi Nuryanti, mengemukakan beberapa tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan adanya strsss pada anak usia

¹⁴⁰ Ibid, hal. 17-18.

sekolah dasar, diantaranya:¹⁴¹ Kemunduran perilaku kembali ke tahap sebelumnya: mengompol, menggigit kuku, menghisap ibu jari.

1. Menarik diri dengan sebab tidak jelas: tidak mau bicara, murung.
2. Kehilangan motivasi atau dapat berkonsentrasi di sekolah.
3. Adanya perubahan perilaku yang kelihatan.
4. Menurunnya nafsu makan dan bila tidur kelihatan gelisah.
5. Mudah tersinggung.
6. Terdapat keluhan pada fisik: misalnya sakit perut, sakit kepala.
7. Bermasakah dalam berhubungan dengan teman sebaya.

Problem Kelekatan

Kelekatan (attachment) adalah ikatan kasih sayang yang berkembang antara anak dan pengasuhnya. Menurut Thomae dan juga Bowlby, tingkah laku lekat manusia merupakan hal yang sentral.¹⁴² Pengembangan tingkah laku lekat merupakan hal yang penting dalam perkembangan yang sehat. Kelekatan pertama kali umumnya pada usia 5 sampai 15 bulan. Menurut Scaffer, devprivasi sosial yang ekstrem dapat memperlambat terbentuknya tingkah laku lekat pertama.

Tanda-tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya. Kualitas kelekatan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan gejala-gejala psikopatologi, kompetensi sosial dan performansi anak di sekolah.¹⁴³ Gejala-gejala psikopatologi, antara lain: gangguan kepribadian,

76. ¹⁴¹ Lusi Nuryanti. Psikologi Anak, Jakarta: PT Indeks, 2008, hal.

¹⁴² Khoiruddin Bashori. Problem..., hal. 31.

¹⁴³ Ibid, hal. 32.

agresivitas, problem-problem perilaku, kesepian, depresi, gangguan makan, rencana bunuh diri, perilaku antisosial, pemakaian obat terlarang, alkoholisme dan kebiasaan merokok. Kompetensi sosial meliputi: kemampuan sosialisasi, efikasi diri, citra diri, kemampuan komunikasi verbal, penyesuaian sosial dan emosional, strategi koping, ketegasan, pembentukan identitas ego, perilaku prososial, dan harga diri. Sedangkan kinerja akademik meliputi motivasi akademik, kemampuan akademik, sikap akademik, dan penyesuaian akademik.

Bagi individu dengan kelekatan aman mengembangkan model mental mengenai orang lain sebagai orang yang bersahabat, dapat dipercaya, responsif, penuh kasih sayang, serta memandang diri sendiri sebagai orang yang berharga dan bersemangat. Sebaliknya, orang dengan kelekatan tidak aman (ambivalen) mempunyai keyakinan yang negatif mengenai diri sendiri dan orang lain, kurang asertif, merasa takut ditinggalkan atau tidak dicintai orang lain, dan memandang orang lain sebagai kurang penolong dan susah dimengerti.

Untuk anak usia sekolah dasar, yang perlu diperhatikan adalah mengenai figur lekat utama. Yang menjadi figur lekat utama yang dipilih anak usia sekolah dasar adalah orang tuanya, kemudian teman, baru yang terakhir guru atau ustadz. Terdapat keterkaitan antara kualitas kelekatan anak dengan figur lekat dengan prestasi belajar. Penelitian yang dilakukan Khoiruddin Bashori, menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas kelekatan anak, baik pada orang tua, guru/ustadz, atau teman, semakin tinggi pula prestasi belajarnya.¹⁴⁴ Dengan kata lain semakin rendah kualitas kelekatan membawa resiko semakin buruk prestasi belajarnya. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa kualitas kelekatan anak pada figur lekat memiliki kontribusi yang berarti terhadap motivasi akademik, kompetensi akademik, sikap akademik, dan penyesuaian akademik siswa.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ibid, hal. 190.

¹⁴⁵ Ibid. Hal. 191.

Anak Gifted

Fakta-fakta tentang perbedaan potensial anak ini antara lain dapat dicontohkan dalam hal kecerdasan intelektual. Sejumlah ahli psikologi perkembangan menyebutnya sebagai *gifted child* atau anak yang berbakat intelektual. Anak Gifted, menurut Fuad Nashori, mereka memiliki kemampuan belajar yang sangat besar. Mereka adalah anak-anak yang kreatif.¹⁴⁶ Sebagian dari mereka juga mempunyai kemampuan berceramah yang luar biasa, pada saat usia sekitar lima tahun mereka dapat berpidato atau berceramah agama bagaikan orator atau muballigh yang ulung. Pidatonya sangat menarik dan mampu membuat ungkapan-ungkapan yang orisinal.

Perkembangan Anak yang dibesarkan pada Rumah Kecil

Rumah, bila diperhatikan merupakan tempat yang paling banyak digunakan manusia oleh manusia untuk menghabiskan waktunya. Oleh karenanya keadaan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan kepribadian anak. Menurut Jamaluddin Ancok, jenis rumah, ukuran-kamarn rumah dan kamarnya, serta suasana di sekitar rumah mempengaruhi perilaku orang-orang yang berada di dalamnya.¹⁴⁷

Besar kecilnya rumah akan menentukan besarnya rasio antara penghuni dengan tempat (space) yang tersedia. Semakin besar rumah dan semakin sedikit penghuninya, maka akan semakin besar rasionya. Demikian sebaliknya, semakin kecil rumah dan banyak penghuninya, maka semakin kecil rasio tersebut, dan akibatnya rumah tersebut terasa semakin sumpek (jawa). Kesumpekan ini akan banyak menimbulkan masalah, terutama memburuknya cara pengasuhan anak. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan ruangan yang yang

¹⁴⁶ Fuad Nashori, *Potensi...*, hal. 94.

¹⁴⁷ Djamaluddin Ancok. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta: Darussalam, 2004, Hal. 119.

sifatnya personal, maka hal ini akan menyebabkan banyaknya perilaku untuk memenuhi keinginan tidak terealisasi.

Perkembangan kognitif. Perkembangan kognisi anak sangat tergantung pada stimulasi mental yang dapat diperoleh anak dalam lingkungannya. Pada masa balita misalnya, ia membutuhkan ruang untuk bermain, bergerak, berlari, yang semuanya sesungguhnya anak melakukan eksperimen untuk memperoleh pengalaman. Kurang luasnya ruangan akan menyebabkan keleluasaan anak bermain, bergerak menjadi berkurang. Hasil penelitian di Inggris, sebagaimana diungkapkan oleh Jamaluddin Ancok, menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah yang sumpek mengalami keterlambatan dalam kemampuan membaca. Keterlambatan kemampuan sekitar sembilan bulan. Disamping itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah kecil dan sumpek lebih sering tidak masuk sekolah jika dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang tidak sumpek. Dan anak-anak jadi malas sekolah karena suasana tegang di rumah yang membuatnya menjadi apatis.

Perkembangan kepribadian. Kepribadian anak akan berkembang baik manakala suasana di rumah penuh kehangatan dan kedamaian. Karena rumah yang kecil dapat menyebabkan suasana yang sumpek, dan suasana yang sumpek ini akan menyebabkan terjadinya stress, maka stress yang terjadi pada orang tua, kemungkinan besar akan dilampiaskan dengan menyakiti anak-anaknya. Secara teoritis, anak yang merasa tidak aman di rumahnya sendiri maka kemungkinan besar akan mengembangkan kepribadian yang patologis.

Hasil penelitian tersebut memang terjadi di Barat, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan renungan untuk menentukan jenis rumah, ukuran rumah dan kamarnya, serta suasana sekitar rumah, sehingga dapat membantu perkembangan kognitif dan kepribadian anak. Dan sangat baik kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terutama di Indonesia

tentang pengaruh rumah yang kecil terhadap perkembangan kognitif dan kepribadian anak.

DASAR YURIDIS PENDIDIKAN

Pada bagian ini akan dikaji dasar yuridis pendidikan Sistem Pendidikan Nasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005. Kajian dalam tulisan ini meliputi penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional dan standar pendidikan.

A. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

1. Cita-cita pendidikan

Dalam pembukaan UUD 1945, tersirat dan tersurat tentang cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional

Pengertian Pendidikan. Yang dimaksud pendidikan adalah adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 2 bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Pasal 1 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003).

3. Dasar, visi, misi, tujuan, strategi pendidikan Nasional, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Dasar Pendidikan Nasional. Dasar Pendidikan Nasional dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa; "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Visi dan Misi Pendidikan Nasional. Berdasarkan penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bahwa Visi dan misi Pendidikan Nasional dijelaskan : Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional. Pembaharuan sistem pendidikan nasional menggunakan strategi tertentu. Pada penjelasan UU No.20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. pelaksanaan wajib belajar.

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. pemberdayaan peran masyarakat.
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
14. Hak dan kewajiban warga Negara, orang Tua, Masyarakat, Negara dan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara telah dijamin UUD 1945 pada pasal 1 ayat (1) bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Kemudian dalam UU RI No. 23 Tahun 2003 pasal 5 dijelaskan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Disamping mempunyai hak tersebut di atas, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pada pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Orang Tua. Hak dan kewajiban orang tua tertuang dalam Pasal 7 UU RI No. 20 Tahun 2003, yaitu:

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 menyatakan: "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Dan pasal 9 menyatakan: "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 10 dan Pasal 11. Pasal 10 menyatakan: "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun Pasal 11 menyatakan: Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

2. Jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan

Jalur Pendidikan

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pendidikan Formal. Pendidikan formal menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 14 adalah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar. Pasal 17 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 17 ayat (2) menyatakan: Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Pendidikan Menengah. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Tinggi. Pasal 19 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Selanjutnya Pasal 20 menyatakan:

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain pasal 19 dan pasal 20, masih ada lagi lima pasal yang mengatur pendidikan Tinggi, yaitu pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Dan juga ada UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Jenis Pendidikan. Menurut Pasal 1 ayat (9) bahwa: Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 15 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Penjelasan Pasal 15 tersebut sebagai berikut:

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Satuan Pendidikan. Pada Pasal 16 UU RI No. 20 Tahun 2003 dinyatakan: Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Yang dimaksud Satuan Pendidikan menurut Pasal 1 ayat (10) UU RI No.20 Tahun 2003 adalah: adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pasal 53 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pendidikan Nonformal. Pendidikan nonformal menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) adalah: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya menurut Pasal 26 bahwa:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Informal. Pendidikan informal menurut Pasal 1 ayat (23) UU RI No.20 Tahun 2003 adalah: jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya Pasal 27 menyatakan:

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Jarak Jauh.

Pada Pasal 1 ayat (14) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah: suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya pasal 28 menyatakan:

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 28 ayat (1) : Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Penjelasan pasal 28 ayat (3): Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Pendidikan Kedinasan. Ketentuan Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2003 sebagai berikut:

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Keagamaan. Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Jarak Jauh. Yang dimaksud pendidikan jarak jauh menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) UU RI No. 2003 adalah: pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar

melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Selanjutnya menurut pasal 31 bahwa:

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum. Pada Pasal 1 ayat (19) UU RI No.20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah: seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 36, 37, dan 38 UU RI No. 20 Tahun 2003 mengatur tentang kurikulum.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa.

- b. peningkatan akhlak mulia.
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan.
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
 - f. tuntutan dunia kerja.
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - h. agama.
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama.
 - b. pendidikan kewarganegaraan.
 - c. bahasa.
 - d. matematika.
 - e. ilmu pengetahuan alam.
 - f. ilmu pengetahuan sosial.
 - g. seni dan budaya.
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga.
 - i. keterampilan/kejuruan.
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Bahasa Pengantar. Pada pasal 33 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijelaskan:

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Peserta Didik. Pasal 1 ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik adalah: anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik memiliki hak sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003: (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Disamping memiliki hak, peserta didik juga memiliki kewajiban sebagaimana pasal 12 ayat (2): Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa: Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (4) menyatakan: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (Pasal 1 ayat (6) UU RI No.20 Tahun 2003). Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.(Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 20 Tahun 2003. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat enam pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pasal 39,40,41,42,43,dan 44. (baca sendiri).

5. Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan Pendidikan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ditegaskan pada pasal 45 UU RI No. 20 Tahun 2003, yaitu:

- 1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- 2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendanaan. Dalam UU RI No.2 Tahun 2003 pasal 46, 47,48, dan 49 dijelaskan tentang pendanaan.

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Pendidikan. Tentang pengelolaan pendidikan dijelaskan pada pasal 50, 51, dan 52 UU RI No.20 Tahun 2003.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

- dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
 - (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan dijelaskan pada pasal 54, 55, dan 56 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6. Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, dan Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi. Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan

Selanjutnya pasal 58 menyatakan:

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Akreditasi. Tentang akreditasi dinyatakan pada pasal 60 UU RI No. 20 Tahun 2003:

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sertifikasi. Pasal 61 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
- (2) tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (3) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

7. Wajib Belajar. Pasal 34 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sekarang ini telah diselenggarakan wajib belajar 9 tahun atau wajib pendidikan dasar. Artinya, setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan dasar ini dapat berbentuk SD/MI atau yang sederajat (paket A) serta SMP/MTs, atau yang sederajat (paket B).

B. Standar Nasional Pendidikan MI/SD

Pembahasan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) bersumber pada PP No. 19 Tahun 2005.

1. Pengertian, lingkup, fungsi, dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan.

Pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 bahwa Standar Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi.
- b. standar proses.
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. standar sarana dan prasarana.
- f. standar pengelolaan.
- g. standar pembiayaan.
- h. standar penilaian pendidikan. (Pasal 2 ayat (1). Fungsi Standar Nasioal Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. (Pasal 3). Adapun tujuan Standar Nasional Pendidikan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Pasal 4).

2. Standar Isi

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi
- (2) untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan.
 - b. Kepribadian.
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. kelompok mata pelajaran estetika.
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga.
 - f. kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam

pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

3. Standar Proses

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya mengenai standar proses diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 Tahun 2007. (Baca sendiri).

4. Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pasal 27

1. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik.
 - b. Kompetensi kepribadian.
 - c. Kompetensi profesional.
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

Pasal 30

- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Selanjutnya mengenai standar kualifikasi dan kompetensi guru ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007 (baca sendiri).

Tenaga Kependidikan.

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan

- d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Sebagaimana tertuang pada pasal 38 ayat (5) bahwa kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya tentang tentang Standar Kepala sekolah/madrasah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007 (baca sendiri).

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya tentang standar pengawas sekolah/madrasah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 12 Tahun 2007 (baca sendiri).

6. Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan meliputi pengelolaan oleh Satuan Pendidikan (pasal 49 s/d 58), pengelolaan oleh Pemerintah Daerah (pasal 59), dan pengelolaan oleh Pemerintah (pasal 60 dan 61). Berikut ini hanya akan dibahas tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan.

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus.
 - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan.
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik.
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
 - f. Peraturan akademik.
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

- h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
 - (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
 - (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
 - (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya.
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya.

- e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran.
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus

mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

8. Standar Pembiayaan

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

9. Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik.
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:

- a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. kelompok mata pelajaran estetika.
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan.
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan.
- d. pembinaan dan pemberian bantuan

kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata

- pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan untuk penjaminan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

DASAR RELIGIUS PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Agama merupakan dasar yang paling utama dalam pendidikan, sebab agama merupakan dasar yang dicitakan oleh Allah SWT, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Dasar agama itu berupa firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang berupa tuntunan untuk kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat, serta *rakhmatan lil alamin*.

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan Pendidikan

Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikh al-Azhar, menyebut al-Qur'an kitab pendidikan.¹⁴⁸

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Pendidikan Islam memiliki empat ruang lingkup, yaitu (1) ruang lingkup akidah Islam, (2) ruang lingkup pembersihan diri dan moralisasi, (3) Ruang lingkup intellectual building dan pengembangan ilmu keislaman, dan (4) ruang lingkup profesionalisme.¹⁴⁹

1. Ruang lingkup pertama, bahwa orientasi pendidikan Islam diarahkan pada internalisasi nilai keimanan akan ke-mahakuasaan dan ke-esa-an. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 164,

¹⁴⁸ Mahmud Arif, dkk, *Al-Qur'an dan Pembelajarannya*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006, hal. 24. Lihat juga Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 154.

¹⁴⁹ *Ibid.*

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata".

2. Ruang lingkup kedua, pendidikan Islam menekankan pada upaya membersihkan dan pensucian diri subyek didik dari segala sifat dan sikap negatif. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah: 129 dan Q.S. At-Tahrim ayat 6.

Q.S. Al-Baqarah: 129. "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka".

Q.S. At-Tahrim: 6. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

3. Lingkup ketiga, Pengembangan ilmu, terutama ilmu keagamaan.

Q.S. al-Alaq ayat 1-5.

- 1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,*
- 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.*
- 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,*
- 4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,*
- 5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengisyaratkan membaca itu harus dilakukan secara maksimal sehingga memperoleh kemampuan. Disamping itu ayat ini juga mengisyaratkan mengulang-ulang bacaan *bismi Rabbik*

(demi Allah) akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru.¹⁵⁰

Q.S. Al-Mujadilah ayat 11.

".....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".

4. Lingkup keempat, Profesionalisme. Pendidikan Islam mengharuskan untuk membekali subyek didik wawasan pengetahuan yang memadai, terlebih menyangkut profesi yang akan ditekuninya, dan ketrampilan mempraktikkan dan mengaplikasikan secara cepat dan tepat.

Qs. al-Jumua: 2

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata".

Q.S. Ar-Ra'd ayat 11.

"....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan^[768] yang ada pada diri mereka sendiri....".

Q.S. Al-Isra' ayat 37.

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung".

C. Hadits yang terkait dengan Pendidikan

Terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, artinya demikian:

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, Hal. 434.

" Carilah ilmu mulai dari buaian sang Ibu sampai keliang lahat (meninggal)."

Demikian pula, Hadits Nabi tentang kewajiban mencari ilmu:

" Mencari ilmu diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan" (HR. Bukhori Muslim)."

Agar manusia tidak tersesat, terutama bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW berpesan melalui Hadits yang artinya,

"Telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau memegang teguh keduanya, engkau tidak akan tersesat, kedua perkara itu adalah Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Nabi (Al Hadits)."

Pada Landasan Agama terdapat pula tuntunan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat, sebagaimana pada Hadits Nabi Muhammad SAW, artinya:

"Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akherat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya (kebahagiaan dunia dan akherat), maka dengan ilmu."

WAWASAN BELAJAR TIADA AKHIR

A. Pendahuluan

Hubungan antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perkembangan masyarakat yang cepat berubah menuntut juga perubahan dalam pendidikan, tidak terkecuali wawasan belajar masyarakat.

Dijelaskan oleh Noeng Muhadjir dalam bukunya *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial*, bahwa wawasan belajar berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sampai tahun 1950-an wawasan "cultural heritage", pewarisan budaya dan pendidikan menuju kekedewasaan masih diterima, bahkan di Indonesia sampai tahun 1960-an. Menurut wawasan ini bahwa tugas pendidik adalah mewariskan nilai-nilai budaya yang telah turun temurun kepada anak didik dan mempersiapkan anak menuju kekedewasaan

Pada tahun 1970-an lahir wawasan baru, yaitu "*Learning to be*", belajar untuk hidup. Wawasan ini lebih menekankan anak sebagai subjek. Pendidikan diarahkan ke kemampuan untuk hidup dalam konteks lingkungan.

Pada tahun 1980-an, muncul wawasan lebih baru lagi, yaitu wawasan "*no limits to study*", belajar tiada akhir.¹⁵¹ Berikut ini akan dibahas tentang makna dan prospek wawasan belajar tiada akhir tersebut.

B. Makna Wawasan Belajar Tiada Akhir

Menurut Noeng Muhadjir, "*no limits to study*", belajar tiada akhir tidak hanya memiliki makna sekedar sepanjang hayat, dan tidak sekedar belajar untuk hidup. Tetapi wawasan

¹⁵¹ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993 hal. 51.

belajar tiada akhir paling tidak memiliki tiga makna, yaitu; (1) pengembangan optimal kemampuan manusia, (2) pengembangan optimal kreasi wahana kehidupan manusia, dan (3) pengembangan optimal kesejahteraan manusiawinya manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan.¹⁵² ✓

Makna *pertama*, wawasan belajar tiada akhir adalah pengembangan optimal kemampuan manusia. Manusia memiliki berbagai kemampuan atau potensi. Howard Gardner menjelaskan terdapat berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, antara lain:

- (1) Visual/spatial intelligence;
- (2) Verbal/linguistic intelligence;
- (3) Logical/mathematical intelligence;
- (4) Bodily/kinesthetic intelligence;
- (5) Musica/rhythmic intelligence;
- (6) Interpersonal intelligence;
- (7) Intrapersonal intelligence.¹⁵³

Dengan demikian, guru dituntut dapat mengembangkan berbagai kemampuan tersebut dalam pembelajaran. Jika guru mampu mengembangkan berbagai kemampuan tersebut dalam diri peserta didik secara komprehensif, tentu peserta didik akan berkembang menjadi insan yang utuh kepribadiannya dan intelektualitasnya.

Makna *kedua*, pengembangan kreasi wahana kehidupan manusia. Negara-negara maju biasanya selalu menjadi pemenang sedang negara-negara berkembang biasanya menjadi pecundang. Mengapa demikian ?. Amin Rais menjelaskan bahwa negara-negara maju memonopoli lima bidang: a) teknologi, b) pasar uang dunia, c) kekuasaan untuk memanfaatkan sumber alam, d) media komunikasi, dan e) senjata penghancur massal.¹⁵⁴ Ciri lain masyarakat maju dan

¹⁵² *Ibid*, hal. 52.

¹⁵³ Suyanto, *Tantangan Profesional Guru di Era Global*, Yogyakarta: UNY, 2007, hal. 18.

¹⁵⁴ Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007, hal. 4.

terbelakang adalah yang satu menguasai alam dan yang lain dikuasai oleh alam.

Oleh karena itulah diperlukan pendidikan yang mampu merespon hal tersebut. Zamroni¹⁵⁵ menawarkan model pendidikan yang memiliki tiga karakteristik utama; a) keutuhan (kualitas output pendidikan yang utuh), b) keragaman (keanekaragaman proses pendidikan), dan c) kemandirian.

Makna *ketiga*, pengembangan optimal kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan pribadi yang bermartabat, sejahtera lahir dan batin, sejahtera duniawi dan ukhroni. Sejahtera karena pribadinya diakui, harkatnya dihargai, keyakinan agamanya dihormati, amal baiknya benuh rahmat dan berkah.

C. Prospek Wawasan Belajar Tiada Akhir

Keberadaan manusia dimulai dari masa konsepsi, yaitu bertemunya sperma dan ovum, lalu tumbuh dan berkembang manusia. Dalam pertumbuhannya manusia pada saatnya akan mengalami apa yang disebut *fixasi* bahkan akan mengalami kemunduran bahkan kerusakan fisiknya. Sedangkan dalam perkembangannya tidak seperti seperti pertumbuhan, artinya meskipun secara fisik atau biologis mengalami ketuaan tetapi kemampuan psikis (intelektual) tidak selalu mengalami kemunduran, bahkan sangat mungkin terjadi peningkatan apabila seseorang mampu mengerahkan dan mengorganisasikan intelektualnya dengan cara baru.

Hasil penelitian Mc Geoch menjelaskan bahwa prestasi belajar pada orang dewasa naik lebih cepat untuk hal-hal yang lebih abstrak, dan naik lebih lambat untuk yang konkret. McGeoch juga menyimpulkan lagi; semakin bertambah usia orang dewasa semakin luas, beragam, dan tinggi kualitas prestasinya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 9.

¹⁵⁶ Noeng Muhadjir, *Ilmu...*, hal. 41.

Dengan menggunakan melakukan latihan dan praktek, taktik dan strategi baru maka kecakapan intelektual seseorang dapat dikembangkan. Klein (1970) mengidentifikasi berbagai aspek yang dapat dipakai untuk mengembangkan pola, taktik, dan strategi, atau organisasi pengetahuan seseorang. Misalnya, dengan cara langsung mengimpor pendapat orang lainnya, memasukkan dalam kerangka pemikiran sendiri, meminimalkan keragaman, perbedaan sangat rinci, menelaah dengan luas, dan menelaah dengan mendalam.¹⁵⁷

Berbagai aspek tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan pola, taktik, organisasi, gaya kecakapan intelektual sehingga perkembangan intelektual dapat dipertahankan terus naik untuk jangka tertentu.

Jadi, makna yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas adalah wawasan belajar tiada akhir itu memberi suatu harapan, karena prestasi manusia tetap dapat ditingkatkan, tetap dapat dioptimalkan, sejauh ada upaya dari yang bersangkutan untuk mengembangkan pola, taktik, strategi belajarnya.

¹⁵⁷ *Ibid*,

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Pada bab ini akan dibahas empat permasalahan pendidikan yaitu masalah pemerataan, efisiensi, relevansi, dan mutu pendidikan.

A. Pemerataan Pendidikan

Pendidikan bagi suatu bangsa berfungsi sebagai wahana mengembangkan peradaban bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan memberi akses yang luas bagi warga negara untuk memperoleh hak pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan.

Pemerataan pendidikan adalah terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan sebagai wahana membangun sumber daya yang berkualitas sebagai modal pembangunan bangsa.

Menurut Sukarso sebagaimana dikutip kembali oleh Tim Lapis, masih banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah pemerataan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah siswa-siswi yang melanjutkan sampai perguruan tinggi sesuai dengan waktunya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2. Jenjang Siswa-Siswi yang Melanjutkan pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi.¹⁵⁸

	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PT
	5,410,496 SB			
1988/89	100 %			
	66.1 L			

¹⁵⁸ Abdul Kadir, dkk, *Dasar-Dasar Kependidikan*, LAPIS PGMI, 2009, hal. 13.

1994/95		44.2 SB		
		39.2 L		
1997/98			29.2 SB	
			26.2 L	
2000/01				34.4 SB

Keterangan: SB Siswa Baru, L Lulus.

Persoalan tersebut juga karena persoalan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Menurut Laporan BPS Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen), memang jumlah penduduk miskin berkurang 0,89 juta orang. Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang (0,45 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (0,60 persen) Tabel berikut:

Tabel. 3
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2011-Maret 2012

Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bln)					
Daerah/Tahun	Makana n	Bukan Makanan	Total	Jumlah Pendudu k Miskin (Juta)	Persentas e Pendudu k Miskin
1	2	3	4	5	6
Perkotaan					
2011	177 342	75 674	253 016	11,05	9,23
2012	187 194	80 213	267 408	10,65	8,78
Perdesaan					

2011	165 211	48 184	213 395	18,97	15,72
2012	177 521	51 705	229 226	18,48	15,12
Perkotaan + Perdesaan					
2011	171 834	61 906	233 740	30,02	12,49
2012	182 796	65 910	248 707	29,13	11,96

Dari Tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masing tinggi sehingga masih membutuhkan penanganan yang serius karena kemiskinan juga berpengaruh terhadap pendidikan satu bangsa. Akibat kemiskinan dapat berdampak pada putus sekolah baik sekolah dasar maupun menengah.

Masalah pemerataan pendidikan menjadi persoalan yang penting karena mutu pendidikan ditentukan oleh adanya pemerataan ini pemerintah meningkatkan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Artinya semua anak Indonesia minimal berpendidikan Sekolah menengah. Kesuksesan wajib belajar tersebut tidak lepas dari persoalan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat besar dalam menuntaskan program wajib belajar tersebut.

Pemerataan pendidikan memiliki tujuan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga selanjutnya usaha berikutnya adalah peningkatan mutu pendidikan.

B. Efisiensi Pendidikan

Pada proses pendidikan akan lebih baik jika memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Masalah efisiensi pendidikan terkait dengan sistem pendidikan dalam mendayagunakan sumber daya yang ada untuk tujuan

pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran efisiensinya tinggi jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya rendah. Pendidikan disebut efisien apabila hasil yang dicapai maksimal, dengan biaya yang wajar, karena biaya merupakan ukuran efisien dalam proses pendidikan terutama apabila dalam proses pendidikan dapat menghasilkan *output* pendidikan dengan biaya yang efisien.

Efisiensi pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjuk pada hubungan *out put* (hasil belajar) dan *input* (sumber daya) yang diproses untuk mengasilkan *out put*. Dengan demikian, efisiensi internal diukur dengan biaya-efektivitas. Sedangkan efisiensi eksternal adalah menunjukkan biaya yang berhubungan dengan pemanfaatan biaya dalam kurun waktu untuk menghasilkan tamatan. Dengan demikian, efisiensi eksternal merupakan analisis manfaat biaya pendidikan.

Oleh karena itu dapat bahwa efisiensi pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam membentuk lembaga pendidikan yang efektif sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu proses pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan waktu yang sedikit.

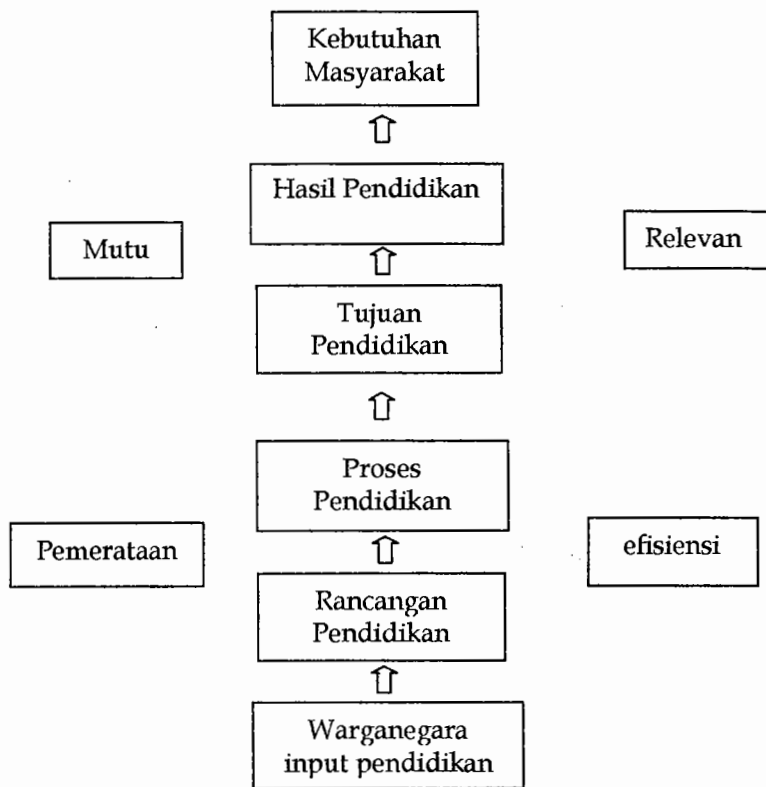
C. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan adalah kesesuaian program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penggunaan pendidikan, artinya apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dapat di nikmati hasilnya oleh masyarakat.

Tujuan peningkatan relevansi pendidikan adalah agar hasil pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, artinya pendidikan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, baik untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tuntutan kerja produktif, atau berkehidupan dalam masyarakat. Peningkatan

relevansi harus disesuaikan dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Menurut Tirtaraharja, relevansi pendidikan itu terkait dengan masalah pemerataan, mutu, dan efisiensi pendidikan, yang akhirnya pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang handal. Hubungan relevansi dengan pemerataan, mutu, dan efisiensi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Relevansi Pendidikan. Sumber Abdul Kadir, dkk

Uraian dari gambar tersebut bahwa keinginan sebelum dilakukan pembangunan pendidikan adalah diawali dengan pemerataan pendidikan, proses pembangunan pendidikan dan muaranya adalah pada mutu pendidikan.

D. Mutu Pendidikan

Bank Dunia memberi laporan penelitian, bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh faktor; (1) *innovation and creativity* (45 %), (2) *netwokin* (25 %), *technology* (20 %), dan (4) *natural resources* (10 %).¹⁵⁹ Artinya, pada era Globalisasi seperti sekarang ini penguasaan sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara.

Pendidikan merupakan wahana yang strategis untuk melahirkan sumber daya manusia. Artinya, hanya pendidikan yang bermutu atau handal yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada. Kenyataannya, pendidikan kita belum menggembirakan. Hal tersebut berdasarkan data dari United Nation Development Programme (UNDP) yang dikeluarkan pada 2 November 2011 dalam Human Development Index. Indonesia di posisi 124 di bawah Filipina. Tahun lalu kita di ranking 108. Memang di tahun 2011 ini jumlah negara yang ikut bertambah menjadi 187 negara dari tahun lalu yang hanya 169. Kita turun dari tahun lalu," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam jumpa pers di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta (8/11/2011).

Menurut Slamet PH, sumber penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita adalah aspek pengelolaan atau manajemen. Secara internal hal tersebut disebabkan oleh penerapan pendekatan *input-output* yang keliru.¹⁶⁰ Terlalu mengedepankan aspek *input* pada semua penyelesaian pendidikan di sekolah. Seakan-akan mutu pendidikan akan

¹⁵⁹ Suyanto, *Tantangan Profesional Guru di Era Globalisasi*, Yogyakarta: UNY, 2007, Hal. 12.

¹⁶⁰ Suyanto dan M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta: Adicita, 2001, Hal. 65.

meningkat dengan sendirinya apabila *input* ditambahkan, misalnya, kurang guru tambah guru, belum memiliki laboratorium ditambah laboratorium, belum punya perpustakaan dibangun perpustakaan dan lain sebagainya. Yang dilupakan adalah bagaimana aspek *input* dipertemukan dan berinteraksi dalam proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran di kelas, dilihat dari sisi guru, harus mengalami perubahan, dari sekedar menyampaikan informasi atau transfer pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa bergeser pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar. Ini artinya, siswa yang aktif bukan guru yang aktif. siswa akan aktif belajar manakala ia memiliki minat belajar. Oleh karena itu supaya siswa minat belajar maka bahan ajar tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa.

Jadi mutu pendidikan, dilihat dari sudut guru, diperlukan guru-guru yang memiliki profesional tinggi. Sedang dilihat dari Kepala sekolah juga diperlukan kepala sekolah yang memiliki profesional tinggi. Hal yang demikian ungkapkan oleh Slamet PH, bahwa rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh aspek pengelolaan yang kurang profesional, baik pengelolaan kelas maupun pengelolaan sekolah.¹⁶¹

¹⁶¹ *Ibid*, Hal. 67

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

A. Pendahuluan

Praktek korupsi, penipuan, berkurangnya rasa malu melakukan tindak tercela, pembunuhan, pencurian, dan tindak kriminal lainnya yang terjadi di tengah masyarakat kian hari terus bertambah. Suasana damai, tenteram, dan teratur sebagaimana yang pernah terjadi beberapa tahun lalu sangat jarang dijumpai di tengah masyarakat. Praktek tindak kriminal dan perilaku tidak terpuji tersebut di atas tampaknya menandai semakin longgarnya komitmen masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur dan keagamaan yang dianutnya. Kenyataan ini membuktikan terjadinya pergeseran kesadaran sebagian masyarakat akan kepribadian sehat menuju kepribadian yang sakit.

Selain itu, ajakan untuk berhati-hati berhadapan dengan diri dan masyarakat (*waspada*), bersikap realistis dan tabah menghadapi cobaan (*sabar*), serta ingat akan asal-usul kehidupan (*eling*) yang terjadi antar individu mulai jarang terjadi. Juga ungkapan-ungkapan "*Saru* " dan "*isin*" (Jawa), dan ungkapan lain yang senada mulai jarang terucap dari mulut masyarakat. Krisis kepribadian itulah yang saat ini terjadi di tengah masyarakat.

Tampaknya fakta tersebut di atas semakin memperkuat pernyataan Koentjoroningrat bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki rasa percaya diri, disiplin murni, dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab sendiri. Watak seperti itulah inti dari krisis kepribadian bangsa saat ini.¹⁶² Dengan

¹⁶²Koentjaraningrat, 1983. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. 1983, (Jakarta: Gramedia, hal.51.

kata lain, fakta melemahnya komitmen masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur agama memperkuat kenyataan bahwa telah terjadi perubahan orientasi kepribadian, dari kepribadian sehat berbasis nilai keagamaan menuju kepribadian tidak sehat berbasis perubahan dan ketidakpercayaan diri.

Selain itu, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia telah menawarkan solusi bagi masyarakat. Sayangnya, ajaran Islam seperti tidak mampu memberi pengaruh yang *signifikan* terhadap krisis kepribadian yang melanda masyarakat. Boleh jadi pesan-pesan keagamaan sudah diterima oleh masyarakat secara komprehensif, hanya saja pendekatan pendidikan atau proses internalisasi nilai-nilai keagamaan tidak relevan dengan budaya masyarakat Indonesia sehingga terkesan antara ajaran Islam dengan komitmen masyarakat terhadap kepribadian mereka saling berdiri sendiri.

Oleh karena itu dalam pembangunan karakter bangsa perlu ditata kembali tentang perlunya Pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter menurut Lickona, menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan karakter, yaitu; pengertian atau pemahaman, perasaan, dan tindakan.¹⁶³ Ketiga unsur ini saling berkaitan. Guru perlu memperhatikan ketiga unsur ini agar nilai-nilai karakter yang ditanamkan tidak sekedar sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar menjadi tindakan-tindakan yang berkarakter. Pendidikan karakter menjadi tanggungjawab lembaga keluarga, sekolah dalam masyarakat. Dalam makalah ini pembahasannya difokuskan pada pendidikan karakter di sekolah, yang fokus pembahasannya pada persoalan apa inti program yang diberikan dalam pendidikan karakter di Sekolah, bagaimana strateginya, apa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Pembahasan ini dipilih karena sekolah merupakan wahana strategis bagi pendidikan karakter

¹⁶³ C. Asri Budiningsih 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 6.

yang pada gilirannya melahirkan peserta didik yang memiliki karakter bagi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dan pembentukan karakter bangsa, yang ini semua merupakan isu kontemporer pendidikan (Islam).

B. Pengertian dan Urgensinya Pendidikan Karakter.

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan menurut Azyumardi Azra adalah merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.¹⁶⁴ Bahkan menurut beliau pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, pendidikan sebagai suatu proses transfer ilmu, transef nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menampilkan nilai (benar-salah, baik-buruk) baik secara eksplisit maupun implisit.¹⁶⁵ Jadi pendidikan karakter adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan tujuan hidupnya yang menampilkan perilaku bernilai baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan menurut Doni Koesoema, pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri.¹⁶⁶ Bagi Doni Koesoema, bahwa pendidikan karakter harus bersifat membebaskan (*liberatif*). Alasannya, hanya dalam kebebasannya individu "dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka"¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 3.

¹⁶⁵ Al Wisol., *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Pres, 2007, hal. 8.

¹⁶⁶ Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Grasindo), 2007, hal. 194.

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 123.

Jadi, pendidikan karakter berkaitan terutama dengan bagaimana seorang individu menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain sebagai individu, maupun dengan orang lain sebagai individu yang ada di dalam sebuah struktur yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu pendidikan karakter tidak semata-mata individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial-struktural, meskipun pada akhirnya yang menjadi kriteria penentunya adalah nilai-nilai kebebasan individual yang sifatnya personal.

2. Urgensi Pendidikan karakter.

Menurut Thomas Lickona (1992), terdapat sembilan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa antara lain:

- 1). meningkatnya kekerasan di kalangan remaja.
- 2). ketidakjujuran yang membudaya.
- 3). semakin rendah rasa tidak hormat kepada kedua orang tua, guru dan figure pemimpin.
- 4). meningkatnya kecurigaan dan kebencian.
- 5). penggunaan bahasa yang memburuk.
- 6). penurunan etos kerja.
- 7). menurunnya rasa tanggung-jawab individu dan warga negara.
- 8). meningkatnya perilaku merusak diri.
- 9). semakin kaburnya pedoman moral.¹⁶⁸

Bila dicermati dari kesembilan tanda-tanda di atas, berapa point yang sudah muncul di bangsa Kita ? Rasanya hampir semua tanda tersebut sudah tampak di bangsa kita.

Pada tahun 60- an atau awal tahun 70-an, betapa terhormatnya guru. Datang ke sekolah baru sampai di halaman murid-murid sudah berhamburan menjemput. Tasnya dibawakan, sepedanya "dituntunkan" (jawa). Bila ada

¹⁶⁸http://www.jsit.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=73, 25/3/2010.

pertemuan di kampung atau resepsi pernikahan selalu diberi tempat di barisan depan. Murid-murid selalu membungkuk bila bertemu sebagai tanda hormat. Tetapi fenomena ini sedikit demi sedikit luntur di telan zaman seiring dengan majunya era pengetahuan dan teknologi dan tergesernya nilai-nilai moral, sosial serta ekonomi.

Di akhir tahun 90-an gagasan tentang menata kembali akhlak dan karakter anak didik muncul dengan nama pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter. Banyaknya anak tawuran di tingkat sekolah menengah pertama dan atas menjadi indikator gagalnya pendidikan akhlak, moral dan budi pekerti di tingkat dasar. Di lingkungan sekolah, adat sopan dan santun serta perilaku ramah semakin luntur. Tindak kekerasan semakin menonjol. Kata-kata jorok dan kurang enak didengar sangat ringan keluar dari mulut anak didik.

Gambaran lain, adalah Herien Puspitasari (Disertasi Doktor IPB), mempublikasikan hasil penelitiannya di Kompas Cyber Media 18/05/2006). Dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada tahun 2002-2003, dengan menggunakan responden sejumlah 667 siswa (550 siswa Sekolah Negeri & 117 siswa Sekolah Swasta), 540 putra dan 127 putri, semuanya berasal dari siswa kelas 2 SMA dan SMK di Bogor. Mendapatkan hasil yang mencengangkan: Dari 667 responden tersebut, tidak kurang 10 persen para responden sudah melakukan hubungan seks bebas.

Jumlah pengguna narkoba di lingkungan pelajar SD, SMP, dan SMA pada tahun 2006 mencapai 15.662 anak. Rinciannya, untuk tingkat SD sebanyak 1.793 anak, SMP sebanyak 3.543 anak, dan SMA sebanyak 10.326 anak. Dari data tersebut, yang paling mencengangkan adalah peningkatan jumlah pelajar SD pengguna narkoba. Pada tahun 2003, jumlahnya baru mencapai 949 anak, namun tiga tahun kemudian atau tahun 2006, jumlah itu meningkat tajam menjadi 1.793 anak¹⁶⁹.

¹⁶⁹<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/15/129378/68/11/Menata-Ulang-Pendidikan-Karakter-Bangsa>, 22/3/2010.

Mochtar Lubis (dalam Tilaar, 2003) menyatakan bahwa situasi kebudayaan kita (mungkin sampai saat ini masih dominan) ditandai oleh berbagai ciri; 1) terdapat kontradiksi antara asumsi dan pretensi moral budaya Pancasila dengan kenyataan di dalam masyarakat; 2) sikap hidup yang penuh kemunafikan yang ditandai dengan “lain kata lain perbuatan”; 3) lemahnya kreativitas; 4) etos kerja yang lemah; 5) sikap neo-feodalisme; budaya malu yang mulai sirna.¹⁷⁰

Dalam buku Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, disebutkan berbagai permasalahan yang dihadapi Bangsa saat ini; yaitu (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofis dan ideologi Bangsa, (2) keterbatasan Perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensial Pancasila, (3) bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.¹⁷¹

Dari berbagai hal tersebut, Pertanyaanya adalah apakah bangsa kita akan mengalami kehancuran ? Jawabnya bisa terjadi kehancuran apabila tidak dilakukan perbaikan. Bila pendidikan diyakini dapat memperbaiki karakter bangsa, maka peran pendidikan (pendidikan karakter) menjadi suatu yang harus diperhatikan. Salah satu unsur yang penting dalam pendidikan (sekolah) dalam rangka pembentukan karakter peserta didik adalah guru, yaitu “guru yang berkarakter”.

Pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh pedagog Jerman F.W. Foester (1869-1996).¹⁷² Lahirnya pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai usaha untuk

¹⁷⁰ H.A. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesiatara, 2003, hal. 38. Lihat Mochtar Lubis “Situasi dan Akar Budaya Kita”, dalam Agus R. Sarjono (ed), *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*, Jakarta: Gramedia, 1999, hal. 13-43.

¹⁷¹ Pemerintah RI, *Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, 2010, hal. 16-19.

¹⁷² Doni Koesoema, *Pendidikan* hal. 42.

menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori filsuf Prancis Auguste Comte. Bagi Foerster, bahwa perkembangan manusia tidak hanya tunduk pada hukum alamiah saja, tetapi kebebasan yang dimiliki manusia memungkinkan dia menghayati kebebasan dan pertumbuhannya dalam tata aturan yang sifatnya mengatasi individu, dalam tata aturan nilai-nilai moral. Pedoman nilai merupakan kriteria yang menentukan kualitas tindakan manusia. Kualitas tindakan manusia dalam menghadapi perubahan merupakan karakter seseorang. Sehingga karakter sesungguhnya adalah identitas yang mengatasi pengalaman yang selalu berubah. Oleh karena itu kematangan karakter inilah kualitas seseorang pribadi diukur. Kekuatan karakter seseorang dalam pandangan Forster nampak dalam empat ciri yang fundamental, yaitu; 1) keteraturan interior melalui mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, 2) koherensi yang memberikan keberanian melalui mana seseorang dapat teguh pada prinsip atau tidak takut resiko, 3) otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan nilai-nilai luar pada dirinya, dan 4) keteguhan dan kesetiaan.¹⁷³ Kematangan keempat karakter ini, memungkinkan seseorang melewati tahap individualitas menuju "personalitas".

Di Indonesia pendidikan karakter sudah digagas oleh pendahulu –pendahulu kita, antara lain seperti; R.A. Kartini, Ki Hadjar Dewantoro, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Moh. Natsir, dll.¹⁷⁴ Mereka telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka alami.

Dalam perjalanannya, pendidikan karakter mengalami timbul tengelam. Pada masa orde lama, untuk membantu pembentukan karakter bangsa Pendidikan Budi Pekerti masuk menjadi salah satu pelajaran dalam kurikulum SD 1974,

¹⁷³ *Ibid*, hal. 42-44.

¹⁷⁴ *Ibid*. Hal. 44.

Pendidikan Budi Pekerti lantas digabung dengan Pendidikan Agama dalam kurikulum 1964 dengan nama Agama/Budi Pekerti, juga ada mata pelajaran khusus tentang kewarganegaraan yang sering disebut *civics*.¹⁷⁵

Pada masa Orde Baru, bahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dicoba dibudayakan dengan lebih sistematis lagi dengan cara mewajibkan mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan Pancasila (P4), dan diadakan sebuah mata pelajaran khusus, yaitu kewarganegaraan Negara Indonesia, Pendidikan Moral Pancasila (PMP).¹⁷⁶

Usaha-usaha ini ditujukan bagi pembentukan watak bangsa. Pendidikan Budi Pekerti memang timbul tenggelam dalam pendidikan nasional kita. Berbagai macam cara memandang pendidikan budi pekerti, entah itu dianggap sebagai mata pelajaran khusus, atau mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain, menunjukkan bahwa bangsa ini sebenarnya memiliki keprihatinan yang mendalam tentang pembentukan karakter bangsa. Situasi ini sesungguhnya menantang kita untuk kembali dapat meletakkan dan memahami pendidikan karakter bagi pembentukan kepribadian bangsa.

Pendidikan karakter menyangkut unsur pengertian atau pemahaman, emosi, dan tindakan. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan karakter penting karena;

- 1) Ada kebutuhan yang jelas dan mendesak, anak-anak muda kini semakin banyak yang melukai diri sendiri dan orang lain karena ketidaksadaran dan/atau ketidakpedulian terhadap nilai-nilai moral.
- 2) Transmisi nilai-nilai moral kepada generasi berikutnya adalah salah satu fungsi yang paling penting dari sebuah peradaban.
- 3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter bahkan lebih penting ketika jutaan anak-anak hanya mendapat sedikit

¹⁷⁵ *Ibid.* Hal. 49.

¹⁷⁶ *Ibid.* hal. 50.

ajaran moral dari orang tua, masyarakat, atau lembaga-lembaga keagamaan.

- 4) Kebersamaan terjadi di atas nilai-nilai moral yang diterima secara universal seperti kepedulian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab.
- 5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus terhadap pendidikan moral karena demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat sendiri.
- 6) Tidak ada yang namanya pendidikan bebas-nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan nilai. Sekolah selalu mengajarkan nilai-nilai sehari-hari dengan terencana.
- 7) Komitmen untuk pendidikan karakter itu penting sekali jika kita ingin menarik dan mempertahankan guru yang baik.
- 8) Pertanyaan moral adalah salah satu pertanyaan terbesar yang dihadapi individu dan umat manusia.
- 9) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih madani, peduli masyarakat dan mengarahkan kepada peningkatan kinerja akademis.¹⁷⁷

C. Nilai-Nilai Program Pendidikan Karakter

Jika pendidikan karakter melibatkan di dalamnya berbagai macam nilai (nilai agama, nilai moral, nilai umum, dan nilai-nilai kewarganegaraan), persoalan pokok muncul berkaitan dengan internalisasi nilai dalam pendidikan karakter, terutama terkait dengan penulisan nilai. Siapa yang berwenang untuk menentukan bahwa nilai tertentu itu layak masuk dan menjadi materi bagi pendidikan karakter di sekolah ?. Sudah barang tentu lembaga pendidikan itu sendiri. Namun, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan semacam panduan bagi pendidikan karakter, sebab negara berkepentingan agar keutuhan bangsa dapat terjaga.

¹⁷⁷ Kharudin Bashori, " Menata Ulang Pendidikan Karakter di Sekolah" *Makalah* untuk Kuliah Psikologi Transpersonal S3 Psikologi Pendidikan Islam, UMY, 2010.

Nilai-nilai yang dapat diambil secara garis besar dan dapat dikembangkan menurut Doni Koesoema antara lain; 1) nilai keutamaan, 2) nilai keindahan, 3) nilai kerja, 4) nilai cinta tanah air, 5) nilai demokrasi, 6) nilai kesatuan, 7) menghidupi nilai moral, dan 8) nilai-nilai kemanusiaan.¹⁷⁸ Sedangkan menurut Diane Tillman unit-unit nilai karakter meliputi; kedamaian, penghargaan, cinta, toleransi, kebahagiaan, tanggung jawab, kerjasama, kerendahan hati, kejujuran, kesederhanaan, kebebasan, dan persatuan.¹⁷⁹

Menurut Ratna Megawangi, ada 9 pilar karakter yang harus disampaikan kepada anak, yaitu ; 1) cinta Allah, dengan segala ciptaan-Nya, 2) kemandirian, tanggung jawab, 3) kejujuran, bijaksana, 4) hormat, santun, 5) dermawan, suka menolong, gotong royong, 6) percaya diri, kreatif, bekerjakeras, 7) kepemimpinan, keadilan, 8) baik hati, rendah diri, dan, 9) toleransi, kedamaian, kesatuan.¹⁸⁰

Indonesia Heritage Foundation, sebagaimana dikutip kembali oleh Abdul Madjid, merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter tersebut, yaitu; (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerjasama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, cinta damai dan persatuan.¹⁸¹

Jadi program pendidikan karakter di sekolah dapat dikembangkan melalui unit karakter antara lain; cinta Allah, dengan segala ciptaan-Nya, keindahan, kejujuran, kedamaian, keadilan, bijaksana, percaya diri, kreatif, bekerja keras, hormat,

¹⁷⁸ Doni Koesoema, *Pendidikan.....*, hal. 208-211.

¹⁷⁹ Diane Tillman, *Pendidikan Nilai untuk Anak Usia 8-14 Tahun*. Jakarta: Grasindo, hal, 2004, hal. xx-xxi.

¹⁸⁰ http://www.jsit.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=73, 25/3/2010.)

¹⁸¹ Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2011, hal. 42-43.

santun, rendah diri, kedermawanan, toleransi, suka menolong, persatuan, tanggung jawab, dan kemandirian.

D. Strategi Pendidikan Karakter.

Meminjam strategi pendidikan nilai, maka strategi pendidikan karakter meliputi 1) tradisional, 2) liberal, 3) keteladanan, dan 4) klarifikasi nilai.

Dalam kaitannya dengan mata pelajaran, pendidikan karakter dapat terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran, bukan suatu mata pelajaran tersendiri. Sehingga semua guru yang ada di sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap pembentukan karakter peserta didiknya.

Paul Suparno (dalam C. Budiningsih. 2004) mengemukakan ada empat model penyampaian pembelajaran karakter, yaitu; 1) model sebagai mata pelajaran sendiri, 2) model terintegrasi dalam semua bidang studi, 3) model di luar pengajaran, dan 4) model gabungan.¹⁸² Masing masing model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika pembelajaran karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, maka diperlukan kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, metodologi dan evaluasi pembelajaran tersendiri dan harus terjadwal secara terstruktur. Kelebihan model ini, pembelajaran lebih terfokus dan memiliki rencana yang matang untuk mestruktur dan mengukur hasil belajar peserta didik. Model ini akan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan kelemahan model ini adalah guru bidang studi yang lain merasa tidak bertanggung jawab. Dengan model ini ada kecenderungan pembelajaran karakter hanya diberikan sebatas kognitif saja.

Bila pembelajaran karakter menggunakan model terintegrasi dalam semua bidang studi, maka semua guru adalah pembelajar karakter tanpa terkecuali. Kelebihan model ini, semua guru merasa bertanggung jawab, dan pembelajaran

¹⁸² C. Asri Budiningsih 2004. *Pembelajaran.....*, hal. 2.

tidak sekedar informatif-kognitif melainkan bersifat terapan pada tiap bidang studi. Sedangkan kelemahannya, jika terjadi perbedaan persepsi tentang nilai-nilai karakter di antara guru, maka justru membingungkan para peserta didik.

Model pembelajaran di luar pengajaran, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pengajaran. Model ini lebih menekankan pengolahan dan penanaman karakter melalui kegiatan untuk membahas dan menupas nilai-nilai hidup. Peserta didik memahami nilai-nilai karakter melalui pengalaman-pengalaman konkret, sehingga nilai-nilai karakter tertanam dan terhayati dalam hidupnya. Namun demikian, bila pelaksanaan kegiatan ini hanya dilakukan setahun hanya sekali atau dua kali, maka kurang memperoleh hasil yang optima. Pembelajaran karakter demikian harus secara rutin dilaksanakan.

Pembelajaran karakter yang dilakukan dengan menggunakan model gabungan antara model terintegrasi dengan model di luar pengajaran, memerlukan kerjasama yang baik antara guru sebagai tim pengajar dan pihak-pihak luar yang terkait. Kelebihan model ini, semua guru terlibat dan bersama-sama dapat dan harus belajar dengan pihak luar untuk mengembangkan diri dan peserta didiknya. Kelemahan model ini adalah menuntut keterlibatan dari berbagai banyak pihak, memerlukan banyak waktu untuk koordinasi, banyak biaya, dan diperlukan kesepahaman yang mendalam apalagi melibatkan pihak di luar sekolah. Model pembelajaran karakter manapun yang akan digunakan di sekolah, diperlukan komitmen bersama antara guru-guru dan pengelola sekolah juga orang tua, agar pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan sekolah.

Pembelajaran karakter, bila dikaitkan dengan umur peserta didik, dapat dipergunakan dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran agar nilai-nilai karakter dapat terinternalisasi dalam dirinya. Menurut Diane Tilman, terdapat beberapa aktifitas dalam pembelajaran nilai karakter pada anak usia 8 sampai 14 tahun. Aktivitas-aktivitas tersebut antara

lain; melalui 1) berdiskusi/berbagi 2) menyanyikan sebuah lagu yang terkait dengan unit/nilai karakter, 3) membaca cerita dari buku, 3) latihan imajinasi, 4) aktivitas ekspresi seni, 5) menulis kreatif atau reflektif, dan 6) aktivitas membangun kerjasama atau membangun ketrampilan.¹⁸³

E. Prinsip-Prinsip Pendidikan karakter.

Menurut Thomas Lickona dkk (2007) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Khoiruddin Bashori¹⁸⁴ terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif: (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik, (2) definisikan 'karakter' secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter, (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral, (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakan mendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter, (10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, (11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

¹⁸³ Diane Tilman, 2004. *Pendidikan*, hal. xxiv.

¹⁸⁴ <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/15/129378/68/11/Menata-Ulang-Pendidikan-Karakter-Bangsa>, 22/3/2010.

Selanjutnya, pendidikan karakter dikembangkan dengan prinsip; (1) berkelanjutan, (2) melalui semua matapelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, (3) nilai dikembangkan melalui proses belajar bukan diajarkan dan (4) proses pendidikan dilakukan dengan peserta aktif dan menyenangkan.¹⁸⁵

Dalam pendidikan karakter, isi program penting sekali dikembangkan nilai-nilai inti seperti yang telah disebutkan di atas. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud mendefinisikannya atau memberikan pemahaman dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antar sesama manusia, dan mengapresiasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan di masyarakat. Yang terpenting sesungguhnya adalah semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap norma-norma perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.

Karakter yang baik mencakup pengertian akan pemahaman, kepedulian atau emosi, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai inti. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek pemahaman, emosional, dan perilaku dalam kehidupan moral. Peserta didik memahami nilai-nilai ini dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai. Peserta didik belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan mengembangkan keterampilan empati, mendiskusikan sesama kawan, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, berimajinasi, dan merefleksikan secara konkret ke dalam pengalaman hidupnya.

¹⁸⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun 2010*, Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dit. Ditki, 2010, hal. 11-13.

Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat diri mereka sendiri melalui jendela moral, untuk menilai apakah segala sesuatu yang berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik. Pendekatan yang komprehensif menggunakan semua komponen sekolah sebagai peluang untuk pengembangan karakter. Di samping itu, sekolah dan keluarga perlu meningkatkan efektivitas kemitraan. Kemitraan sekolah-orang tua ini dalam banyak hal sering kali tidak dapat berjalan dengan baik karena terlalu banyak menekankan pada penggalangan dukungan finansial, bukan pada dukungan program. Berbagai pertemuan yang dilakukan tidak jarang terjebak kepada sekadar tawar-menawar sumbangan, bukan bagaimana sebaiknya pendidikan karakter dilakukan bersama antara keluarga dan sekolah.

Pendidikan karakter akan berjalan efektif bila menyertakan usaha untuk menilai kemajuan. Menurut Khoirudin Bashori, terdapat tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian: (1) karakter sekolah: sampai sejauh mana sekolah menjadi komunitas yang lebih peduli dan saling menghargai? (2) Pertumbuhan staf sekolah sebagai pendidik karakter: sampai sejauh mana staf sekolah mengembangkan pemahaman tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mendorong pengembangan karakter? (3) Karakter siswa: sejauh mana siswa memanifestasikan pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai-nilai etis inti? Hal seperti itu dapat dilakukan di awal pelaksanaan pendidikan karakter untuk mendapatkan baseline dan diulang lagi di kemudian hari untuk menilai kemajuan.¹⁸⁶

¹⁸⁶<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/15/129378/68/11/Menata-Ulang-Pendidikan-Karakter-Bangsa>, 22/3/2010.

F. Penutup

Pendidikan karakter sebagai upaya membangun kesadaran dan identitas bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini dilanda berbagai keterpurukan. Pendidikan karakter menyangkut pemahaman, penghayatan, dan perilaku baik yang dikembangkan dari nilai-nilai inti. Pendidikan karakter di sekolah menjadi tanggung jawab bersama komponen yang ada di sekolah, kemitraan antara sekolah dan keluarga.

Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kemajuan terhadap karakter peserta didik menjadi tolok ukur pendidikan karakter. Sehingga perlu dipertimbangkan mengenai isi program, strategi dan prinsi-prinsip serta penilaian pendidikan karakter yang diselenggarakan di sekolah.

PENDIDIKAN ISLAM PROFETIK

A. Pendahuluan

Tulisan ini diberi judul Pendidikan Islam Profetik. Praksis pendidikan Islam dimaksudkan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan Islam yang dapat mempengaruhi hasil dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Penyelenggaraan pendidikan yang cenderung ke arah hasil baik, menurut Djohar antara lain dapat diukur dari (1) pendidikan yang dirasa berguna bagi kepentingan peserta didik, (2) pendidikan yang dirasa nyaman bagi peserta didik, (3) pendidikan yang mempunyai muatan transformatif bagi kehidupan peserta didik, baik pribadi maupun sosial ekonomi, dan pendidikan yang (4) manusiawi, bebas dari penindasan dan tekanan terhadap peserta didik¹⁸⁷. Adapun penyelenggaraan pendidikan yang cenderung ke arah hasil tidak baik di antaranya ialah (1) pendidikan yang dirasakan membelenggu peserta didik, (2) pendidikan yang dirasa tidak bermanfaat bagi peserta didik, (3) pendidikan yang realitasnya tidak mampu mengembangkan kepribadian, cara berfikir, sikap menghadapi masalah, tanggung jawab, bekerja tuntas, kontrol dan pengendalian diri, yang kesemuanya menjadi unsur-unsur "*structured person*" bagi manusia yang memiliki peradaban tinggi¹⁸⁸. Muh. Agus Nuryatno, menyatakan pendidikan seharusnya dimaknai sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, menyiapkan manusia untuk bisa hidup di

¹⁸⁷Johar, "Praksis Pendidikan Berwawasan Lingkungan", dalam Shindunata (ed), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 113.

¹⁸⁸ *Ibid.*

dan *bersama* dunia, dan sekaligus membantu manusia untuk menjadi agen bagi dirinya sendiri di dunia¹⁸⁹.

Pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini adalah berbagai kritik dan solusi terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam, dan misi profetik pendidikan Islam (humanisasi, liberasi, dan transendensi).

B. Penyelenggaraan pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam menurut Zarkowi Soejoeti, dimaknai; *pertama* jenis pendidikan yang penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat dan cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjaikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan seperti ilmu lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai, juga sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang ditawarkannya¹⁹⁰.

Dari pengertian yang diberikan Zarkawi itu, keberadaan Pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal, yang menurut Maududi

¹⁸⁹ M. Agus Nuryatno, *Rekonstruksi Pendidikan Agama dalam Masyarakat Pluralistik*, Pidato Ilmiah dalam Rangka Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga Ke-58. hal. 3.

¹⁹⁰ Malik Fadjar, "Pengembangan Pendidikan Islam" dalam *Kontektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hal. 507-508.

yaitu menyiapkan siswa agar mampu mengemban misi yang diberikan oleh Allah, yakni sebagai *khalifah* dan '*abid*'¹⁹¹.

Berbagai kritik dialamatkan terhadap pendidikan Islam sebagai rasa tanggung jawab terhadap peran besar yang diemban pendidikan Islam sehingga "panorama" pendidikan Islam lebih cerah. Menurut sahirul Alim, yang perlu mendapat perhatian serius adalah kualitas pendidikan, yang mana hal ini terkait dengan materi yang akan disampaikan dan mutu para guru atau pendidiknya¹⁹². Yang paling mendapat perhatian adalah kualitas pendidiknya. Berdasarkan data kualifikasi pendidikan Guru Madrasah pada tahun 2006/2007 menunjukkan bahwa: untuk MI 42.2 % kualifikasi pendidikan guru di bawah D1, dan 20.5 % berpendidikan setingkat sarjana dan di atasnya (> D3). Untuk Guru MTs yang berpendidikan sarjana ke atas sebesar 59.9 %. Sedangkan untuk tingkat MA kualifikasi guru di atas diploma tiga (>D3) sebesar 77.5 %.¹⁹³

Komarudin Hidayat juga memberikan beberapa kritik terhadap pendidikan agama. *Pertama*, pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya. *Kedua*, kurang tepatnya pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga hal-hal yang prinsipil terkadang dikalahkan dengan hal-hal yang bersifat *fikhiyah*. Apalagi pengajaran fiqh lebih dominan hanya satu mazhab tertentu saja dengan mengabaikan mazhab yang lain. Padahal pluralitas mazhab fiqh seharusnya diajarkan sebagai sebuah fakta teologis dan sosiologis yang tidak bisa terpungkiri. *Ketiga*, kurangnya penjelasan yang luas dan

¹⁹¹ Ismail SM, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 131.

¹⁹² Sahirul Alim, *Menguak Keterpaduan sains, Teknologi dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Illahi, 1999), hal. 28.

¹⁹³ Bambang Setiawan, *Analisis Kualifikasi Guru pada Pendidikan Agama dan Keagamaan*, dalam [www. Depag.go.id](http://www.Depag.go.id)

mendalam tentang pokok-pokok ajaran agama.¹⁹⁴ Abdul Munir Mulkan, menyatakan bahwa masyarakat mulai tidak tertarik terhadap ilmu-ilmu keagamaan akibat kurangnya ilmu-ilmu ini berfungsi bagi kehidupan praktis, sehingga semakin menurunnya peminat untuk masuk mendaftar di lembaga pendidikan keagamaan (IAIN, STAIN atau swasta lainnya).¹⁹⁵

Menurut Mohammad Ali, hasil pendidikan agama selama ini belum memuaskan karena terkait dengan sejumlah persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan agama itu sendiri, utamanya kesalahan proses pembelajaran.¹⁹⁶ Lebih lanjut dikatakan, bahwa kekurangan pendidikan pendidikan agama disebabkan (1) kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek pengalaman ajaran agama dalam pembentukan akhlak dan karakter; (2) jumlah pendidik dan kependidikan lainya yang bermutu belum mencukupi; (3) sarana dan prasarana yang terbatas; dan (4) fasilitas lainya yang belum memadai; serta (5) kendala lain, arus globalisasi terutama media cetak dan elektronik sangat deras masuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan agama.¹⁹⁷

Berbagai kritikan tersebut di atas, kelemahan pendidikan Islam selama ini terkait dengan, (1) proses pembelajaran yang

¹⁹⁴ Komarudin Hidayat, "Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam (Kata Pengantar), dalam Fuaddudin dan Cik Hasan Basri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hal. Xii-xiii.

¹⁹⁵ Abdul Munir Mulkan, "Spiritualisasi Iptek dalam Perkembangan Pendidikan Islam" dalam Kusmana dan JM. Muslim (ed), *Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Diktis Dirjen Pendis Departemen Agama RI, 2008), hal. 169.

¹⁹⁶ Marwan Saridjo, "Pendidikan Islam dan Beribu Kata Berjawab Sebuah Prolog" dalam Marwan, Saridjo (penyunting), *Mereka Berbicara Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. xxxiv.

¹⁹⁷ *Ibid.*

cenderung kognitif, hafalan, dan indokrinatif; (2) kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan sarana yang belum memadai, (3), kurikulum atau isi pendidikan Islam; (4) paradigma, dan, (5) epistemologi.

Berbagai kelemahan tersebut menggambarkan penyelenggaraan pendidikan Islam itu harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Para ahli menawarkan solusi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, dalam pembelajaran misalnya, Muh. Agus Nuryatno menawarkan pembelajaran transformatif agama. Sedangkan Musthafa Rembangy menawarkan pendidikan transformatif.¹⁹⁸ Dalam paradigma pendidikan, misalnya, Moh. Shofan,¹⁹⁹Kuntowijoyo,²⁰⁰ dan Khoiron Rosyadi²⁰¹ menawarkan paradigma Pendidikan profetik. Sedangkan Amin Abdullah untuk mengatasi dikotomi menawarkan paradigma Integrasi-interkoneksi.²⁰² Paradigma yang ditawarkan Amin Abdullah, adalah perkembangan sejarah hubungan antara sains dan agama, yang oleh Ian G. Barbour digambarkan bahwa sejarah hubungan sains-agama terdiri empat tiopologi, yaitu; Konflik, Independensi, Dialog, dan Integrasi, dan dia menyatakan “bersimpati kepada Dialog dan Integrasi”.²⁰³ Dalam bidang epistemologi, misalnya M.

¹⁹⁸ Musthafa Rembangy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 201.

¹⁹⁹ Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, (Jawa Timur: UMG Press, 2004), hal. 131.

²⁰⁰ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, tth), hal. 106.

²⁰¹ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 302.

²⁰² M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. viii-ix.

²⁰³ Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains dan Agama*, Penerjemah : E.R. Muhammad, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 40-42.

Suyudi menawarkan integrasi epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani,²⁰⁴ yang dikembangkan dari Muhammad Abid al-Jabiri.²⁰⁵ Epistemologi Bayani bertumpu pada teks, burhani bertumpu pada nalar (logika), dan Irfani bertumpu pada intuitif yang juga lazim disebut ilmu hudluri atau isyraqi.²⁰⁶

Sebuah kenyataan, bahwa Indonesia memiliki berbagai keragaman, baik budaya, suku, etnis, dan agama. Agama menurut Soejatmoko dapat mempunyai kekuatan positif dalam mengerakkan transformasi sosial tetapi dapat juga menyebabkan konflik sosial apabila tidak disadari akan bahaya-bahaya *inkluisivisme* yang menggunakan lambang-lambang agama untuk kepentingan masyarakat yang eksklusif²⁰⁷.

Ada beberapa prinsip pembelajaran agama berbasis multikultural: (1) Mengajarkan Pendidikan Islam dengan mempertimbangkan pluralitas paham keagamaan peserta didik, (2) Mengajarkan agama Islam dengan mempertimbangkan pluralitas agama yang ada di Indonesia. Artinya, peserta didik diajarkan untuk berpegang teguh pada ajaran agamanya tetapi tetap menghormati agama lain yang dianut oleh peserta didik yang lain. Keyakinan yang teguh terhadap ajaran agama yang dianut tidak menimbulkan kebencian terhadap agama lain. Pendidikan agama dengan perspektif multikultural mengajarkan kepada peserta didik untuk menghormati agama-agama yang hidup dalam masyarakat, tanpa berburuk sangka kepada pemeluk agama lain; (3) mengajarkan agama Islam dengan mempertimbangan keragaman kemampuan peserta didik Perbedaan inilah yang harus diakomodasi dalam pembelajaran agama; (4) Mengajarkan agama dengan aspek gender. Karena Islam

²⁰⁴ M. Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), hal. 183-184.

²⁰⁵ M. Amin Abdullah, *Islamic....*, hal. 201.

²⁰⁶ M. Suyudi, *Pend....*, hal. 169.

²⁰⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesiatara, 2003), hal. 36.

mengajarkan kesetaraan gender maka proses pembelajaran agama harus memperhatikan keadilan gender ²⁰⁸.

Praktik penyelenggaraan Pendidikan agama yang memperhatikan seperti yang digambarkan di atas, menurut Agus Nuryatno sesungguhnya pendidikan Islam telah menyiapkan peserta didik untuk menjadi bagian dari masyarakat (*a part of siciety*) yang sesungguhnya. Sedangkan bila dikembangkan dengan tidak mengembangkan hal tersebut sebenarnya pendidikan agama hanya menyiapkan peserta didik yang jauh dari kontek kehidupan sosial yang ada ²⁰⁹. Hal demikian ini sejalan dengan *The Delhi Declaration* yang dirumuskan dari hasil pertemuan sembilan negara yang membahas pendidikan untuk semua, bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan diharapkan mampu menegakakan nilai-nilai manusia universal, kualitas sumber daya manusia, dan penghargaannya terhadap keragaman budaya ²¹⁰.

C. Pendidikan Islam Sebagai Proses: Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi

Pendidikan sebagai sistem terdiri dari *input* (masukan), proses, dan *Out put* (produk, hasil secara langsung), serta *out come* (hasil secara tidak langsung). Input terkait dengan peserta didik, proses adalah terkait dengan bagaimana pebelajaran dilangsungkan, yang di dalamnya tergantung pendidik,lingkungan, kondisi, dan sarana dan prasarana, serta sumber belajar. Out put terkait hasil dari proses pembelajaran yang bersifat nyata yang dinyatakan dengan bukti formal sebagai pengakuan terhadap hasil belajar peserta didik, yang selanjutnya menjadi modal maujud atau nyata.

²⁰⁸ *Ibid*, Hal. 18.

²⁰⁹ *Ibid*.

²¹⁰ Johar, *Praksis....*, hal. 119.

Sedang out come adalah terkait hasil dari proses pembelajaran yang menjadi modal maya.

Dalam praktiknya, yang sering menjadi perhatian utama dalam pendidikan adalah faktor input atau peserta didik kurang memperhatikan proses pendidikan. Sehingga pendidikan bersifat mekanis, yang dihasilkan hanya produk, bukan out come. Pendidikan yang menekankan produk, bukan out come adalah pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki orientasi "to have" bukan "to be". Orientasi "to have" adalah keserakahan, sedangkan orientasi "to be" adalah menjadi diri yang transformatif, profetik (liberasi, humanisasi, dan transendensi).

Pendidikan Islam sebagai proses sesungguhnya adalah penyadaran "menjadi" transformatif, profetik. Yang dilakukan pendidik pertama-tama adalah belajar bagaimana melanjutkan proses belajarnya sendiri ketika mereka mulai mengajar.²¹¹ Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh pendidik adalah "konsep" bukan "resep".

Pendidikan Islam sebagai proses atau penyadaran, penulis menggunakan acuan Kuntowijoyo, bahwa cita-cita transformatif Islam adalah sebagai berikut:

*"Bahwa cita-cita itu, berakar pada misi ideologis amar ma'ruf dan nahiyy munkar. Yang pertama berarti humanisasi, dan yang kedua, lebih liberasi (pembebasan). Setiap gerakan Islam ke arah transformasi sosial pasti melibatkan unsur humanisasi, liberasi dan transendensi. Karena itu, agar terancang lebih sistematis dan ilmiah, suatu gerakan sosial, harus dimotivasikan dan didasarkan pada teori sosial. Tetapi karena teori sosial Islam, sedang dibangun, kita perlu melihat perkembangan teori sosial Barat khususnya yang berkaitan dengan transformasi sosial."*²¹²

²¹¹ Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Proses, Surat-Menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-bissau*, (Penerjemah: Agung Prihantoro), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 8-9.

²¹² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 327, 340-344. Lihat juga Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 15.

Tiga muatan nilai inilah-humanisasi, liberasi, dan transendensi- yang mengkarakteristikkan ilmu sosial profetik,²¹³ yang diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam QS. Ali Imran [3], ayat 110: *Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan) dan beriman kepada Allah.*²¹⁴ Dengan kandungan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, ilmu sosial profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa depan.

Dalam konteks pendidikan Islam sebagai proses, ketiga nilai profetik (humanisasi, liberasi, dan transedensi) tetap menjadi acuan penulis.

1. Pendidikan Islam Sebagai Proses Humanisasi

Humanisasi yang dalam bahasa latin, *huanitas* berarti “makhluk manusia”, “kondisi menjadi manusia”.²¹⁵ Jadi humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia.²¹⁶ Proses memanusiakan manusia, sebagaimana juga pendidikan, maka ia harus dimulai dari suatu proses yang dialogis dengan melibatkan kesadaran kritis. Ini sesungguhnya manusia harus ditempatkan dalam proses sejarahnya masing-masing-juga proses sejarah masyarakatnya-sebagai subjek yang menentukan pilihannya sendiri²¹⁷. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing manusia itu berbeda atau unik.

Humanisasi menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berkesadaran. Ia berada dalam diri dan bersama dengan dunia. Implikasinya, adalah ia harus “hidup sendiri” bersama dengan orang lain dan realitas yang melingkupinya. Bagi Freire, humanisasi inilah yang

²¹³ Moh. Shofar, *Pendidikan*, hal. 136.

²¹⁴ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, hal. 87.

²¹⁵ *Ibid*, hal. 98.

²¹⁶ *Ibid*.

²¹⁷ Moh. Shofar, *Pendidikan...*, hal. 142.

akan membawa rakyat pada perubahan realitas secara manusiawi.²¹⁸ Sehingga manusia yang humanis, menurut Freire ialah ia yang menjadi pencipta dari sejarahnya sendiri, makhluk yang berada dalam proses menjadi.²¹⁹ Manusia adalah makhluk kalau dirinya tidak lengkap, dan bahwa dirinya berada dunia yang juga belum selesai. Kedua kondisi mendasar tersebut mengakibatkan pendidikan menjadi kegiatan yang berjalan terus menerus.

*"Kini, pandangan umat manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan telah bergeser menuju sesuatu yang bersifat materialistik sehingga sangat wajar apabila nilai-nilai tersebut hampir punah. Berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti pemiskinan, korupsi, aksi teror, perdagangan anak, merupakan akibat secara tidak langsung bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sendiri semakin menipis. Dalam dunia pendidikan, sering ditemukan peristiwa tawuran antar pelajar, tindakan-tindakan amoral di sekolah maupun proses pembelajaran yang tidak humanis, yakni masih adanya dominasi seseorang guru atau dosen atas siswa/mahasiswa."*²²⁰

Melihat kenyataan ini, dunia pendidikan memiliki peran penting dalam proses transformasi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dalam kondisi apapun nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dijaga, agar dalam kehidupan umat manusia ini tidak terjadi praktik dominasi bahkan manipulasi. Meminjam pernyataan Freire bahwa di dalam budaya dan kehidupan sehari-hari, terjadi banyak manipulasi.²²¹

Dalam konteks pendidikan Islam, humanisasi tidak sekedar diartikan kesadaran akan realitas aktual, tetapi juga

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 143.

²¹⁹ Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hal. 82.

²²⁰ Musthafa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 117.

²²¹ Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 159.

mencakup kesadaran terhadap diri pribadi yang utuh. Suatu proses pendidikan yang lebih mementingkan penyadaran terhadap realitas-realitas aktual saja adalah suatu proses pendidikan yang tidak sejalan dengan konsep Islam tentang manusia.

Nilai dasar menjadi manusia yang sesungguhnya adalah berfungsinya potensi dasar manusia secara optimal sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan, dan cara untuk mengotimalisasi melalui pendidikan. Menurut Immanuel Kant, manusia dapat menjadi manusia karena pendidikan.²²² Hal ini mengandung pengertian, bila seseorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka tidak akan menjadi manusia sebenarnya. Dalam artian tidak sempurna hidupnya dan tidak akan memenuhi fungsinya sebagai manusia yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya. Untuk memenuhi fungsinya, menurut Musthofa Remangy, ia terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan biologis, psikis, sosial, agama, dan agama.²²³

Pendidikan sebagai proses humanisasi dapat berarti suatu proses penyadaran akan eksistensi diri manusia sendiri (manusia sesungguhnya menurut pandangan Islam) terhadap realitas historis yang objektif dan aktual.

Pendidikan sebagai proses humanisasi adalah menghidupkan aktifitas pembelajaran secara bersama-sama, yang terbangun atas kerjasama sinergis antara subjek didik dan guru dikarenakan pendidikan merupakan penggarapan realitas mereka sendiri. Dengan kata lain, subjek didik menjadi subjek yang belajar, subjek yang berfikir dan bertindak, dan pada saat yang bersamaan berbicara menyatakan fikiran dan hasil tindakan, begitu juga yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik.

Jadi, antara pendidik dan subjek didik saling belajar sama lain, saling memberi, dan saling memanusiakan. Hubungan antara pendidik dengan subjek didik menjadi

²²² Musthafa Rembangy, *Pendidikan.....*, hal. 143.

²²³ *Ibid.*, hal. 144.

subjek-subjek, bukan subjek-objek. Sedangkan yang menjadi objek belajar adalah realitas kehidupan. Dengan demikian terciptalah suasana dialogis yang bersifat intersubjek di dalam memahami suatu objek bersama.²²⁴

2. Pendidikan Islam Sebagai Proses Liberasi

Liberasi berasal dari bahasa latin *liberate* berarti “memerdekakan” artinya “pembebasan”, semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial.²²⁵

Manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, termasuk dalam hal memilih nilai. Hal ini diisyaratkan sendiri dalam QS. Al-Kahfi [18] ayat 29: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah kafir”. Kebebasan yang diberikan kepada manusia itu memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan berdasarkan pilihanya. Dengan potensi kemauan bebas, perasaan bebas dan akal bebas ini manusia dapat mengembangkan diri untuk mencapai tujuan berdasarkan kemauan sendiri, perasaan sendiri, dan akalnya sendiri, yang pada akhirnya menuntun manusia itu menjadi diri sendiri sendiri pada subyektifitas bukan obyektifitas yang hanya memasungnya.

Pendidikan sebagai proses liberasi dapat berarti suatu proses penyadaran akan eksistensi diri manusia sendiri terhadap realitas yang objektif dan aktual sebagai tuntutan pertanggungjawaban akan makna hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan merupakan proses di mana pendidik mengkondisikan siswa untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis.²²⁶

²²⁴ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, edisi terj. Alois A. Nugroho,), hal. 5.

²²⁵ Kuntowijoyo, *Islam sebagai....*, hal. 98.

²²⁶ Paulo Freire, *Politik Pendidikan.....*, hal. 176.

Konsep pendidikan sebagai proses liberasi (pembebasan) versi Paulo Freire dapat digunakan untuk melihat problem pendidikan Islam masa kini dan masa mendatang. Pertanyaannya ialah mampukan pendidikan Islam-yang merupakan media transformasi nilai-nilai Islam yang di dalamnya terdapat misi pembebasan-menggunakan prinsip-prinsip pembebasan sebagai wujud nyata dari Islam sebagai agama pembebasan.

Praktik-praktik pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan ini, menuntut keterbukaan dan intensitas dialog dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat diperlukan karena dengan penciptaan suasana dialogis, secara psikologis subjek didik merasa terlibat, dihargai, ikut ambil bagian dan bahkan merasa memiliki. Kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap perkembangan potensi-potensi dasar subjek didik, sehingga mudah menciptakan gagasan kreatif dan inovatif, mandiri dan mampu merekayasa perubahan secara bertanggungjawab. Sikap-sikap kemandirian inilah yang sesungguhnya dikehendaki dari pendidikan sebagai praktik pembebasan.

Mengacu kepada arti kebebasan, keterlibatan peserta didik dalam proses pendidikan sebaiknya dimulai sejak dini dan dibiasakan bersikap mandiri, sehingga pada saatnya nanti ia akan mampu menghadapi persoalan-persoalan dan sanggup mengatasinya. Tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain selagi ia masih mampu melakukannya sendiri.

Mencermati hal tersebut diatas, pendidikan Islam semestinya dapat menciptakan pribadi-pribadi manusia yang memiliki dimensi pembebasan dari segala bentuk penindasan; sistem pengetahuan (pengetahuan materialistik, dari dominasi struktur), sistem sosial (pengelompokan sosial, pendidikan, kepemimpinan), sistem ekonomi, dan sistem politik (otoritarianisme, diktator, dan neofeodalisme).²²⁷ Demokrasi, HAM, dan masyarakat

²²⁷ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai....*, hal. 103-104.

madani, multikulturalisme adalah juga tujuan Islam. Menjadi manusia yang mampu memposisikan diri sebagai pemain perubahan serta dapat mengendalikannya.

3. Pendidikan Islam Sebagai Proses Transendensi

Kata transendensi yang dalam (bahasa Latinnya *transendere* berarti “naik ke atas”; bahasa Inggris *to transcend* ialah “menembus”, “melewati”, “melampaui”) artinya “perjalanan di atas atau di luar”.²²⁸ Kata ini memiliki pengertian yang berbeda-beda, meliputi istilah sehari-hari (misalnya orang yang super kuatnya seperti superman), sastra transendental (sastra yang mencoba mencari realitas spiritual di balik gejala-gejala), filsafat transendental, gejala supranatural (misalnya ESP [*Extra sensory Perception*] dan TM [*Transcendental Meditation*], dan istilah teologi. Dalam istilah teologi, transendensi berarti dimensi keimanan manusia.²²⁹

Modernitas Barat dimulai pada abad ke-15 Masehi, yakni ketika bangsa Barat meninggalkan ikatan spiritual gereja dan memfokuskan pada landasan kehidupan yang berpijak pada rasio (akal). Menurut pandangan Barat, nilai spiritual gereja tidak jarang dianggap sebagai “penghambat bagi pembangunan yang berorientasi materialistis. Dengan mengandalkan rasio, dunia Barat kemudian mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga permulaan abad ke-21, Barat masih menjadi pemegang konstelasi dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kondisi yang demikian, Barat menjadi pihak yang modern.

Meskipun demikian, kemajuan Barat tidak lepas dari kritik. Berbagai kritik justru datang dari bangsa Barat itu sendiri, pihak-pihak yang justru telah memahami dan menikmati alam kehidupan modern. Sasaran utama dari

²²⁸ *Ibid.*, 98-99.

²²⁹ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan.....*, hal. 304.

kritik mereka adalah pendewaan terhadap rasio yang berlebihan. Rasio merupakan buah penting dari zaman pencerahan di Eropa Barat. Pada saat itu rasio dipandang sebagai “mesin modernitas”.²³⁰ Namun pada masa sekarang, telah terbukti bahwa rasio secara fundamental tidak memadai. Lebih-lebih karena rasio sekedar berpusat pada diri sendiri. Bahkan, Arnold J. Toynbee, sejarawan kenamaan Inggris, mengkritik peradaban modern Barat sebagai telah “kehilangan Tuhan”, karena acuan moralnya telah berantakan berkeping-keping. Dalam peradaban Barat, ilmu pengetahuan dan teknologi modern justru menyebabkan kekosongan spiritual, karena agama sudah tidak dipercayai lagi. “Kekosongan ini harus diisi dengan agama sebagai perbaikan spiritualitas kita”²³¹, demikian Toynbee menjelaskan.

Klimaks dari kritik atas modernitas yang sangat mendewakan rasio, maka pada pascamodernisme muncul penghargaan terhadap pandangan hidup *perennial*. Perenialisme berpandangan bahwa sesungguhnya manusia, di mana pun dan kapanpun, membawa potensi kebaikan yang sama, dan kemungkinan pencerahan yang sama. Menurut versi *perennial*, kemanusiaan bersifat universal.²³²

Dalam perspektif Islam, yakni menurut Al-Qur’an, yang, yang dimaksud dengan *perennial* ialah nilai kemanusiaan yang bersumber pada asal manusia yang suci (*fitrah*) yang mempunyai watak kesucian dan lurus (*hanif*).²³³ Fitrah dan hanif merupakan tindak lanjut dari perjanjian antara Tuhan dengan roh manusia. Berpegang pada perjanjian itu, ruh manusia senantiasa dijiwai oleh kesadaran tentang Yang Mutlak dan Yang Maha suci (*Transendental*). Suatu kesadaran tentang kekuatan Maha

²³⁰ Abdullah Idi & Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 109.

²³¹ *Ibid*, hal. xi.

²³² *Ibid*., hal. 109

²³³ *Ibid*.,

tinggi yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada di jagat raya ini. Dalam konteks tersebut, pencerahan di Barat tidak lagi mengakui kemanusiaan berdasarkan penciptaan asal yang suci dari Tuhan.

Pendidikan Islam diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai transendental dalam individu peserta didik, dan masyarakat sosial. Yang perhatian dalam transendensi ini adalah perlunya dilakukan penelitian terhadap masalah umat, misanya gerakan-gerakan Islam yang merupakan *splinter group* seperti LDII, Jamaah Tabligh, Darul Arqom, dan sebagainya yang menggelisahkan *mainstream* umat karena tiba-tiba muncul cadar, jibah, "kacung" (celana komprang). Jelas bahwa mereka adalah gejala anti-industrialisme, tetapi tidak anti-industri. Namun, kadang-kadang mereka mengejutkan kalangan *mainstream* karena dengan mudah mengkafirkan orang lain.²³⁴

D. Penutup

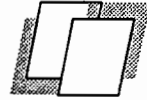
Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, yang ditransformasikan lewat pendidikan Islam. Sehingga dalam praksisnya harus merupakan "panorama" yang indah. Pendidikan Islam menjadi "panorama" yang indah apabila bersifat transformatif, mengembangkan nilai profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi) secara integratif. Dengan humanisasi, Islam menekankan pentingnya memanusiakan dalam proses perubahan. Sedangkan dengan liberasi, Islam mendorong gerakan pembebasan terhadap segala bentuk determinisme kultural dan struktural seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Dan dengan transendensi, perubahan dicoba diberi sentuhan yang lebih maknawi, yaitu perubahan yang tetap berada dalam bingkai kemanusiaan dan ketuhanan. "*kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan. Kita ingin hidup kembali dalam suasana*

²³⁴ Kuntowijoyo, *Islam.....*, hal. 107.

yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan". Demikian Kuntowijoyo.

Ketiga nilai, humanisasi, liberasi dan transendensi jika dimplikasikan dalam pendidikan maka akan terwujud pendidikan yang humanis, pendidikan yang liberalis dan pendidikan yang mempunyai nilai-nilai tauhid, sehingga pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang secara integralistik terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang yang dipandang sekuler maupun yang Islam. Pendidikan yang dipandang sekuler dengan mengambil dasar dan sumber pengetahuannya dari Al-Qur'an bisa diharapkan mengandung nilai-nilai normatif Islam (humanisme teosentris). Dalam implementasinya dapat menghasilkan pendidikan humanistik yang mempunyai orientasi proses pendidikan sebagai berikut: 1) Tujuan pendidikan humanistik adalah membudayakan manusia atau memanusiakan manusia, 2) Materi pendidikan humanistik adalah menurut ilmu-ilmu kemanusiaan, 3) Metode pendidikan humanistik adalah menghargai harkat dan martabat dan derajat manusia, 4) Proses pendidikan humanistik adalah menciptakan suasana pendidikan manusiawi, 5) Evaluasi pendidikan humanistik adalah mengetahui mengevaluasi perkembangan anak didik sebagai dasar anak manusia yang sedang berkembang dengan menurut dasar kriteria kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.2011.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi kependidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Agus R. Sarjono, *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Al wisol, *Psikologi kepribadian*, Malang: UMM Press, 2007.
- Amin Abdullah,. *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997,
- Arya Maheka, *Menggali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, Kemitran Partnership dan Delind.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: logos,1999.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Barry Chazan, (tth), *Contemporary Approach to Moral Education* , Teachers Collage Press.
- Berwawy Munthe, dkk, *Sukses di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- C. Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. (Jakarta: Rineka Cipta), 2004.
- Daniel Goleman. *Emotional Intelligence* (terj.), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Diane Tilman, *Pendidikan nilai untuk anak usia 8 - 14 tahun*, penterjemah Adi Respati, dkk, Jakarta: Grasindo, 2004 .

- Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti, *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. 2010.
- Djamaluddin Ancok. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta: Grasindo, 1993.
- Fuad Nashori, *Potensi-Potensi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, terj. Mahmud Arif, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- H. Una Kartawisastra, dkk, *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G0), 1980.
- H.A. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesiatara, 2003.
- , *Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- H.M. Suyadi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Mikraj, 2005.
- Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hamzah Yakub. *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro, 1985.
- Hasyim Muhammad, *Dialog antara Tasawuf dan Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2002.
- Hasyim Muhammad, *Dialog antara Tasawuf dan Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasyimsyam Nasution. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

- Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku Dua Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta; Andi Offset, 1987.
- Ismail SM, Abdul Mukti, (ed), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ismail SM, Nurul Huda, dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994.
- Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia kerja sama dengan Transparency International Indonesia, 2003.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Karel A. Steebrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Khoiruddin Bashori. *Problem Psikologis Kaum Santri*. Yogyakarta: FKBA., 2004.
- Komarudin Hidayat, "Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam (Kata Pengantar), dalam Fuaddudin dan Cik Hasan Basri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Memahami, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

- , *Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.
- , *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, ideologi, dan Ilmu*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah, Disampaikan di depan Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada pada tanggal 21 Juli 2001 di Yogyakarta.
- Kusmana dan JM. Muslimin, *Paradigma Baru Pendidikan Islam Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Diktis Dirjen Pendis Depag RI, 2008.
- Lapis, *Dasar-Dasar Kependidikan*.
- Lusi Nurhayati. *Psikologi Anak*. Jakarta: PT Indeks.2008.
- M. Agus Nuryatno, *Rekonstruksi Pendidikan Agama dalam Masyarakat Pluralistik*, Pidato Ilmiah dalam Rangka Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga Ke-58.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Magnis Suseno. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Mahmud Arif, *Al-Qur'an dan Pembelajarannya*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2006.
- Malik Fadjar, "Pengembangan Pendidikan Islam" dalam *Kontektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Marwan Sarijo (Penyunting), *Mereka Bicara Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim NPK, PBNu, 2006.
- Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, Jawa Timur: UMG Press, 2004.
- Mohammad Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK, 2008.
- Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Muhibbin Syah, *Psikologi pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Musthafa Rembangy, *Pendidikan Transformatif*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nigel C. Benson & Simon Grove, *Psikologi for Beginners*, terj. Bandung: Mizan, 2000.
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- , *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Paul Suparno, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Paulo Freir, *Pendidikan Sebagai Proses*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. 2010.
- PP No. 19. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Pramoni U. Tanthowi, dkk, (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sahirul Alim, *Menguak Keterpaduan sains, Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Titian Illahi, 1999.
- Saring Marsudi dkk, *Layanan bimbingan Konseling di Sekolah*, Surakarta, FKIP Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*.
- Suyanto dan M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta: Adicita, 2001.

- Suyanto, *Tantangan Profesional Guru di Era Globalisasi*, Yogyakarta: UNY, 2007.
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syamsul Anwar, dkk, *Fiqh Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban) kerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PPNU, kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, 2006.
- Syamsul Anwar. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Hadits" dalam. *Jurnal Hermenia*. Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2005.
- Tatang Syarifudin, *Landasan Pendidikan*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2012.
- Tim Dosen FIP- IKIK Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Tim Editor, *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Malang: Program Studi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2010.
- UU No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.
- Zulkipli L, *Psikologi Perkembangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 52

Dasar – dasar Pendidikan

Sesungguhnya yang dimaksud dengan Dasar-Dasar Pendidikan ialah uraian ringkas asas-asas atau Pengantar Pendidikan. Dasar-Dasar Kependidikan sama artinya dengan Dasar-dasar Pendidikan. Karena itu dapat pula diartikan sebagai Pengantar Pendidikan atau Dasar-dasar Ilmu Pendidikan.

Buku ini akan menguraikan pembahasan tentang dasar-dasar pendidikan tersebut didasarkan pada hal –hal yang bersifat praktis. Selain itu akan diuraikan juga aspek-aspek yang berhubungan dengan masyarakat dan negara, berbagai isu pendidikan kita sehingga secara fungsional buku ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangsih bagi pengembangan pendidikan kita.

ISBN 978-602-17039-1-5



Grass Media Production
Jl. Gabus I No. 18 Minomartani Ngaglik
Sleman Yogyakarta 55581
Telp. (0274)6551930, Hp.081903719517
Email : grass_mediaproduction@yahoo.com